



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN
TASIKMALAYA TAHUN 2020**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN LANJUTAN DENGAN AGENDA
PEMBUKTIAN (PEMERIKSAAN SAKSI DAN/ATAU AHLI SECARA
DARING (ONLINE)) SERTA PENYERAHAN DAN PENGESAHAN
ALAT-ALAT BUKTI TAMBAHAN DI PERSIDANGAN
(III)**

JAKARTA,

KAMIS, 4 MARET 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020

PEMOHON

Iwan Saputra dan Iip Miptahul Paoz

TERMOHON

KPU Kabupaten Tasikmalaya

ACARA

Pemeriksaan Persidangan Lanjutan Dengan Agenda Pembuktian (Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli secara Daring (Online)) serta Penyerahan dan Pengesahan Alat-Alat Bukti Tambahan di Persidangan (III)

**Kamis, 4 Maret 2021, Pukul 08.09 – 13.16 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Indah Karmadaniah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Iwan Saputra

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Andi Irwanda
2. Tonny Irawan
3. Giofedi Rauf
4. Kelana Surya Alam

C. Ahli dari Pemohon:

Topo Santoso

D. Saksi dari Pemohon:

1. Saniah
2. Susilo Firdaus
3. Mutakin

E. Termohon:

1. Zamzam Zamaludin (Ketua KPU Kab. Tasikmalaya)
2. Fahrudin
3. Reza Alam

F. Kuasa Hukum Termohon:

1. Ali Nurdin
2. Agus Koswara
3. Happy Ferovina
4. Greta Santismara

G. Ahli dari Termohon:

Nur Hidayat Sardini

H. Saksi dari Termohon:

1. Agam Sandi
2. Suwardi

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Muchammad Alfarisi
2. Muhammad Ridwan Saleh
3. Dedi Mulyana
4. Hendri Sita Ambar
5. Galih Faisal

J. Ahli dari Pihak Terkait:

I Gde Pantja Astawa

K. Saksi dari Pihak Terkait:

1. Mohamad Zen
2. Kusnanto
3. Panji Permana

L. Bawaslu:

1. Ahmad Aziz Firdaus
2. Yusup Kurnia
3. Rizki Dermawan
4. Dodi Juanda
5. Abdullah
6. Ratna Dewi Pettalolo

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.09 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, semua Pihak yang hadir secara langsung maupun melalui online.

Hari ini kita akan memeriksa Perkara Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021.

Baik, sidang untuk Perkara Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Tasikmalaya dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Para Pihak, sebelum kita mulai ini menjadi standar sebelum kita sidang. Kita mengulang kembali bahwa selama dalam ruangan sidang kita harus tetap menjaga protokol kesehatan termasuk menggunakan masker secara benar. Demikian juga yang berada di apa ... di luar ruangan sidang ini yang ikut secara online kalau di dalam ruangan lebih dari 1 orang diharapkan juga untuk tetap menjaga protokol kesehatan.

Yang kedua Para Pihak kalau masih ada alat bukti tambahan yang akan dimasukkan agar segera dimasukkan pada awal sidang, sehingga kami punya waktu untuk melakukan verifikasi pada akhir sidang nanti.

Hari ini kita akan memeriksa Saksi dan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

Silakan memperkenalkan diri dulu Pihak Pemohon.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRWANDA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Kuasa Pemohon 51/PHP.BUP-XIX/2021 Tasikmalaya yang hadir saat ini Kuasa Andi Irwanda dan Tonny Irawan, Yang Mulia. Dan untuk yang virtual kami menghadirkan Saksi 3 orang dan 1 Ahli, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ASWANTO

Baik, Ahlinya Pak Topo Santoso, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRWANDA

Ahlinya Prof. Topo.

5. KETUA: ASWANTO

Baik. Pihak Termohon, silakan Pak.

6. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya Ali Nurdin selaku Kuasa Hukum KPU Kabupaten Tasikmalaya. Bersama saya hadir Bapak Zamzam Zamaludin, S.P. selaku Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya dan secara online hadir Pak Fahrudin dari KPU Kabupaten Tasikmalaya, serta supervisi dari Pak Reza Alam selaku KPU Provinsi Jawa Barat, serta supervisi dari Bapak Hasyim Asy'ari dari KPU RI. Dan dari Kuasa Hukum secara online ada Ibu Happy Feroovina, S.H., Greta Santismara, S.H., dan Agus Koswara, S.H. 3 orang pemberi keterangan dan Saksi, serta 1 Ahli Bapak Dr. Nur Hidayat Sardini. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Ini begawan ... yang jadi Ahli begawan panwas ini. Pak Topo ini mantan Panwas Luwu, Pak Sardini mantan Ketua Bawaslu. Ini para begawan turun gunung ini.

Selanjutnya Pihak Terkait.

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pihak Terkait Pasangan Calon H. Ade Sugianto dan H. Cecep Nurul Yakin. Hadir Kuasa Hukumnya saya sendiri Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., bersama rekan kami Bapak Muhammad Ridwan Saleh, S.H. Kemudian hadir secara daring ada Dedi Mulyana, S.H., M.H., Ibu Hendri Sita Ambar, S.H., kemudian Bapak Galih Faisal, S.H., M.H.

Kami mengajukan 3 orang Saksi dan 1 orang Ahli Prof. I Gde Pantja Astawa, Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: ASWANTO

Baik, Prinsipalnya hadir?

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Prinsipalnya belum, Yang Mulia.

11. KETUA: ASWANTO

Belum hadir. Ya, ini biasanya kalau Prinsipal tidak hadir lawyer-nya tidak terlalu kencang, tapi kalau hadir kencang biar kelihatan kinerjanya, gitu. Ini pagi-pagi kita enggak boleh tegang-tegang, Pak Nurdin.

Baik, silakan panwas ... Bawaslu.

12. BAWASLU: DODI JUANDA

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya Dodi Juanda dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya beserta Ahmad Aziz Firdaus dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, juga teman-teman komisioner yang lain secara daring menyaksikan persidangan ini dari Bawaslu RI.

13. KETUA: ASWANTO

Baik. Bawaslu RI hadir juga, ya. KPU RI juga hadir.

14. BAWASLU: DODI JUANDA

Bawaslu provinsi juga hadir.

15. KETUA: ASWANTO

Bawaslu provinsi juga hadir selamat pagi semua Ibu-Bapak. Para Ahli ada Pak Topo Santoso ... Prof. Topo Santoso, Prof. I Gde Pantja Astawa, dan Pak Dr. Sardini selamat pagi semua, Pak.

Baik. Dan untuk selanjutnya dimohon dengan hormat Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo untuk (...)

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Mohon izin, Yang Mulia. Dari Pihak Terkait. Yang Mulia, mohon maaf sebelumnya. Kami dari Pihak Terkait mendapatkan informasi, Yang Mulia, terkait kehadiran Para Pihak yang sifatnya harus netral, Yang Mulia, dan tidak punya conflict of interest.

17. KETUA: ASWANTO

Dari pihak Saudara, apa yang Saudara mau sampaikan?

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Ya, dari Pihak Bawaslu Bapak Ahmad Aziz Firdaus, Yang Mulia. Berdasarkan informasi yang kami dapat, beliau ini punya hubungan kekeluargaan yang dekat dengan salah satu pasangan calon Pemohon, Yang Mulia.

19. KETUA: ASWANTO

Baik.

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Dalam hal ini Bapak Iip, sebagai Calon Wakil Bupati dari Pemohon.

21. KETUA: ASWANTO

Baik, nanti Mahkamah yang akan menilai.

22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Ya, jadi mohon untuk dipertimbangkan.

23. KETUA: ASWANTO

Baik.

24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Terkait dengan adanya conflict of interest karena istri beliau itu masih Saudara dari Bapak Iip, sebagai Pasangan Calon Wakil Bupati dari Pihak Pemohon, Yang Mulia.

25. KETUA: ASWANTO

Baik.

26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: ASWANTO

Baru saja diingatkan jangan galak-galak, Prinsipalnya juga ndak hadir, belum-belum sudah interupsi, gitu.

Baik, dengan hormat dipersilakan, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo untuk memandu jalannya pemeriksaan, silakan, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Pak Ketua Panel. Saksi Pemohon Saniah, mana orangnya? Saniah, Susilo Firdaus, Mutakin. Mana, yang Saniah? Angkat tangan. Susilo Firdaus? Mutakin?

Berdiri, Pak, berdiri semua. Ibu berdiri, Ibu. Bertiga berdiri. Kemudian, ada Rohaniwan atau juru sumpahnya yang ... oke, coba Pak agak rapat sedikit berdirinya, supaya Rohaniwan dapat tempat. Oke, Bapak di samping saja, Pak, Rohaniwannya di samping persis, di samping. Oke, ikuti saya, saya bantu lafalnya ya, Ibu, Bapak yang bersumpah.

Bismillahirrahmanirrahim ... ditirukan, enggak ada suaranya, ya? Coba dites suaranya?

29. SAKSI DARI PEMOHON:

Tes.

30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada suaranya. Ditirukan ya, saya bantu lafaz sumpahnya. Semua agama Islam, ya? Coba dijawab, Pak, dijawab.

31. SAKSI DARI PEMOHON:

Ya.

32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, jadi supaya mengetes suaranya.

"Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah saya bersumpah, sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

33. SAKSI DARI PEMOHON:

Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah saya bersumpah, sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, duduk, Bapak, Ibu sekalian. Saksi Saniah mau menjelaskan apa ya, Pak dari Kuasa Hukum?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRWANDA

Izin, Yang Mulia. Saksi Saniah akan menjelaskan terkait dengan adanya pengiriman uang, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tentang?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRWANDA

Money politics penerimaan uang, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, oke. Kalau Susilo?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRWANDA

Susilo ini yang ikut menghadiri pembagian dana RT Siaga.

40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa? Siaga?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRWANDA

Dana RT Siaga.

42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

RT?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRWANDA

Dana RT Siaga, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dana RT?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRWANDA

Ya.

46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau yang Mutakin?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRWANDA

Mutakin ini sebagai Saksi pada waktu pelaporan terkait adanya Camat Jatiwaras, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, Ibu Saniah dulu ya? Maju ke depan, ada kursi kosong itu. Ibu tahu ada pembagian uang?

49. SAKSI DARI PEMOHON: SANIAH

Tahu.

50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Ibu mau cerita apa coba? Ibu cerita, apa yang diketahui.

51. SAKSI DARI PEMOHON: SANIAH

Pagi-pagi sekitar pukul 05.00 WIB ada Pak RT, mengetuk pintu ke rumah saya.

52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebentar, suaranya kurang besar, Ibu. Itu mungkin didekatkan, ya, miknya didekatkan, Ibu. Alatnya didekatkan, ada yang bisa bantu? Di situ bisa bantu, tidak? Nah, terus suaranya agak keras, Ibu.

53. SAKSI DARI PEMOHON: SANIAH

Ya, ya.

54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, pagi-pagi?

55. SAKSI DARI PEMOHON: SANIAH

Pagi-pagi ada Pak RT mengetuk pintu ke rumah saya, lalu dibuka sama saya, lalu Bapak RT (...)

56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pukul berapa pagi-pagi itu?

57. SAKSI DARI PEMOHON: SANIAH

Pukul 05.00 WIB pagi-pagi.

58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Aduh, pukul 05.00 WIB pagi-pagi. Pak RT ... RT Ibu ini?

59. SAKSI DARI PEMOHON: SANIAH

Apa?

60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

RT-nya Ibu?

61. SAKSI DARI PEMOHON: SANIAH

Ya.

62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

RT berapa?

63. SAKSI DARI PEMOHON: SANIAH

01.

64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

RW berapa?

65. SAKSI DARI PEMOHON: SANIAH

RW 4.

66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nama Kampungnya? Kampung apa?

67. SAKSI DARI PEMOHON: SANIAH

Kampung Bojongsari, Desa Bojongsari.

68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bojongsari?

69. SAKSI DARI PEMOHON: SANIAH

Ya.

70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Desanya atau kelurahannya? Desa, ya? Desa mana?

71. SAKSI DARI PEMOHON: SANIAH

Apa?

72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Desanya desa? Atau kampung?

73. SAKSI DARI PEMOHON: SANIAH

Desa Bojongsari, Kampung Bojongsari.

74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kecamatan?

75. SAKSI DARI PEMOHON: SANIAH

Kecamatan Culamega.

76. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kecamatan apa, Bu?

77. SAKSI DARI PEMOHON: SANIAH

Culamega.

78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa yang terjadi dengan pak RT itu?

79. SAKSI DARI PEMOHON: SANIAH

Pak RT cuma ngasih uang Rp25.000,00 buat 1 orang katanya harus coblos yang nomor 2, sudah. Lalu, pak RT keluar ... lalu pak RT keluar, masuk ke rumah tetangga.

80. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa yang terjadi di rumah tetangga?

81. SAKSI DARI PEMOHON: SANIAH

Apa?

82. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa yang dilakukan di rumah tetangga?

83. SAKSI DARI PEMOHON: SANIAH

Engga tahu, saya tidak tahu.

84. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak tahu, ya. Itu terjadi tanggal berapa, ya, Bu?

85. SAKSI DARI PEMOHON: SANIAH

Tanggal 9, hari H.

86. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Hari H, apa itu?

87. SAKSI DARI PEMOHON: SANIAH

Hari H pencoblosan.

88. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh. Jadi, Rp25.000,00 per orang jadi dapat berapa, Ibu?

89. SAKSI DARI PEMOHON: SANIAH

Saya dapat 2. Di rumah saya 2, rumah tetangga 3.

90. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang tetangga katanya tidak tahu. Yang tetangga juga tahu dapat 3?

91. SAKSI DARI PEMOHON: SANIAH

Ya, dapat 3.

92. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tempat Ibu 2? Ya, yang Bu Saniah 2?

93. SAKSI DARI PEMOHON: SANIAH

Ya.

94. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

2 itu berapa jadinya?

95. SAKSI DARI PEMOHON: SANIAH

Rp50.000,00.

96. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Rp50.000,00. Yang tetangga tahu dari mana kalau dapat 3?

97. SAKSI DARI PEMOHON: SANIAH

Lalu, saya sudah sekitar pukul 08.00 WIB ke luar mau ke TPS ketemu sama 3 orang, Ibu Romiah, Ibu (ucapan tidak terdengar jelas) yang tanya sama saya, "Eh, kamu dapat uang sama pak RT tadi pagi?"

"Ya."

"Sebesar berapa?"

"Rp25.000."

98. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Waktu menyerahkan uang itu pak RT minta supaya mencoblos nomor?

99. SAKSI DARI PEMOHON: SANIAH

2.

100. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nomor 2, ya. Nomor 2 itu siapa, Ibu?

101. SAKSI DARI PEMOHON: SANIAH

Pak H. Dede.

102. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sa ... Dede dengan?

103. SAKSI DARI PEMOHON: SANIAH

Lupa, saya.

104. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Lupa. Apa Ibu juga terus nyoblos nomor 2 juga?

105. SAKSI DARI PEMOHON: SANIAH

Angka sial, Pak.

106. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Takutnya nanti disuruh diminta kembali, ya. Ya, sudahlah kalau enggak mau. Kalau Saudara sah ... Saksi yang lain, Ibu mundur. Saksi Susilo Firdaus. Susilo Firdaus, apa yang mau dijelaskan?

107. SAKSI DARI PEMOHON: SUSILO FIRDAUS

Yang saya jelaskan pada tanggal 21 September 2020, saya menghadiri rapat pembinaan RT siaga Covid-19 berdasarkan undangan dari Kantor Kecamatan Tanjung Jaya.

108. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

109. SAKSI DARI PEMOHON: SUSILO FIRDAUS

Yang bertempat di Desa Sukasenang tepatnya di Gedung aula Desa Sukasenang. Kemudian, dalam acara tersebut dihadiri juga oleh Bapak Bupati, Bapak H. Ade Sugianto berserta jajarannya.

110. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebentar, Pak. Itu Desa apa, Pak?

111. SAKSI DARI PEMOHON: SUSILO FIRDAUS

Desa Sukasenang, Pak.

112. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sukasuen ... Sukasenang. Ini yang Desa Cilolohan yang mana, Pak?

113. SAKSI DARI PEMOHON: SUSILO FIRDAUS

Cililohan, desa saya.

114. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang Sukasenang yang mana tidak di ... ada di keterangan yang akan enggak dijelaskan?

115. SAKSI DARI PEMOHON: SUSILO FIRDAUS

Kalau Desa Sukasenang itu waktu pemberian tunjangan RT Siaga yang pertama.

116. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Ada pembagian uang?

117. SAKSI DARI PEMOHON: SUSILO FIRDAUS

Ada, Pak.

118. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Berapa?

119. SAKSI DARI PEMOHON: SUSILO FIRDAUS

Rp500.000,00, Pak.

120. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Untuk?

121. SAKSI DARI PEMOHON: SUSILO FIRDAUS

Untuk RT siaga.

122. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bapak RT, ya?

123. SAKSI DARI PEMOHON: SUSILO FIRDAUS

Ya.

124. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini dikumpulkan se-kecamatan atau hanya satu desa?

125. SAKSI DARI PEMOHON: SUSILO FIRDAUS

Satu kecamatan, Pak.

126. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Satu kecamatan. Berapa RT itu?

127. SAKSI DARI PEMOHON: SUSILO FIRDAUS

7 ... kalau RT-nya persisnya kurang tahu. Kalau desa-nya 7 desa.

128. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Berapa?

129. SAKSI DARI PEMOHON: SUSILO FIRDAUS

7 desa, Pak, kalau desa.

130. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

7 desa. Ada pasangan di situ?

131. SAKSI DARI PEMOHON: SUSILO FIRDAUS

Kalau pasangan tidak ada.

132. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa itu kaitannya dengan pilkada kalau begitu?

133. SAKSI DARI PEMOHON: SUSILO FIRDAUS

Kaitannya dengan pilkada enggak ada, Pak.

134. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Enggak ada. Program itu sampai sekarang masih jalan?

135. SAKSI DARI PEMOHON: SUSILO FIRDAUS

Masih berjalan.

136. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Memang dana Rp500.000 itu baru dapat sekali itu atau memang sebelumnya juga pernah dapat?

137. SAKSI DARI PEMOHON: SUSILO FIRDAUS

Tiga kali, Pak.

138. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tiga kali. Kapan saja?

139. SAKSI DARI PEMOHON: SUSILO FIRDAUS

Waktu tanggal 19 Oktober sama juga jadi saya dapat empat.

140. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tahun 2020?

141. SAKSI DARI PEMOHON: SUSILO FIRDAUS

2020, Pak.

142. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terus kapan lagi?

143. SAKSI DARI PEMOHON: SUSILO FIRDAUS

Kemudian tanggal 26 November, bertepatan ... bertempatnya di Gedung Dakwah Desa Cilolohan, desa saya, Pak.

144. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang Cilolohan itu, ya? Ini yang membagi uang siapa, Pak?

145. SAKSI DARI PEMOHON: SUSILO FIRDAUS

Yang membagi uang itu adalah dari ... dari pihak desa. Desa (suara tidak terdengar jelas) dari camat.

146. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dari camat?

147. SAKSI DARI PEMOHON: SUSILO FIRDAUS

Ya, Yang Mulia.

148. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Desa apa camat?

149. SAKSI DARI PEMOHON: SUSILO FIRDAUS

Yang membagikannya dari aparat desa.

150. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Uangnya dari?

151. SAKSI DARI PEMOHON: SUSILO FIRDAUS

Uangnya dari bapak camat.

152. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak camat itu uang dari mana? Tahu?

153. SAKSI DARI PEMOHON: SUSILO FIRDAUS

Kalau ... kalau itu enggak tahu, Pak, uangnya dari mana.

154. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Hem, Bapak enggak tanya ini dari memang dianggarkan oleh pemerintah atau memang dari pribadi-pribadi? Ada tidak? Ha?

155. SAKSI DARI PEMOHON: SUSILO FIRDAUS

Enggak tahu, Pak.

156. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Enggak tahu. Dalam 3 pertemuan itu memang ada pesan-pesan apa?

157. SAKSI DARI PEMOHON: SUSILO FIRDAUS

Dalam 3 pertemuan itu di akhir yang dilaksanakan waktu pembinaan RT siaga pukul 19.00 WIB di desa saya, pada saat itu setelah dalam rangka bicara ... menyampaikan kepada para RT, "Tolong bantu pak camat untuk mendukung Pak H. Ade Sugianto."

158. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ade Sugianto? (...)

159. SAKSI DARI PEMOHON: SUSILO FIRDAUS

Kemudian.

160. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ade Sugianto?

161. SAKSI DARI PEMOHON: SUSILO FIRDAUS

Benar, Ade Sugianto.

162. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Siapa yang ngomong seperti itu, Pak, yang bicara seperti itu?

163. SAKSI DARI PEMOHON: SUSILO FIRDAUS

Pak Sekdes, Pak.

164. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tolong bantu, itu untuk umum atau hanya dengan Bapak, berbisik dengan Bapak?

165. SAKSI DARI PEMOHON: SUSILO FIRDAUS

Untuk umum, kemudian setelah bubar rapat tersebut saya dipanggil secara pribadi oleh Pak Sekdes terkait pemilu.

166. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ade Sugianto ini pasangan nomor berapa?

167. SAKSI DARI PEMOHON: SUSILO FIRDAUS

Nomor 2, Pak.

168. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nomor 2, oke. Waktu dipa ... dipanggil pak sekdes ... dipanggil yang khusus itu apa yang dikatakan?

169. SAKSI DARI PEMOHON: SUSILO FIRDAUS

Ya, seperti tadi cuma dia apa namanya ... menekankan lebih pribadi tolong bantu pak camat untuk mendukung Pak H. Ade Sugianto, seperti itu, Pak.

170. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Gitu, ya. Waktu kumpul-kumpul itu ada pak camat juga padahal, ya?

171. SAKSI DARI PEMOHON: SUSILO FIRDAUS

Ada pak camat juga.

172. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi pak camat tidak memberikan pesan apa-apa?

173. SAKSI DARI PEMOHON: SUSILO FIRDAUS

Kalau memberikan secara langsung tidak, cuma pak sekdes pada saat itu (...)

174. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, sudah itu enggak usah diulang.

175. SAKSI DARI PEMOHON: SUSILO FIRDAUS

Ya, berbicara pada pak camat.

176. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa lagi yang mau disampaikan, Pak?

177. SAKSI DARI PEMOHON: SUSILO FIRDAUS

Kayaknya sudah Pak, seperti itu.

178. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih. Saksi berikutnya! Mutakin?

179. SAKSI DARI PEMOHON: MUTAKIN

Ya, Pak?

180. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mutakin apa Pak yang mau dijelaskan?

181. SAKSI DARI PEMOHON: MUTAKIN

Saya menjelaskan pagi-pagi saya masih tidur itu, ada yang menelepon namanya Asep.

182. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tanggal berapa, Pak?

183. SAKSI DARI PEMOHON: MUTAKIN

Saya lupa tanggalnya, Pak.

184. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dengan pemilihan, sebelum atau sesudahnya?

185. SAKSI DARI PEMOHON: MUTAKIN

Saya disuruh ke Balai Desa Setiawangsi.

186. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan, ini kapan ditelepon. Bapak ditelepon sama Asep itu kapan?

187. SAKSI DARI PEMOHON: MUTAKIN

Sebelum pemilihan pilkada.

188. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Berapa lama sebelum pemilihan?

189. SAKSI DARI PEMOHON: MUTAKIN

Kurang tahu kalau itu.

190. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Enggak bisa memperkirakan? Satu minggu, dua minggu atau sebulan, dua bulan?

191. SAKSI DARI PEMOHON: MUTAKIN

Enggak bisa, Pak.

192. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, ditelepon maksudnya apa itu?

193. SAKSI DARI PEMOHON: MUTAKIN

Saya disuruh ke Desa Setiawangi.

194. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Disuruh?

195. SAKSI DARI PEMOHON: MUTAKIN

Ke Desa Setiawangi.

196. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ke Desa Setiawangi? Bapak .. Bapak ini sebagai apa?

197. SAKSI DARI PEMOHON: MUTAKIN

Saya masyarakat biasa, Pak.

198. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Masyarakat biasa. Enggak artinya si Asep menelepon itu dalam konteks apa? Kok Bapak ditelepon itu?

199. SAKSI DARI PEMOHON: MUTAKIN

Si Asep itu pegawai desa.

200. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pegawai desa. Desa Setiawangi ini?

201. SAKSI DARI PEMOHON: MUTAKIN

Ya, Setiawangi.

202. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, terus Bapak datang?

203. SAKSI DARI PEMOHON: MUTAKIN

Sekitar 08.30 WIB saya jalan mau menuju ke Desa Setiawangi. Sesampainya di Leuwijiem[sic!] itu ada 2 teman saya. Namanya (...)

204. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Siapa itu? Siapa?

205. SAKSI DARI PEMOHON: MUTAKIN

Akil sama Usman.

206. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Akil?

207. SAKSI DARI PEMOHON: MUTAKIN

Ya.

208. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dan Usman?

209. SAKSI DARI PEMOHON: MUTAKIN

Dan Usman.

210. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mau ke tempat Pak Asep juga?

211. SAKSI DARI PEMOHON: MUTAKIN

Enggak, tanya saya dulu ... namanya Leuwijiem[sic!].

212. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

213. SAKSI DARI PEMOHON: MUTAKIN

Nanyanya begini.

"Pak Mutakin, mau ke desa?"

"Ada apa?"

"Ya, enggak tahu."

"Jadi kamu mau ke mana?"

"Mau ke desa."

Pas di situ temen saya buka WA, Akil namanya. Ada juga para ketua-ketua suruh hadir ke balai desa mau pembentukkan ketua kades.

214. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Para ketua-ketua itu ketua apa, Pak?

215. SAKSI DARI PEMOHON: MUTAKIN

Ketua-ketua, tokoh-tokoh masyarakat.

216. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh tokoh-tokoh masyarakat, disuruh datang juga mau ada pembentukan?

217. SAKSI DARI PEMOHON: MUTAKIN

Ketua pilkades.

218. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ketua pilkades? Ya Pak?

219. SAKSI DARI PEMOHON: MUTAKIN

Ya.

220. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Bapak terus setelah datang itu memang banyak orang kumpul?

221. SAKSI DARI PEMOHON: MUTAKIN

Ya banyak di desa.

222. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Apa yang terjadi di sana?

223. SAKSI DARI PEMOHON: MUTAKIN

Yang bertiga saya jalan, ke balai desa masuk. Nah, acara itu sudah dimulai, PPD, Kepala Desa lalu Camat namanya Nol. Kata Pak Camat itu kalau dukung tim 02 untuk kenang-kenangan.

224. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tolong dukung nomor 2 gitu?

225. SAKSI DARI PEMOHON: MUTAKIN

Ya, untuk kenang-kenangan[Sic!].

226. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nomor 2 itu siapa, Pak?

227. SAKSI DARI PEMOHON: MUTAKIN

Pak Ade.

228. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ade dengan siapa?

229. SAKSI DARI PEMOHON: MUTAKIN

Kurang tahu yang 1 lagi, Pak.

230. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Itu jadi ada pembentukan Ketua Pilkades itu enggak?

231. SAKSI DARI PEMOHON: MUTAKIN

Ya.

232. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi. Bapak ditunjuk sebagai apa?

233. SAKSI DARI PEMOHON: MUTAKIN

Masyarakat biasa.

234. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan itu, waktu disuruh datang itu apanya disuruh mendukung 02 atau juga dijadikan itu diberi apa tugas atau jabatan dalam kepanitiaan?

235. SAKSI DARI PEMOHON: MUTAKIN

Oh tidak.

236. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak. Ada pembagian uang enggak?

237. SAKSI DARI PEMOHON: MUTAKIN

Tidak.

238. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ada pembagian uang?

239. SAKSI DARI PEMOHON: MUTAKIN

Ya.

240. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Pemohon, silakan didalami 1, 2 pertanyaan untuk masing-masing Saksi.

241. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRWANDA

Saya ke Pak Mutakin, Pak.

242. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini Kuasa Hukum mau bertanya, Pak, dijawab, ya, Pak.

243. SAKSI DARI PEMOHON: MUTAKIN

Ya.

244. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRWANDA

Pak Mutakin setelah pertemuan itu, apa yang dilakukan oleh Bapak setelah ada penyampaian dari camat untuk mengatakan, "Tolong mendukung nomor 2?"

245. SAKSI DARI PEMOHON: MUTAKIN

Tidak melakukan apa-apa saya cuman mendengar dan melihat, saya ada di Gor Setiawangi.

246. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRWANDA

Kemudian, ada laporan ke Bawaslu? Bisa Saudara Saksi Pak Mutakin ceritakan?

247. SAKSI DARI PEMOHON: MUTAKIN

Kejadian itu Saudara Agil[Sic!], teman saya itu melapor ke Bawaslu (...)

248. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRWANDA

Apa (...)

249. SAKSI DARI PEMOHON: MUTAKIN

Agil, teman saya, "Agil, saya kejadian (ucapan tidak terdengar jelas) camat itu dilaporkan oleh saya, cuman saya butuh saksi 2," kata si Agil itu, telepon sama saya.

250. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Saudara Saksi dipanggil oleh Bawaslu untuk menjadi saksi?

251. SAKSI DARI PEMOHON: MUTAKIN

Ya.

252. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRWANDA

Selain di Bawaslu pernah juga Saudara Saksi dipanggil untuk menjadi Saksi? Selain di Bawaslu, di kepolisian, atau di pengadilan?

253. SAKSI DARI PEMOHON: MUTAKIN

Oh, ya di kapolres, saya dipanggil, di pengadilan saya juga di pengadilan (ucapan tidak terdengar jelas).

254. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Cukup?

255. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRWANDA

Sementara cukup, Yang Mulia, untuk Saksi.

256. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saksi lain enggak ada?

257. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRWANDA

Enggak, cukup.

258. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Dari Kuasa Termohon, ada pertanyaan?

259. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Ada, Yang Mulia. Untuk Saksi pertama kalau tidak salah saya dengar tadi dari Desa Bojongsari, Kecamatan Culanega. Betul, Saksi? (...)

260. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bu Saniah maju, Bu Saniah. Enggak ini miknya enggak portable soalnya jadi ... harus, oke. Silakan, Pak.

261. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Baik. Saudara Saksi tadi disebutkan Saksi dari Desa Bojongsari, Kecamatan Culamega ya? Betul, ya?

262. SAKSI DARI PEMOHON: SANIAH

Ya.

263. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Ibu sudah baca, Saksi, sudah baca permohonannya Pemohon?

264. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Enggak, terlalu tinggi pertanyaan Bapak itu.

265. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Ya, maksudnya begini, Yang Mulia.

266. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Ya, tanyakan saja substansinya, Pak.

267. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Ya, baik. Apakah kasus yang Ibu alami pernah dimasukkan di dalam permohonan Pemohon? Atau dilaporkan ke Bawaslu atau Panwas?

268. SAKSI DARI PEMOHON: SANIAH

Tidak.

269. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Tidak, ya? Yang Mulia ini tidak ada, lokusnya di permohonan Pemohon. Yang di Kecamatan Culamega itu di Desa Cinta Bodas tidak ada dalam permohonan Pemohon (...)

270. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ada, yang didalilkan tidak ada (...)

271. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Baik. Itu saja.

272. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

273. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Yang kedua ke Saksi kedua, Susilo.

274. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Susilo, Pak, pindah depan, Pak Susilo. Ini miknya enggak ada yang ... oke.

275. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Untuk Saksi Susilo tadi disebutkan Bapak kasusnya di Desa Cilolohan atau Desa Sukasenang, ya? Betul Kecamatan Tanjungjaya? Betul, ya? Apakah Saksi pernah melaporkan kasus ini ke tim sukses dan masuk dalam permohonan atau melaporkan juga ke panwascam atau Bawaslu?

276. SAKSI DARI PEMOHON: SUSILO FIRDAUS

Tidak, Pak.

277. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Tidak. Baik, Yang Mulia. Untuk Desa Cilolohan, Sukasenang tidak ada dalam permohonan, untuk di Kecamatan Tanjungjaya hanya ada di permohonan untuk Desa Tanjungjaya. Terima kasih, Yang Mulia.

278. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kuasa Hukum Pihak Terkait, ada pertanyaan?

279. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Saksi Susilo karena sudah di depan. Saudara Saksi Susilo tadi Saudara Saksi menyatakan bahwa apa yang saudara alami itu tidak ada kaitannya dengan pilkada. Saya minta penegasan saja, apakah betul?

280. SAKSI DARI PEMOHON: SUSILO FIRDAUS

Betul, Pak.

281. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Betul, ya. Jadi Saudara menyatakan apa yang Saudara alami itu tidak ada kaitannya dengan pilkada. Betul, ya?

282. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang mana, Pak? Yang mana itu?

283. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Waktu pembagian RT siaga di Desa Sukasenang.

284. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Dia tadi tidak ... belum firm dengan pertanyaan saya, tapi ketika kemudian ada penyampaian dari sekdes, Pak Camat minta tolong didukung untuk Pasangan Nomor 2. Itu, Pak.

285. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Baik. Pak Susilo, apakah yang Bapak alami ya seperti yang tadi disampaikan itu, apakah Bapak laporkan ke ke Bawaslu atau panwascam atau ke mana gitu, Pak?

286. SAKSI DARI PEMOHON: SUSILO FIRDAUS

Tidak, Pak.

287. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Tidak. Bapak tidak membuat laporan ke instansi manapun, Pak? Tidak? Oke. Cukup, Yang Mulia. Mungkin saksi yang berikutnya yang (...)

288. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Siapa?

289. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Mutakin itu, Yang Mulia.

290. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mutakin silakan maju, Pak Susilo ke belakang.

291. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Saudara Saksi Mutakin?

292. SAKSI DARI PEMOHON: MUTAKIN

Ya.

293. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Apakah camat yang Saudara maksud itu adalah Camat Jatiwaras?

294. SAKSI DARI PEMOHON: MUTAKIN

Ya.

295. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Betul, ya.

296. SAKSI DARI PEMOHON: MUTAKIN

Betul.

297. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Setahu Saudara, apakah kejadian yang melibatkan Camat Jatiwaras itu sudah diproses di pengadilan, Saudara tahu?

298. SAKSI DARI PEMOHON: MUTAKIN

Sudah.

299. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Sudah. Saudara tahu apa putusannya?

300. SAKSI DARI PEMOHON: MUTAKIN

Ya, Pak?

301. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Saudara tahu ya sudah diproses di pengadilan dan apakah sudah diputus oleh pengadilan?

302. SAKSI DARI PEMOHON: MUTAKIN

Ya.

303. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Sudah diputus oleh pengadilan?

304. SAKSI DARI PEMOHON: MUTAKIN

(Suara tidak terdengar jelas) Tasikmalaya.

305. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Ya Saksi, tidak terdengar, Saksi.

306. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bapak tahu tidak putusannya apa? Tahu tidak putusannya, Pak?

307. SAKSI DARI PEMOHON: MUTAKIN

Tidak tahu, Pak.

308. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak tahu.

309. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Tidak tahu, ya. Tapi Saksi tahu sudah diproses di pengadilan ya, Saudara Saksi ya.

310. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tahu. Tadi kan sudah ditanyakan.

311. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Baik. Mungkin ada sedikit tambahan dari rekan saya, Yang Mulia.

312. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RIDWAN SALEH

Tambahan, Yang Mulia.

313. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Untuk yang mana?

314. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RIDWAN SALEH

Untuk Pak Susilo.

315. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, tadi kalau (...)

316. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RIDWAN SALEH

Mohon izin (...)

317. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak sekaligus tidak wira-wiri ini.

318. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RIDWAN SALEH

Mohon maaf, Yang Mulia.

319. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Susilo maju lagi, Pak. Pak Mutakin ke belakang. Silakan.

320. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RIDWAN SALEH

Baik. Pak Susilo, yang saya tanyakan, apakah Pak Susilo tahu bahwa RT Siaga itu ada di setiap desa?

321. SAKSI DARI PEMOHON: SUSILO FIRDAUS

Tahu, Pak.

322. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RIDWAN SALEH

Ya. Dan kepengurusannya apa tahu, Saksi? Apa saja pengurusnya?

323. SAKSI DARI PEMOHON: SUSILO FIRDAUS

Kepengurusan RT Siaga?

324. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RIDWAN SALEH

Ya.

325. SAKSI DARI PEMOHON: SUSILO FIRDAUS

Kalau kepengurusan tahu, Pak.

326. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RIDWAN SALEH

Tahu, ya. Ada ketuanya, ketua RT, terus pemilihannya ada tokoh masyarakat, segala macam tahu ya? Baik. Apakah Pak Susilo tahu bahwa itu memang program dari pemerintah?

327. SAKSI DARI PEMOHON: SUSILO FIRDAUS

Ya, tahu.

328. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RIDWAN SALEH

Oke. Cukup, Yang Mulia.

329. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Para Saksi duduk dulu ke belakang, Pak. Pak Susilo bertiga menunggu di situ, nanti ... nanti mungkin ada pertanyaan dari Hakim, tapi Majelis Hakim mau periksa ahli dulu. Prof. Topo sudah siap?

330. AHLI DARI PEMOHON: TOPO SANTOSO

Sudah, Yang Mulia.

331. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kecil sekali suaranya, Prof. Dibesarkan bisa?

332. AHLI DARI PEMOHON: TOPO SANTOSO

Baik. Sudah, Yang Mulia.

333. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, sudah.

334. AHLI DARI PEMOHON: TOPO SANTOSO

Ya.

335. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada Rohaniwan?

336. AHLI DARI PEMOHON: TOPO SANTOSO

Ada, siap.

337. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Berkenan berdiri biar dibantu untuk mengucapkan sumpah. Mana rohaniwannya? Mundur sedikit mungkin supaya ... oke, tirukan saya, Prof. Saya bantu lafalnya. Bapak yang bersumpah.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

338. AHLI DARI PEMOHON: TOPO SANTOSO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

339. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Prof, waktunya 10 menit maksimal, mungkin nanti ada tambahan-tambahan untuk pertanyaan-pertanyaan. Dipersilahkan.

340. AHLI DARI PEMOHON: TOPO SANTOSO

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya untuk membacakan pendapat keahlian saya. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Yang kami hormati, Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. Izinkan saya untuk menyampaikan pokok-pokok dari pendapat hukum saya mengenai Perkara Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021.

Pertama, secara umum penyelesaian perselisihan hasil pemilihan menurut pendapat saya merupakan puncak dari upaya mencari keadilan pemilu atau *election justice* atau *electoral justice*. Sebetulnya, ada 2 bagian atau 2 kelompok besar yang banyak disebut dalam berbagai kepustakaan tentang pemilu, yaitu yang pertama adalah integritas dalam proses dan yang kedua adalah intergritas di dalam hasil. Sebetulnya, kedua macam integritas tersebut tidak bisa dipisahkan secara tegas sehingga pelanggaran atau penyimpangan atau kecurangan yang bisa mengganggu integritas proses, pada hakikatnya juga bisa mempengaruhi integritas hasil. Dengan demikian, menurut hemat ahli, Mahkamah Konstitusi merupakan muara dari para pihak yang merasa dirugikan selama proses pemilu maupun hasil pemilu yang ditetapkan oleh KPU untuk mencari keadilan.

Dalam Perkara Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 ini, ada beberapa persoalan hukum yang perlu Ahli kemukakan, yang pertama terkait dengan rekomendasi Bawaslu dan tindak lanjut KPU. Secara umum, di dalam Undang-Undang Pemilihan, yang saya maksud adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Di dalam ketentuannya, pelanggaran-pelanggaran instansi yang terjadi itu dilakukan kajian oleh Bawaslu kemudian diberikan rekomendasi kepada KPU yang wajib menindaklanjuti semua rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu. Kemudian pada beberapa jenis kasus yang lain, ada dengan prosedur yang berbeda, yaitu Bawaslu melakukan proses semacam persidangan dan kemudian memberikan putusan, dan itu wajib dijalankan oleh KPU.

Di dalam konteks ini, seharusnya memang mesti ada suatu hukum acara yang jelas dan tegas serta valid yang harus dilakukan, yang harus diikuti oleh Bawaslu di dalam tugas dan kewenangannya memproses pelanggaran administrasi dan juga ada hukum acara yang harus dilaksanakan oleh KPU, dan hukum acara tersebut haruslah valid sesuai merujuk pada undang-undang yang berlaku.

Berkaitan dengan rekomendasi Bawaslu dan tim dari KPU, maka bisa diperiksa apakah ketentuan yang ada di dalam perundang-undangan

pemilihan sudah dijalankan oleh Bawaslu. Jika sudah, maka sudah semestinya KPU melaksanakan rekomendasi tersebut dan kemudian sebagai suatu sistem kesatuan, suatu kesatuan sistem dalam penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilihan, maka sebaiknya tidak ada perbedaan di dalam penanganan pelanggaran tersebut. Tetapi, jika ada perbedaan, maka muaranya adalah di Mahkamah Konstitusi. Jadi, apabila terjadi perbedaan antara Bawaslu dan KPU, yang mana perbedaan keputusan tersebut ternyata membawa implikasi pada kemungkinan berpengaruh terhadap hasil pemilihan, maka sudah seyogianya hal ini menjadi bagian dari yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perselisihan hasil pemilihan.

Yang kedua, berkaitan dengan landasan penyelesaian pelanggaran administrasi khususnya Pasal 71 Undang-Undang Pemilihan. Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, ada 2 pasal yang ingin Ahli sebutkan di sini untuk membandingkan. Pertama, Pasal 71 dan Pasal 73 Undang-Undang Pemilihan. Dalam Pasal 73, berkaitan dengan dilakukannya money politics secara TSM (terstruktur, sistematis, dan masif), di sini ada ketentuan dalam Undang-Undang Pemilihan untuk membuat prosedurnya, dan itu sudah dilaksanakan oleh Bawaslu dengan Peraturan Bawaslu mengenai penyelesaian money politics secara TSM dan kemudian sudah ada beberapa kasus yang diputuskan oleh Bawaslu dan kemudian dijalankan oleh KPU.

Kemudian yang kedua adalah Pasal 71 Undang-Undang Pemilihan terkait dengan 2 hal intinya, pertama adalah seorang pejabat yang melakukan pengangkatan dalam suatu periode waktu yang dilarang dilakukan. Yang kedua adalah menggunakan kewenangan program dan kegiatan juga dalam periode waktu yang dilarang untuk dilakukan.

Dalam konteks ini, yang seharusnya dilakukan adalah harus ada hukum acara atau prosedur yang jelas dan valid untuk melaksanakan ini. Sebabnya apa? Sebabnya karena implikasi dari pelanggaran Pasal 71 dan Pasal 73 juga adalah sangat berat yaitu sampai diskualifikasinya seorang *incumbent* atau seorang petahana sehingga harus ada hukum acara yang tegas dan jelas, serta valid. Di sini Ahli ingin mengkritisi hukum acara yang digunakan di dalam pemeriksaan itu yang ternyata oleh KPU masih diacu PKPU Nomor 25 Tahun 2013 yang digunakan sebagai dasar hukum bagi KPU, khususnya KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk memeriksa dan memutus kembali rekomendasi Bawaslu. Menurut hemat Ahli peraturan ini seharusnya tidak bisa lagi digunakan, sudah off soled[sic!] sudah usang dan tidak relevan serta tidak nyambung lagi. Dari nama PKPU-nya saja sudah ti ... tidak relevan dengan penyelesaian pelanggaran administrasi. PKPU Nomor 25 Tahun 2013 ini adalah tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum. Jadi PKPU hanya bisa digunakan untuk penyelesaian pelanggaran pemilihan umum bukan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan walikota, wakil walikota. Lebih jauh landasan hukum dari lahirnya

PKPU 25 Tahun 2013 ini adalah undang-undang yang sudah tidak berlaku, yaitu Undang-Undang 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 serta Undang-Undang 8 Tahun 2012 yang semuanya sudah tidak berlaku lagi sudah ada Undang-Undang Pemilu yang baru, sudah ada Undang-Undang Pemilihan yang baru.

Kemudian yang berikutnya adalah MK sebagai gerbang akhir mencari keadilan pemilihan. Di sini ada 3 pertanyaan yang penting menurut hemat Ahli. Pertama, apabila sebelum diajukannya PHP oleh pemohon dan perkara ini ke MK, KPU telah memeriksa dan menjalankan putusan yang berbeda dari rekomendasi Bawaslu. Bagaimana seharusnya MK menyikapi persoalan ini? Yang kedua, apakah bisa pelanggaran TSM yang telah dilaporkan pada Bawaslu namun tidak dilanjutkan, dibahas kembali di MK dengan bukti-bukti serta saksi-saksi yang menguatkan. Dan yang ketiga, apakah putusan pengadilan terhadap pelanggaran pidana Pasal 188 Undang-Undang Pemilu atau pasal lainnya dapat dijadikan tolak ukur terjadinya kecurangan yang TSM yang melibatkan ASN?

Menurut hemat Ahli secara umum. Bahwa perselisihan hasil pemilu itu seharusnya seperti juga elections contest di berbagai negara dasarnya adalah untuk mengadili adanya 1 perselisihan hasil pemilu yang bisa disebabkan oleh berbagai sebab bukan hanya perbedaan atau seleksi dalam rekapitulasi suara di berbagai negara dan juga pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi grown of elections partition adalah termasuk juga adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan secara meluas kemudian bahkan juga tidak terpenuhinya syarat seorang kandidat dan lain sebagainya termasuk juga berbagai tindak pidana pemilu dan adanya kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara.

Jadi menurut hemat Ahli, MK dapat saja memeriksa persoalan-persoalan yang belum diperiksa di tingkat Bawaslu atau KPU sepanjang memang ada bukti-bukti yang menguatkannya di persidangan PHP.

Kemudian yang berikutnya (...)

341. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tinggal 2 menit, Prof.

342. AHLI DARI PEMOHON: TOPO SANTOSO

Siap, Majelis Hakim Yang Mulia. Izinkan saya menyampaikan 1 pokok bahasan yang terakhir yaitu mengenai pelanggaran Pasal 71 ayat (3) undang-undang pemilihan itu apakah delik materiil atau delik formil. Persoalan ini banyak dibahas dan dibicarakan, menurut hemat Ahli pasal 71 ini seperti juga pasal 73 merupakan kuasi tindak pidana bahkan

sebetulnya ada 3 persoalan bukan hanya tindak pidana. Jadi ada tindak pidananya yang harus diselesaikan dengan prosedur hukum acara pidana, kemudian yang kedua adalah pelanggaran administrasi yang harus diselesaikan dengan penyelesaian pelanggaran administrasi dan yang ketiga, sebetulnya digunakan sebagai landasan di dalam gugatan hasil pemilih. Sehingga sebetulnya bukan double crack model tapi sudah triple model.

343. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Triple track

344. AHLI DARI PEMOHON: TOPO SANTOSO

Ya. Jadi terkait dengan delik materil atau delik formil ini menurut hemat Ahli ini sebetulnya kalau dikaitkan dengan pelanggaran administrasi, sebetulnya tidak tidak masuk ke sana, jadi ini delik materil atau formil ini bicara tentang tindak pidana. Tetapi baiklah ada pertanyaan begini, apakah pelanggaran ini selesai dengan dilakukannya seorang pejabat itu mengeluarkan kebijakannya atau melakukan kewenangannya atau program kebijakannya, sudah selesai, ya, sepanjang itu dima ... bisa dimaknai menguntungkan atau merugikan ataukah, pendapat yang kedua, harus ada akibat dari dikeluarkannya kewenangan program dan kegiatan itu. Jadi semacam delik materil kalau dalam pidana.

Menurut hemat Ahli ini sebetulnya pelanggaran ini sudah selesai dengan seorang pejabat mengeluarkan kebijakannya, kewenangannya programnya atau kegiatannya. Saya ingin mengilustrasikan dengan suatu pertandingan, misalnya, ada seorang ... suatu penyelenggara dan suatu pertandingan dan kemudian dia menyedi ... menyediakan lapangan yang berbeda antara yang pas ... sebelah kiri dan sebelah kanan, kemudian lampu penerbang yang berbeda, kemudian juga ada berbagai variabel di dalam pertandingan yang berbeda antara 2 kelompok atau 2 pasangan atau 2 tim. Dengan perlakuan ini, sebetulnya sudah terjadi tindakan yang menguntungkan atau merugikan tanpa harus menunggu hasil akhir dari pertandingan itu, apakah akhirnya menang atau kalah akhir atau kalah akhirnya berakibat dari perlakuan yang tidak sama tadi dengan hasil ini.

Jadi menurut hemat Ahli ini adalah merupakan suatu ... kalau dalam pidana, merupakan delik formil. Demikian Majelis Hakim Yang (...)

345. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik.

346. AHLI DARI PEMOHON: TOPO SANTOSO

Mulia, penyampaian pendapat Ahli saya. Terima kasih.

347. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih. Dari Pemohon 1, 2 pertanyaan silakan kalau ada!

348. KUASA HUKUM PEMOHON: TONNY IRAWAN

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Izin Ahli ingin menanyakan terkait kedaluwarsa laporan pelanggaran pemilihan itu dasarnya kan kalau kita lihat di daluwarsa (...)

349. SAKSI DARI PEMOHON: MUTAKIN

Hakim, saya mau izin dulu.

350. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Siapa ini? Siapa ini?

351. SAKSI DARI PEMOHON: MUTAKIN

Pak Mutakin.

352. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mutakin, mau apa, Pak?

353. SAKSI DARI PEMOHON: MUTAKIN

Izin, saya mau ke WC dulu.

354. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, silakan! Silakan, Pak!

355. SAKSI DARI PEMOHON: MUTAKIN

Terima kasih, Pak Hakim.

356. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, ya. Nanti kembali, ya. Itu memang ndak bisa diwakilkan, jadi (...)

357. KUASA HUKUM PEMOHON: TONNY IRAWAN

Bisa dilanjut, Yang Mulia?

358. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

(...) pada pertanyaan, kedaluwarsa berkaitan dengan apa, Pak? Laporan (...)

359. KUASA HUKUM PEMOHON: TONNY IRAWAN

Ya, daluwarsa tentang laporan pemilihan, itu seperti apa?

360. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, ya. Langsung, jawab, Prof!

361. AHLI DARI PEMOHON: TOPO SANTOSO

Baik, terima kasih.

Jadi, daluwarsa dalam konteks pemilihan itu memang berbeda dengan daluwarsa dalam tindak pidana. Daluwarsa pelanggaran itu 7 hari sejak diketahui atau sejak ditemukan. Jadi, perumusan 7 hari sejak diketahui atau ditemukan itu memang disengaja oleh pembuat undang-undang. Jadi bukan sejak dilakukannya atau sejak terjadinya peristiwa. Kenapa? Karena ini untuk menghindari batas waktu yang teramat singkat atau daluwarsa yang teramat singkat. Padahal mungkin baru diketahui setelah jauh hari sesudah perbuatan dakwaan tetapi memang baru diketahui oleh seseorang. Demikian, Majelis Hakim.

362. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, ada lagi? Cukup?

363. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRWANDA

Tambahan, Yang Mulia.

364. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, silakan! Satu lagi pertanyaan.

365. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRWANDA

Ya, satu, satu saja, Prof. Saya ingin meminta pendapat Ahli terkait dengan mungkin penegasan Pasal 71 itu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 disampaikan tadi bahwa 6 ... bupati, gubernur, wakil gubernur, bupati, walikota, wakil walikota, itu dalam waktu 6 bulan dilarang menggunakan kewenangannya, dalam ... sebelum tanggal penetapan pasangan sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Nah, dalam maksud dari frasa itu, menurut Ahli, dikaitkan dengan program-program pemerintah, itu menurut pandangan Ahli seperti apa? Apakah ada pengecualian atau seperti apa terkait dengan kewenangan-kewenangan kepala daerah itu? Terima kasih.

366. AHLI DARI PEMOHON: TOPO SANTOSO

Izin, Majelis Hakim Konstitusi, menjawab.

367. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan!

368. AHLI DARI PEMOHON: TOPO SANTOSO

Ya, jadi sebetulnya inti dari Pasal 71 itu adalah dilarang dilakukannya *political corruption* atau korupsi politik. Dimana seorang incumbent atau seorang petahana itu memang memiliki kelebihan-kelebihan dibanding lawannya karena dia sedang menjabat, secara popularitas, kemudian dia bisa melakukan kewenangan atas ... karena jabatannya dan sebagainya. Sehingga pembuat undang-undang menentukan pasal ini jauh-jauh hari sebelumnya, sebelum pelaksanaan pemilihan, yaitu 6 bulan sebelum penetapan calon dilarang melakukan menggunakan kewenangannya kemudian menggunakan program kegiatannya yang sebetulnya bisa saja didomplengi oleh seorang petahana karena itu dilarang.

Nah, mendomplengi program kegiatan dan juga kewenangan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Oleh karena itu, bisa saja mungkin dengan anggaran dari pemerintah, dengan menggunakan suatu yang sudah tertulis di dalam program-program pemerintah, tapi di dalam pelaksanaannya didomplengi atau dia memerintahkan stafnya atau bawahannya untuk juga me ... agar dirinya dipilih di dalam pemilihan

nanti. Jadi, banyak sekali dilakukan cara-cara seperti itu dalam konsteks *political corruption*. Demikian, Majelis Hakim.

369. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, dari Kuasa Termohon ada pertanyaan?

370. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Ada, Yang Mulia. Terima kasih, Saudara Ahli. Prof. Topo, apa kabar, Prof? Sehat-sehat, ya?

371. AHLI DARI PEMOHON: TOPO SANTOSO

Alhamdulillah.

372. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Terima kasih.

Prof, ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan, menarik yang disampaikan ... apa ... Ahli tadi, dalam kaitannya dengan pelaksanaan penerapan Pasal 71 ayat 3 dan implementasinya. Namun, seringkali kemudian KPU sebagai pihak yang tanda kutip seakan-akan dikorbankan. Kenapa? Karena kaitannya, saya melihat satu, ada persoalan pada norma Pasal 71 ayat 3, berkaitan dengan menggunakan kewenangan program dan kegiatan. Hal yang seperti apa ini? Karena dalam pemeriksaannya, ada perbedaan pandangan antara ahli yang disampaikan oleh ... apa ... ahli yang diperiksa oleh Bawaslu dan ahli yang diperiksa oleh KPU.

Yang kedua, berkaitan menguntungkan. Sejauh mana pengertian menguntungkan ini? Sehingga tafsir ahli itu bisa berbeda. Ahli Bawaslu misalnya, berpendapat itu delik formil. Ahli KPU berpendapat itu delik materil. Akhirnya pemeriksaan saksinya pun berbeda. Sementara, dalam penerapannya di Bawaslu, ada perbedaan mekanisme pemeriksaan, pelanggaran Pasal 71 ayat (3) dengan Pasal 73 ayat (1). Kalau Pasal 73 ayat (1) itu jelas ada Majelis memeriksa. Ada proses pemeriksaan yang cukup lama, memanggil para pihak sampai produknya putusan. Karena produknya putusan, yang berdasarkan hasil pemeriksaan, maka KPU wajib melaksanakan. Bukan menindaklanjuti. Sementara, berkaitan dengan pelanggaran Pasal 71 ayat (3), atau ayat (2), mekanismenya berdasarkan Perpu Bawaslu Nomor 8. Yang di sana tidak ada Majelis memeriksa, akan tetapi hanya tim kajian. Hanya berupa kajian. Dengan waktu yang lebih singkat. Sehingga pemeriksaannya pun menjadi terbatas. Akibatnya, terdapat perbedaan fakta, terdapat perbedaan pendapat yang melahirkan kesimpulan yang berbeda.

373. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pertanyaannya apa, Pak?

374. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Dalam kaitan itu, bagaimana Ahli menyikapi ketika fakta yang didapat KPU dan fakta yang didapat Bawaslu berbeda, begitu, ya.

Yang kedua, itu kan harus dipertanggungjawabkan oleh KPU kalau misalnya, diskualifikasi. Ketika diskualifikasi yang mempertanggungjawabkannya kan KPU di hadapan hukum, bukan Bawaslu kalau ada diskualifikasi. Dalam kaitan itu bagaimana Ahli memahami ketentuan Pasal 140 Undang-Undang Pilkada yang menetapkan bahwa KPU memeriksa dan memutus. Di situ jelas ada kata *memeriksa*, sehingga kalau tidak memeriksa, maka KPU keliru, begitu kan? Nah, berkaitan kedaluwarsa, masalah 7 hari atau 7 hari sejak diketahuinya, bagaimana Ahli melihat agar ini tidak disalahgunakan? Hal yang misalnya Pemohon sudah tahu sejak awal misalnya, begini dalam hal keluarnya suatu peraturan kebijakan (balance legal) yang diketahui oleh publik, dimana prosesnya secara terbuka, semua masyarakat tahu, diumumkan, sehingga seharusnya seorang pejabat apalagi masyarakat pun tahu. Misalnya, ada satu keputusan bupati yang terbuka, ada satu surat edaran kepada berbagai kelompok masyarakat yang dilakukan di bulan September, misalnya, akan tetapi baru dilaporkan di bulan Desember. Padahal di beberapa kasus lain, ternyata beliau sudah tahu si pelapor ini atau timnya, begitu. Bagaimana agar ini tidak disalahgunakan? Demikian, Yang Mulia, pertanyaan kami. Terima kasih.

375. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan, Prof!

376. AHLI DARI PEMOHON: TOPO SANTOSO

Terima kasih, Yang Mulia. Yang terhormat Kuasa Hukum KPU, Termohon. Saya menangkap pertanyaan-pertanyaan tadi, saya coba untuk menjawabnya. Yang pertama, terkait dengan program kewenangan dan kegiatan. Memang ini di dalam undang-undang disebutkan berangkai, program kewenangan, program, dan kegiatan. Jadi, memang di dalam maksud pembuat undang-undang, seorang pejabat itu kegiatan-kegiatan yang dilakukannya tentu berlandaskan kepada program yang disusun dan itu bisa dilaksanakan dengan kewenangan yang dimiliki. Dan yang ingin dijaga dari Ketentuan Pasal 71 ini memang dikhawatirkan seorang pejabat, seorang petahana yang sedang menjabat itu agar jangan sampai membuat kedudukannya itu

menjadi lebih diuntungkan dibanding pasangan lain. Sehingga itu memang harus dirangkaikan kewenangan, program, dan kegiatan ini.

Kaitannya dengan menguntungkan atau merugikan ini memang sebetulnya kalau menurut pendapat ahli, intinya adalah apakah ada tindakan yang diskriminatif terhadap pihak lain? Misalnya, yang suatu tindakan atau kegiatan yang hanya bisa dilakukan oleh seorang petahana saja dan yang pihak yang lain tidak bisa dilakukan, apakah ada seperti itu? Misalnya, seorang pejabat mengeluarkan suatu kegiatan atau dengan kewenangannya, misalnya dia menuliskan namanya atau symbolnya atau apa pun di dalam program-program yang dilakukan yang itu sebetulnya resmi dari pemerintah dan sebagainya. Tentu hal itu tidak bisa dinikmati atau tidak bisa dijalankan oleh pasangan lain yang bukan, yang sedang tidak menjabat.

Lalu yang kedua, kaitannya dengan daluwarsa. Memang betul daluwarsa itu beda sekali. Saya pernah menanyakan dalam satu penjelasan undang-undang kenapa tidak disebutkan daluwarsanya itu sekian hari sesudah perbuatan dilakukan. Lalu di dalam pembahasan itu memang diputuskan 7 hari setelah ... sejak diketahui. Nah, setelah diketahui ini memang di dalam pengalaman dari pemilu ke pemilu untuk menghindari adanya waktu yang teramat singkat. Kalau misalnya, 3 hari atau 7 hari sejak dilakukan, itu mungkin sangat terbatas, padahal baru diketahui oleh salah satu pihak itu berapa waktu kemudian. Nah, ini yang diputuskan oleh pembuat undang-undang dengan 7 hari sejak diketahui atau sejak ditemukan. Demikian, Yang Mulia.

377. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, dari Kuasa Hukum Pihak Terkait?

378. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Baik, Yang Mulia. Selamat pagi, Ahli. Yang ingin kami tanyakan ke Ahli sesuai dengan keahlian Ahli adalah sebagaimana kita ketahui bersama kalau ada rekomendasi dari Bawaslu, ya kemudian ditindaklanjuti oleh KPU dalam bentuk melakukan kajian dan kemudian membuat keputusan, kalau dalam hal ini ada rekomendasi dari Bawaslu Tasikmalaya, kemudian KPU Tasikmalaya melakukan pemeriksaan dan memutuskan setelah keluar keputusan sebagaimana kita ketahui bersama, pihak yang tidak puas kan muaranya bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung, misalnya seperti itu.

Nah, kalau dalam kasus Tasikmalaya ini, sebagaimana kita ketahui bersama sudah ada rekomendasi dari Bawaslu, ada tindak lanjut dari KPU, kemudian, Pemohon karena tidak puas atas tindak lanjut dari KPU telah mengajukan gugatan sengketa administratif ke Mahkamah Agung. Kemudian, keluar keputusan dari Mahkamah Agung yang pada pokoknya

menyatakan bahwa tidak terbukti ada pelanggaran TSM, sehingga tidak ... apa yang dilakukan oleh KPU Tasikmalaya itu sudah benar, seperti itu.

Nah, pertanyaannya adalah jika mekanisme-mekanisme penyelesaian itu sudah ... yang diatur dalam undang-undang itu sudah terpenuhi dan sudah ada keputusan dari Mahkamah Agung apakah masih bisa dipaksakan Mahkamah Konstitusi untuk memutus hal yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung? Apakah hal seperti itu malah tidak seolah-olah menghadapkan antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung?

379. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, ya, pertanyaannya saja, Pak, jangan berpendapat.

380. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Ya, bagaimana pendapat Ahli tentang hal tersebut? Terima kasih.

381. AHLI DARI PEMOHON: TOPO SANTOSO

Izin, Yang Mulia, untuk menjawab dengan singkat. Seperti saya sampaikan pada awal pembahasan saya bahwa MK melalui perselisihan hasil pemilihan ini adalah puncak dari upaya mencari keadilan semua pihak di dalam proses pemilihan, khususnya para pihak yang berkompetisi dalam pemilihan sehingga putusan-putusan atau putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu atau KPU, atau PTUN, atau MA apabila itu berkaitan dengan hasil pemilihan dan ada hak dari para pihak untuk mengajukan PHP ke Mahkamah Konstitusi, maka itu dapat menjadi pertimbangan bagi MK untuk memutuskannya.

Demikian Majelis Hakim, Yang Mulia.

382. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Cukup, Pak, ya. Semangat sekali Pihak Terkait ini sudah ada putusan Mahkamah Agung ini ... dari Hakim, Ahli dan Saksi, silakan, Pak Daniel dan Pak Ketua Panel.

383. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya hanya ke Ahli saja. Prof. Topo, terima kasih untuk keterangannya. Ada satu hal yang terkait dengan beleidsregel mungkin saya ingin pandangan, Prof. Tadi uraian keterangan, Prof, mengatakan bahwa surat edaran, instruksi, dan sebagainya itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan. Nah, dalam banyak kasus konkret memang ada beleidsregel yang keluar karena memang belum ada peraturan perundang-undangan.

Jadi, misalnya ketika ada surat edaran dari misalnya pemerintah pusat itu kemudian harus dioperasionalkan di pemerintah provinsi kabupaten/kota. Dalam waktu yang relatif singkat tidak mungkin pemerintah daerah itu menelurkan produk regulasi peraturan perundang-undangan, sehingga pemerintah daerah kemudian juga menindaklanjuti dalam bentuk beleidsregel.

Nah, banyak hal terjadi seperti ini kalau dikatakan bahwa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sementara ini ada sebuah kebutuhan yang mendesak yang mesti ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan kalau itu tidak ditindaklanjuti, maka program ini tidak akan mungkin efektif. Dan kalau itu ditindaklanjuti oleh seorang kepala daerah yang kebetulan adalah petahana kan, tidak semudah kita akan dengan kaca mata kuda mengatakan bahwa ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sementara di sisi lain peraturan perundang-undangan itu belum sempat diatur pada tingkat perda, provinsi, kabupaten, atau mungkin dengan peraturan gubernur, peraturan bupati, dan sebagainya karena itu harus segera dikeluarkan sebuah beleids juga dalam kaitan untuk mengimplementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Nah, dalam hal ini apakah bisa dikategori sebagai sebuah beleids itu yang memang belum ada peraturan perundang-undangannya, tetapi ini sebagai sebuah kebutuhan. Mungkin minta perspektif, Prof, terkait dengan hal itu, terima kasih.

384. AHLI DARI PEMOHON: TOPO SANTOSO

Terima kasih. Izin, Yang Mulia untuk menjawab pertanyaan tadi. Menurut pendapat Ahli kebutuhan untuk menggunakan berbagai instrumen kebijakan seperti juga diskresi, mengeluarkan surat edaran, instruksi, dan sebagainya itu tidak bisa dihindari dalam suatu pemerintahan untuk mengatasi hal-hal yang mendesak yang in konkret[Sic!] dihadapi dan juga kebutuhan-kebutuhan yang ada di lapangan.

Jadi yang menjadi pokok dari electoral justice ini adalah apakah instruksi, surat edaran, peraturan, keputusan, dan sebagainya itu menguntungkan satu pihak atau merugikan pihak lain ataukah tidak. Jadi sepanjang itu dilakukan sesuai dengan suatu itikad baik dan tidak merugikan pihak lain, tidak menguntungkan pihak lain, dan itu untuk kepentingan masyarakat besar menurut hemat saya itu sebetulnya sah-sah saja di dalam suatu administrasi pemerintahan. Demikian, Yang Mulia.

385. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Sedikit lagi, Prof, satu lagi. Terkait dengan hal itu ini jawabannya sangat normatif. Dalam beberapa penyelenggaraan pilkada, ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa ada conflict of interest. Saya kira tadi juga dalam awal persidangan ada yang mengungkapkan itu.

Nah, dengan adanya conflict of interest, Prof, apakah tidak berdampak pada sebuah kebijakan yang akan diambil nanti? Paling tidak di antara penyelenggara, antara KPU dan Bawaslu. Jadi karena conflict of interest itu kemudian berdampak pada keputusan atau rekomendasi terhadap pasangan calon tertentu. Ini bagaimana, Prof, melihat hal ini dalam kaitan untuk tadi, Prof, mengatakan integritas proses dan integritas hasil, kalau ada conflict of interest di antara penyelenggara, ini tentu juga akan berpengaruh terhadap integritas hasil, mungkin itu hal yang kami temukan dalam berbagai persidangan. Bagaimana tanggapan Prof. tentang conflict of interest ini? Terima kasih.

386. AHLI DARI PEMOHON: TOPO SANTOSO

Izin, Yang Mulia. Untuk menjawab pertanyaan tadi, jadi di dalam suatu proses pemilihan memang ada beberapa pihak yang dijaga oleh undang-undang untuk tidak terjadi penyimpangan terhadap kewenangan yang dimiliki, terhadap program-program bisa dijalankan dan sebagainya. Baik dari unsur pemerintahan yang sudah ditentukan di dalam undang-undang, juga unsur penyelenggara pemilihan. Ini juga yang harus dihindarkan adanya conflict of interest, jika terjadi penyimpangan dalam hal kewenangan, program dan sebagainya oleh Petahana, itu juga bisa mempengaruhi hasil, juga bila terjadi penyalahgunaan dari posisi atau kedudukan seorang penyelenggara pemilihan, ini juga bisa mempengaruhi hasil.

Dan demikian juga di ... dari bacaan saya di berbagai negara, kedua hal ini juga bisa menjadi persoalan di dalam election contest atau perselisihan hasil. Demikian, Yang Mulia.

387. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

388. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, saya ke Ahli, ya. Saksi untuk saya sudah cukup. Ini ke Ahli. Prof. Ini ada problem yang sepanjang sidang pilkada ini jadi bahan diskusi, yaitu soal mekanisme tindak lanjut rekomendasi Bawaslu. Di makalah Prof atau keterangan tertulis Prof. sebenarnya sudah jelas. Tetapi, ya Prof. Sebagai salah satu Ahli di bidang kepemiluan, ada juga

Ahli di ... ada juga ahli pemilihan yang pendapatnya tidak sama dengan apa yang Prof tulis. Nah, kalau kita lihat mekanisme tindak lanjut rekomendasi Bawaslu, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 139 ayat (2) kan jelas, Prof. "KPU wajib melaksanakan ... tindak apa, rekomendasi Bawaslu." Itu diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Demikian juga dengan Pasal 140 ayat (1), nah persoalannya di sini antara apa ... hubungan antara Pasal 139 dengan Pasal 140 ayat (1). Pasal 139 ayat (2), "KPU wajib melaksanakan." Kemudian Pasal 140, "KPU bisa ... KPU memeriksa dan memutuskan." Apa yang dimaksud dengan Pasal ... yang dimaksud di Pasal 139 ayat (2) itu.

Nah itu juga baik Pasal 139, Pasal 140, yang berkaitan dengan mekanisme rekomendasi Bawaslu itu diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Kemudian, Undang-Undang Nomor 8 mengalami lagi perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, diatur juga mengenai rekomendasi, mengenai mekanisme tindak lanjut rekomendasi, mekanisme tindak lanjut rekomendasi di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, diatur di dalam Pasal 135A itu jelas, tadi Kuasa Terkait juga sudah menyampaikan di Pasal 4, "KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu provinsi dengan menerbitkan putusan KPU atau KPU provinsi atau KPU kabupaten dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja."

Nah, jadi mekanismenya ada yang diputus kalau di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ada mekanisme memeriksa, jadi sebelum mau menindaklanjuti harus memeriksa dan memutuskan dulu, tetapi di Undang-Undang Nomor 10 tidak ada lagi mekanisme memeriksa dan memutuskan itu. Pasal 4 wajib melaksanakan, Pasal 5 kalau yang berkaitan dengan diskualifikasi pasangan calon, sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Bawaslu tadi, maka Para Pihak yang tidak menerima, mekanismenya adalah Mahkamah Agung.

Nah, ini mohon pencerahan Prof. supaya ini tidak menjadi diskusi yang panjang lebar, apakah rekomendasi Bawaslu itu kita tetap menggunakan Pasal 139 dan Pasal 140 ayat (1)? Atau kita menggunakan Pasal 135A? Mohon penjelasan, Prof. Terima kasih.

389. AHLI DARI PEMOHON: TOPO SANTOSO

Terima kasih, Yang Mulia izin untuk menjawab.

Memang di dalam undang-undang pemilu itu seharusnya ada suatu mekanisme yang sama ... yang bulat untuk me ... sikap terhadap pelanggaran administrasi. Jadi, jika Bawaslu itu memang disertai tugas dan kewenangan untuk memeriksa dan kemudian berikan putusan

terhadap semua jenis pelanggaran administrasi termasuk yang berimplikasi pada diskualifikasi seorang kandidat maka seharusnya ditetapkan untuk seluruh ketentuan. Tapi dalam undang-undang pemilihan sampai terakhir setelah di ... direvisi terakhir setelah diamandemen terakhir, maka ternyata masih ada dualism, yaitu sebagian adalah diputuskan diperiksa dan kemudian diputuskan oleh Bawaslu dan sebagian hanya dikaji dan kemudian diberikan rekomendasi oleh Bawaslu dan harus diperiksa dan diputus oleh KPU.

Dengan demikian, ini yang menimbulkan perdebatan hingga saat ini. Tapi Ahli memiliki pendapat bahwa suatu penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan seharusnya berada pada suatu sistem yang terintegrasi, artinya sistem terintegrasi ini jangan sampai berlarut-larut terdapat perdebatan dan perbedaan antara bawaslu dan KPU. Karena itu bisa menjadi suatu ketidaksinkronan penyelenggara pemilihan di mana bawaslu pada satu sisi telah melakukan suatu kajian yang mendalam kemudian melakukan rekomendasi tentu didasarkan pada hasil kajiannya. Dan kemudian diperiksa ulang untuk materi yang sama dan mungkin juga kadang-kadang mengundang ahli yang lain, sementara Bawaslu sudah mengundang ahli, mengundang saksi, KPU mengundang ahli lagi, mengundang saksi lagi sehingga akhirnya keputusan yang dikeluarkan mungkin berbeda dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu.

Dengan demikian menurut hemat Ahli, inilah yang memang harus kemudian di ... pertama dilakukan suatu revisi terhadap undang-undang. Kedua, dalam konteks PHP ini yang menurut hemat Ahli seyogianya dapat dijadikan suatu bagian dari yang harus diputuskan oleh Mahkamah di mana dikaji dan diperiksa apakah betul putusan-putusan yang telah dikeluarkan oleh KPU mengenai tidak menjalankan rekomendasi dari bawaslu itu ... itu sudah tepat atau belum. Tapi menurut hemat Ahli, sebetulnya bagian terpenting dari PHP ini adalah perselisihan hasil apakah itu semua yang terjadi pelanggaran, kecurangan, termasuk juga dengan pelanggaran Pasal 71, Pasal 73, dan lain-lain, itu apakah mempengaruhi hasil pemilihan ataukah tidak. Sebetulnya ranahnya Mahkamah Konstitusi di sana. Demikian, Yang Mulia.

390. KETUA: ASWANTO

Sedikit lagi, Prof.

Ini, kan ada 2 norma Pasal 140, Pasal 139, Pasal 140, kemudian Pasal 135 sebenarnya ada 2 norma pokok di sana yang saling bertentangan. Apakah tidak bisa dimaknai bahwa norma yang ada di dalam Pasal 140 ayat (1) itu adalah memutus dan memeriksa pelanggaran administrasi secara umum sementara pelanggaran administrasi untuk diskualifikasi sebagaimana yang dicantumkan di dalam Pasal 135 ayat a ... 135 A ayat (4), ayat (5), ayat (6) itu jelas di

situ, Prof pelanggaran administrasi berupa diskualifikasi yang direkomendasikan oleh bawaslu wajib dilaksanakan oleh KPU dengan membuat Keputusan KPU. Dan ayat berikutnya terhadap pihak yang tidak menerima keputusan KPU itu mekanismenya adalah ke Mahkamah Agung. Apa tidak seperti itu kira-kira skenarionya, Prof?

391. AHLI DARI PEMOHON: TOPO SANTOSO

Izin, Yang Mulia.

392. KETUA: ASWANTO

Silakan, Prof.

393. AHLI DARI PEMOHON: TOPO SANTOSO

Ya. Ini memang saya kira ada ... saya juga tidak tahu pembuat undang-undang, ya, kenapa membedakan antara misalnya 73 itu pasal 73 ... pelanggaran Pasal 73 itu jelas bahwa harus dilakukan suatu pemeriksaan oleh Bawaslu dan kemudian diputuskan melalui suatu pengesahan TSM dan kemudian wajib dilakukan dilaksanakan oleh KPU. Sementara untuk yang pelanggaran yang sebetulnya tidak terlalu jauh berbeda juga, yaitu pelanggaran penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan, ini ternyata pasalnya mau mengatakan diperiksa dan kemudian diputuskan oleh KPU. Sementara bawaslu menggunakan ketentuan yang umum terhadap semua jenis pelanggaran administrasi yang memang itu merupakan kewenangan dari Bawaslu jadi semacam ada dualisme seperti itu, Yang Mulia.

Jadi, menurut hemat saya ini memang kalau kita membacanya, ya karena diaturnya secara berbeda seperti itu, kalau menurut hemat saya, Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk memeriksanya karena tidak di kecuali ... tidak dikecualikan artinya tidak di ... tidak dilarang juga untuk melakukan pemeriksaan secara administratif terhadap Pasal 71 dan juga pasal-pasal lain. Sementara KPU juga mendasarkan kepada ketentuan yang tertulis secara letterlijk di dalam undang-undang pemilihan.

Menurut hemat saya, inilah justru yang menjadi kesempatan bagi Mahkamah untuk memeriksa apakah memang terja ... telah terjadi pelanggaran norma terhadap Pasal 71 dan pasal-pasal lainnya. Demikian, Yang Mulia.

394. KETUA: ASWANTO

Terima kasih. Cukup, Yang Mulia.

395. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih Prof. Sudah cukup dan Para Saksi sudah cukup. terima kasih mudah-mudahan (...)

396. AHLI DARI PEMOHON: TOPO SANTOSO

Terima kasih, Yang Mulia. Izin.

397. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Silakan, Prof!

398. AHLI DARI PEMOHON: TOPO SANTOSO

Terima kasih.

399. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kita lanjutkan mendengarkan keterangan Saksi Termohon. Hasyim Asy'ari?

400. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Betul, Yang Mulia. Selaku pemberi keterangan pimpinan KPU atasan langsung dari (...)

401. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, ini kan dia Pihak kok diajukan sebagai Saksi? Bagaimana Bapak ini?

402. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Dia pemberi keterangan berkaitan tindaklanjut rekomendasi Bawaslu, karena dalam melaksanakan tindaklanjut tersebut, Termohon melakukan konsultasi dan mendapatkan arahan KPU RI selaku pimpinan. Demikian, Yang Mulia.

403. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, tapi kan pihak yang digugat, yang di ... Saksi yang lain tidak ada?

404. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Ada, 2 orang saksi lain yang di (...)

405. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan untuk menggantikan Pak Hasyim?

406. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Kami memang sudah menyediakan 3, 1 pemberi keterangan Pak Hasyim yang kedua saksi.

407. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, dia pihak Pak. Bagaimana dia bisa memberi keterangan yang kemudian keobjektifitasnya bisa dijamin?

408. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Ini berkaitan dengan fakta, Yang Mulia. Bahwa (...)

409. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sampaikan, tuangkan dalam jawaban, dalam bantahan Termohon. Mekanismenya kan begitu, apa yang didalilkan Pemohon kemudian di-counter, dibantah. Itu dituang ... di apa ... itu bisa diakumulasikan dari keterangan internal KPU, kemudian dari pihak-pihak yang bisa. Kami akan periksa 2 saja.

410. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Baik, Yang Mulia. Untuk keterangan Pak Hasyim nanti kami ajukan secara tertulis.

411. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

412. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Karena sudah dibuat (...)

413. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, secara tertulis silakan. Nanti kami akan pertimbangkan.

414. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

415. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Agam Sandi, yang mana? Kemudian Suwardi? Baik, agamanya islam?

416. SAKSI DARI TERMOHON:

Ya, islam.

417. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dua-duanya bisa di tes suaranya, Pak?

418. SAKSI DARI TERMOHON:

Tes, Yang Mulia. Tes, Yang Mulia.

419. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, tirukan saya. Saya bantu lafal sumpahnya, Bapak-bapak agamanya islam.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya.

420. SAKSI DARI TERMOHON:

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya".

421. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Duduk, Pak! Pak Agam di depan, Pak Suwardi di belakang. Kita dengar Pak Agam dulu. Silakan, Pak Ali! Atau saya bantu dulu, ini mau menjelaskan apa Agamnya?

422. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Ini terkait dengan kasus di Kecamatan Cikatomas tuduhan adanya kabel ties yang dianggap tidak apa ... terbuka begitu, Yang Mulia. Di Desa Pakemitan.

423. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau Pak Suwardi?

424. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Pak Suwardi adalah saksi kepala BPN untuk menunjukkan bahwa kebijakan sertifikasi tanah wakaf merupakan program nasional.

425. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau Pak Agam tadi berkaitan yang fokusnya apa?

426. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Fokusnya dalil Pemohon waktu rapat Pleno di Cikatomas, adanya dugaan pembukaan kotak suara.

427. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

428. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Itu untuk Desa Pakemitan.

429. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Desa?

430. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Pakemitan.

431. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pakemitan?

432. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Ya, kecamatan Cikatomas.

433. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Agam, Bapak sebagai apa dalam pemilihan ini pilkada?

434. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Sebagai Ketua PPK Kecamatan Cikatomas, Yang Mulia.

435. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ketua PPK Cikatomas?

436. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Ya.

437. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa yang mau diceritakan berkaitan dengan PPK Cikatomas? Singkat-singkat saja!

438. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Ya. Terima kasih, Yang Mulia, mohon izin. Pada pelaksanaan rapat Pleno tingkat Kecamatan Cikatomas yang dilaksanakan hari Jumat tanggal 11 Desember, pukul 09.00 WIB sampai dengan 22.30 WIB. Dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tertib. Kemudian, pada pelaksanaan rapat Pleno tersebut, pada saat rapat Pleno di tingkat kecamatan tidak terdapat perbaikan argumen data akumulasi data pemilihan, baik data DPT, DPTb, DPPh dan data perolehan suara. Kemudian, Yang Mulia, terkait adanya dugaan banyaknya kotak suara yang tidak tersegel di Desa Pakemitan dan sangat mudah untuk dibuka sebagaimana terdapat dalam Formulir D-kejadian adalah kejadian perlu disampaikan bahwa hal tersebut adalah tidak benar. Saya melihat dan menyaksikan bahwa seluruh kota tersebut dalam kondisi tertutup, terkunci (...)

439. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi tidak ada yang dibuka tanpa prosedur itu, tidak ada?

440. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Bagaimana, Yang Mulia?

441. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang ada pembukaan kotak yang menyalahi ketentuan, tidak ada?

442. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Tidak ada, Yang Mulia.

443. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Waktu itu ada keberatan-keberatan tidak di ketika, baik ketika rekapitulasi maupun setelah dan sebelumnya?

444. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Ada, Yang Mulia.

445. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada keberatan. Dari siapa, Pak?

446. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Dari Saksi Paslon Nomor 4.

447. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saksi Pasangan Nomor 4, ya?

448. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Ya.

449. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini Pasangan atas nama siapa, Pak?

450. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Atas nama Bapak Iwan Saputra dan Bapak H. Iip Miftahul.

451. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, yang sekarang jadi Pemohon, ya?

452. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Ya.

453. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Keberatannya siapa namanya, Pak?

454. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Saksi Nomor 4, yaitu Saudara Syaiful Fahmi.

455. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Syaiful Fahri?

456. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Fahmi.

457. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pahri?

458. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Syaiful Fahmi, Yang Mulia.

459. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Syaiful Pahri, kan?

460. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Fahmi.

461. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Syaiful?

462. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Fahmi.

463. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pahli?

464. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Fahmi.

465. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Apa keberatannya, Pak? Keberatannya apa, Pak?

466. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Yang pertama, banyaknya kotak suara yang tidak tersegel di Desa Pakemitan dengan sangat mudah untuk membuka dengan membuktikannya ternyata ada perubahan jumlah DPT di TPS 10 tanpa sepengetahuan Saksi.

467. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Adanya? Pelan-pelan, Pak. Miknya agak didekatkan, pelan-pelan. Adanya? Di bukti berapa itu, Pak? (...)

468. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Adanya kotak suara yang (audio tidak terdengar jelas) tersegel (...)

469. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di dari ... sebentar, Pak. Sebentar Pak. Pemohon, mengajukan bukti tidak soal keberatan Saksinya itu? Pemohon, ada tidak bukti dari Saksi mandat di PPK (...)

470. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRWANDA

Ada, Yang Mulia. Kita mengajukan bukti yang P-198.

471. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

P-198?

472. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRWANDA

Ya.

473. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

P, ya?

474. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRWANDA

Ya.

475. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

198?

476. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRWANDA

P-198, video, Yang Mulia.

477. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Biar saya kros sekalian. Mana ini? Aduh. Anu, ya ... cd, ya? Hard copy-nya enggak ada? Apa yang ini kan Saksi Anda itu mengajukan keberatan, kan ada form keberatan yang dibacakan Saksinya Termohon tadi, PPK Cikatomas itu, kan mestinya ada hard copy-nya, ada bentuk penuangan dalam form keberatan. Ada dituangkan dalam form tidak, Pak, keberatan dari Saksi Syaiful itu?

478. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Ya.

479. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada?

480. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Ada.

481. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada. Kalau dari Kuasa Hukum Termohon ada mengajukan enggak ini?

482. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Ada, Yang Mulia, di T-007 kumpulan formulir D hasil kecamatan dikejadian khusus dan D daftar hadir kecamatan nomor urut ke 5 untuk Kecamatan Cikatomas.

483. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Urut 5 nomor ini, 007 nomor urut 5. Ini mestinya Pemohon yang seperti ini, Anda mendalilkan, backup dengan bukti. Ini rangkaian dari keberatan-keberatan atau adanya ketikdak ... apa ... normalan pelaksanaan. Bukan malah yang mengajukan Pihak Termohon. Ini kan jadi terbalik-balik. Oke, Pak, dilanjutkan, Pak. Pak, pelan-pelan tapi, Pak. Jadi adanya apa tadi, Pak, saya tulis? Biar sambil dicari itu buktinya.

484. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Banyaknya kotak suara.

485. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, pelan-pelan. Banyaknya kotak suara.

486. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Yang tidak tersegel di Desa Pakemitan.

487. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di desa mana?

488. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Pakemitan.

489. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pa?

490. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Kemitan.

491. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pakemitan, oke. Pelan-pelan, Pak. Pakemitan, jadi banyaknya kotak suara yang tidak tersegel di Desa Pakeme ... Pakemitan, terus apa lagi?

492. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Dan sangat mudah.

493. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa?

494. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Dan sangat mudah (...)

495. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, ini saya sudah dapat ini saya cross saja, Pak, saya cocokkan benar apa tidak ya, Pak, karena ada gangguan komunikasi juga.

496. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Ya.

497. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Banyaknya kotak suara yang tidak tersegel di Desa Pakemitan dan sangat mudah untuk dibuka dengan dibuktikan ternyata ada perubahan jumlah di DPT di TPS 10 tanpa sepengetahuan Saksi.

Dua. Adanya indikasi keberpihakan ASN dan perangkat desa pada salah satu Paslon dengan membagikan dana covid di hari tenang. Ya, Pak? Kemudian, "Kami dari Saksi 04 tidak akan menandatangani hasil Model D. kami dari Saksi 04 tidak akan menandatangani hasil Model D." Berarti itu bukti laporan kan Model Dengan itu. Banyaknya kesalahan dalam penulisan C-1 Plano, terutama dalam penyalinan daftar pemilih tetap. Saipul Fahmi. Ini mestinya kan enggak ... ini mestinya Anda kan sebagai Pemohon ini, ini senjata-senjata Anda sebagai penggugat itu

harus begini kalau ... Pak, ini menurut Bapak bagaimana? Pernah tidak ada persoalan ini di PPK Bapak seperti yang disampaikan Saipul ini?

498. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Ya, yang pertama terkait adanya dugaan banyaknya kotak suara yang (...)

499. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

500. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Di Desa Pakemitan dan sangat mudah untuk dibuka sebagaimana terdapat dalam Formulir D kejadian tadi, perlu disampaikan bahwa hal tersebut adalah tidak benar.

501. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak benar.

502. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Saya melihat dan menyaksikan bahwa seluruh kotak tersebut dalam kondisi tertutup, terkunci dengan kabel ties dan tersegel dengan baik. Kemudian, Yang Mulia. Bahwa terkait adanya video yang tersebar yang menunjukkan bahwa kabel ties dan segel kotak suara dari 14 TPS dari Desa Pakemitan sudah terbuka atau terlepas perlu dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pada saat giliran pembacaan hasil penghitungan suara untuk Desa Pakemitan sekitar pukul 20.30 WIB, para petugas dari PPK, PPS, panwascam, dan kepolisian melakukan pergeseran kotak suara dari Gudang penyimpanan kotak yang mana Gudang tersebut terkunci dengan 3 buah kunci yang masing-masing kunci dipegang oleh tiga pihak, yaitu pihak PPK, panwascam, dan Kepolisian Sektor Kecamatan Cikatomas. Lokasi Gudang berjarak 100m berada dalam gedung yang sama (...)

503. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, intinya bahwa apa yang disampaikan Saipul tidak benar?

504. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Ya, Yang Mulia.

505. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kemudian, kalau ... kalau pada saat rekapitulasi ada tidak dia kemudian membubuhkan[sic!] tanda tangan, Pak?

506. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Tidak, Yang Mulia.

507. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak, ya. Terus, ini ada tidak penerusan ke panwascam?

508. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Tidak ada, Yang Mulia.

509. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ada. Hanya kejadian-kejadian khusus yang Bapak tulis yang ditulis dia ... kami dari saksi tidak akan menandatangani hasil Model D. Model D itu di catatan khusus ditandatangani. Tapi mungkin yang dimaksud adalah hasil rekapitulasi. Karena memang tidak menandatangani, Pak, ya?

510. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Ya.

511. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Ini ada Model D hasil ya KWK. Pasangan ... panitia pemilihan. Nama dan tanda tangan saksi ... Oke. Kalau dari panitianya ada 5 ya, Pak? PPK, ya?

512. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Ya, Yang Mulia.

513. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saksi 1 tanda tangan, saksi 2 tanda tangan, 3 dan 4 tidak tanda tangan, ya?

514. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

3 tidak hadir, Yang Mulia.

515. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3 tidak?

516. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Tidak hadir.

517. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Ada yang mau dijelaskan lagi, Pak?

518. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

1 lagi, Yang Mulia.

519. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa?

520. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Video ... beredarnya video telah terbukanya kotak suara dan tidak tersegel. Itu sebetulnya, kejadian yang sebetulnya adalah ketika kotak suara telah berjajar di tempat persidangan, ketika saya selaku pimpin sidang mempersilakan untuk mendokumentasikan, tiba-tiba Saksi Paslon Nomor 4 yaitu Saudara Deden Cabiana[sic!] membuka kabel ties tersebut, kemudian berbicara bahwa tidak betul pemasangan kabel tiesnya. Kemudian dibuka lagi yang TPS yang lainnya barisan belakang. Kemudian saksi yang satunya lagi yaitu Saipul Fahmi membuka 7 kotak suara yang barisan belakang itu.

521. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang barusan dibuka juga (...)

522. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Menegurnya agar supaya hal-hal tersebut walaupun ada yang kurang dipahami oleh saksi, silakan ditulis di Model D keberatan saksi, begitu.

523. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, ya, Pak. Saksi satunya tadi siapa yang membuka juga? Pasangan 04 tadi?

524. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Masih tetap Saksi Nomor 4.

525. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Siapa namanya?

526. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Dadang (suara tidak terdengar jelas).

527. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Siapa?

528. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Dadang Candriana S.T

529. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Candana?

530. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Candriana.

531. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Candriana?

532. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Iya.

533. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, tahi kalau saksi yang 1 ini tidak membuat form keberatan, ya? Tidak menulis?

534. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Tidak, Yang Mulia.

535. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, Bapak mundur, ganti Saksi satunya, Pak!

536. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Yang Mulia, boleh kami bertanya? Dari Termohon, Saksi?

537. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nanti saya ... bergiliran, Pak. Ini saya dulu, Hakim dulu biar ... nanti Bapak saya beri pertama.

538. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Suwardi!

539. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Izin, Yang Mulia.

540. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, duduk, Pak. Bapak Kepala BPN?

541. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Siap, Yang Mulia. Saya (ucapan tidak terdengar jelas) Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya.

542. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi Saksi sudah dapat izin dari atasan?

543. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Siap, Yang Mulia, jadi saya yang tanda tangan sendiri.

544. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bagaimana?

545. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Saya selaku Kepala kantor, saya yang tanda tangan sendiri.

546. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh (...)

547. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Saya sudah melapor ke atasan.

548. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah melapor?

549. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Sudah.

550. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya karena ASN kan tidak boleh ada keberpihakan.

551. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Siap.

552. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Keberpihakan itu tidak dalam konteks ketika proses pemilihan terjadi, itu juga ... karena ini masih rangkaiannya, tidak boleh kemudian ... baik, ya, Pak, ya?

553. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Siap.

554. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa yang mau dijelaskan?

555. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Izin, Yang Mulia. Pada dasarnya, Saksi menerangkan mengenai program persertifikatan tanah wakaf sebagai berikut.

1. Program percepatan persertifikatan tanah wakaf merupakan program dari pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria, Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, bukan merupakan program dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020. Sesuai dengan kebijakan pemerintah, yaitu instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Indonesia. Instruksi Presiden tersebut ditunjukkan kepada Menteri Agraria Tata Ruang Badan ... Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kementerian terkait, kepala daerah, termasuk di dalamnya bupati dan walikota dan lembaga lainnya untuk mendampingi langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pelaksanaan percepatan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di seluruh wilayah di Indonesia untuk mendukung strategis nasional.

556. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu saja, Pak?

557. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Ya, Pak.

558. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik (...)

559. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Peraturan di Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (...)

560. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

561. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

(Ucapan tidak terdengar jelas) tanah-tanah wakaf juga menjadi salah satu prioritas Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakannya yang tertuang di dalam.

1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional.
2. Instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/INS/II/2018 tentang Percepatan Pensertifikatan Tanah Tempat Peribadatan di Seluruh Indonesia.
3. Surat Edaran Menteri Agraria, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/SE/III/2018, tertanggal 2 Maret 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Tempat Peribadatan di Seluruh Indonesia.

562. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya Pak, sudah cukup, Pak, sudah cukup, Pak. Kami sudah bisa menangkap apa yang Bapak jelaskan. Saya mau tanya, sekarang mau tanya saya. Kalau untuk di Kabupaten Tasikmalaya itu tertuang dalam Surat Edaran nomor berapa itu oleh bupati? Instruksi bupati? Nomor berapa, Pak?

563. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Saya tidak bawa, Pak, mohon izin, Pak.

564. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Lho kok tidak tahu? Itu kan mestinya inline antara surat ... kalau tarikannya dari Instruksi Presiden, kemudian surat Kepala BPN, atau Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, atau Menteri Agama Tata Ruang (...)

565. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Tanggalnya tanggal 3 September 2020.

566. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3 September 2020?

567. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Siap, Yang Mulia.

568. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu, tahu tidak itu tarikannya dari mana, Pak? Surat edaran itu? Dari mana?

569. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Izin, Yang Mulia.

570. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dari kementerian Bapak itu ... apa itu ... program itu kapan dicanangkan?

571. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 2.

572. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Intruksi Nomor 2, tahun berapa?

573. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Tahun 2018.

574. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. 2018. Kemudian kalau di internal Bapak, tahun berapa itu dikeluarkan? Untuk melanjutkan ... menindaklanjuti intruksi itu?

575. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Dari ... dari instruksi (...)

576. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Ada tidak, kemudian, internal Bapak di BPN (Badan Pertahanan Nasional) itu atau Kementerian Agraria Tata Ruang itu mengeluarkan produk aturan untuk menindaklanjuti instruksi presiden itu?

577. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Siap, Yang Mulia. Ada, yaitu keputusan peraturannya yaitu Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2018.

578. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

6/2018? Oke.

579. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

18.

580. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kemudian (...)

581. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Kemudian (...)

582. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, Pak. Paham kami. Ada enggak di tingkat wilayah Kanwil BPN mengeluarkan tindak lanjut juga, mengeluarkan produk aturan atau instruksi juga ke kepala BPN-BPN kabupaten/kota?

583. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Ada, Pak.

584. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nomor berapa?

585. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Itu langsung edaran dari Pak Menteri, Pak.

586. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

He eh.

587. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Nomor 1/SE/III/2018 tentang yang ditujukan kepada seluruh kepala kantor wilayah (...)

588. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. 2018. 2018. Oke. 2018, ya, Pak?

589. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Ya, Pak.

590. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Terus dari internal Bapak, BPN Tasikmalaya, mengeluarkan tidak aturan lagi atau tindak lanjut dari surat edaran kementerian Bapak itu?

591. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Tidak, Pak. Langsung saya sosialisasikan, Pak.

592. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Langsung. Kalau langsung ini dari 2018 kenapa ini momentumnya kok sama dengan ketika mau ada pilkada 2020? Tentang Akselerasi pendaftaran sertifikat tanah wakaf ini. Instruksi juga dari 2 tahun, 3 tahun yang lalu. 2 tahun lah. Itu pertanyaan masyarakat kan itu, Pak. Pertanyaannya adalah yang mendasar. Kenapa tidak dikeluarkan jauh sebelum ada proses mau pilkada? Atau tunggu ... tunggu saja nanti setelah pilkada. Kenapa bulan September yang mengeluarkan surat edaran itu, itu kan pertanyaan mendasarnya, Pak. Bisa menjawab Bapak?

593. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Izin, Yang Mulia. Kami di Tasikmalaya masuk menjadi kepala kantor tahun 2019.

594. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Ini kan dikeluarkan dari bupati 2020, Pak. Bapak kan 2019 sudah ada di situ berarti?

595. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Ya. Artinya, izin, Yang Mulia. Kami setiap tahun itu ada target, berubah-ubah. Jadi target tahun 2020, itu PTSL sebanyak 66.000 (...)

596. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

66.000.

597. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

400 ... 66.442 bidang termasuk (...)

598. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

66.44?

599. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

2.

600. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

2. 2000 ... ini untuk ... untuk apa ini? Proyeksi, Pak, ya?

601. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Target PTSL termasuk tanah wakaf.

602. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Jadi karena wakaf (...)

603. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Itu sudah selesai semuanya, Pak.

604. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi tanah wakaf masuk di dalamnya, ya?

605. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Di dalamnya.

606. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Kemudian yang 2019 berapa?

607. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

2000?

608. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

19.

609. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

2019=57.000.

610. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

50?

611. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

57.000.

612. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pas 57.000?

613. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Ya. Termasuk wakaf.

614. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

2019, dikeluarkan oleh bupati, surat edarannya ada yang berkaitan dengan itu?

615. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Tidak, Pak.

616. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak. Kenapa? 2019 tidak ada edaran untuk target 57.000 di 2020, 66.000 targetnya 442 ... 66.442. kemudian dilapisi dengan surat edaran. Bisa menjawab Bapak?

617. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Izin.

618. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bagaimana?

619. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Tidak tahu, Pak.

620. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak tahu. Itu, Pak. Pertanyaan mendasarnya kan di situ. Kalau memang ini target tahunan, di internal BPN, oke, ada target-target proyeksinya 2019 adalah 57.000 sekian. 2020, ada 66.100 ... 442, oke. Hanya persoalannya kemudian, kenapa ini kemudian ada lapisan, surat edaran dari bupati, instruksi Bupati Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2020 berkaitan dengan itu. Itu kan sudah memang secara ... apa ... secara universal, memang sudah jalan setiap tahun kan, Pak, dari instruksi presiden 2018, 2019, 2020. Begitu, Pak, Pak Kepala, ya kan?

621. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Ya, Pak.

622. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, ini persoalannya, Bapak tahu tidak kaitannya dengan instruksi bupati ini untuk apa? Untuk apa, Pak?

623. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Untuk ... izin, Pak ... Yang Mulia. Untuk mempercepat proses (...)

624. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, kan sudah ada targetnya, Pak. Tiap tahun kan memang sudah ditargetkan, memang ada surat ... surat baru atau perintah baru dari ... dari pusat, memang ini perlu percepatan?

625. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Siap, ada, Pak, Yang Mulia.

626. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nomor berapa, Pak?

627. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Nomor surat instruksi menteri adanya data tanggungan kepala badan penanganan nasional nomor 1/INS/II/2018.

628. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, 2018 lagi, kan? Malah duluan mana nih dengan yang instruksi presiden, ini? Maksud saya, kalau memang percepatan itu ada sejak tahun 2018, surat edaran ini mestinya kan dikeluarkan 2019 juga ... juga dikeluarkan atau ada dikeluarkan itu untuk target yang ... meskipun sebenarnya kan core bisnisnya ada dimana, Pak? Tugas pokoknya untuk ini sebenarnya di BPN atau di pemerintah daerah?

629. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Ya, kami bekerjasama, berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Pak.

630. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Oke.

631. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Tanpa hubungan pemerintah daerah, enggak akan jalan, Pak, semuanya, Pak.

632. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, oke, itu ... apa ... natural lah, itu se ... yang ingin saya tanyakan sebenarnya, tugas pokok utamanya ada dimana? Kalau koordinasi, oke, Pak. Dimana, Pak?

633. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Di BPN, Pak.

634. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

BPN. Oke. Ada lagi yang mau dijelaskan, Pak?

635. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Cukup, Pak.

636. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Cukup, ya. Silakan Kuasa Hukum Termohon kalau ada pertanyaan.

637. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Kepada saksi, Pak Suwardi, berkaitan dengan koordinasi dalam instruksi persiden nomor 2 tahun 2018, itu kan ditujukan kepada berbagai kementerian. Dimana ketuanya adalah menteri agraria. Dan di situ tidak hanya kementerian tetapi juga kepala daerah, baik gubernur, maupun bupati. Dalam rangka percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Berkaitan dengan itu kan tentunya ada target-target yang harus dicapai. Pada tahun 2018 instruksinya, maka ada pelaksanaan di tahun 2019. Kemudian kan di tiap daerah ada koordinasi. Biasanya di awal tahun dan di pertengahan tahun. Dalam kaitan itu, apakah ada koordinasi antara BPN dengan pemda? Berkaitan dengan target. Apalagi kan ada peristiwa covid yang mulai di bulan Maret, begitu, ya.

638. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Koordinasi ada ... ada ... koordinasi, Pak.

639. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Ya.

640. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bapak, apa pertanyaannya?

641. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Sehingga dalam kaitan itu apakah pernah dilakukan koordinasi berkaitan dengan masih rendahnya target yang dicapai, sehingga diperlukan kerja sama dengan pemerintah daerah? Apakah ada koordinasi itu, Pak?

642. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Siap. Saya selalu koordinasi, Pak.

643. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Selalu koordinasi, Pak.

644. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Dengan pemerintah daerah. Artinya, saya akan laporkan semua (...)

645. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

646. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Semua proses ... progress atau program-program BPN.

647. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Ya. Baik. Yang kedua, berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf. Apakah dalam pelaksanaan tersebut untuk mereka yang mengajukan sertifikasi melalui KUA dalam ... oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf maupun oleh masyarakat, apakah dipersyaratkan adanya dukungan kepada pasangan calon tertentu? Ataukah itu berlaku secara umum kepada siapapun yang mengajukan? Apakah Bapak juga pernah mendengar adanya laporan kalau tidak mendukung calon tertentu akan dipersulit? Kalau mendukung akan dipermudah? Apakah ada persyaratan itu dalam proses pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf?

648. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Baik. Tidak ada persyaratan sama sekali, untuk mengenai (...)

649. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, tidak ada.

650. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Tidak, ada.

651. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan, pertanyaan berikutnya, ada?

652. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Cukup ... eh ... satu lagi. Berkaitan dengan sertifikasi tanah wakaf gratis. Apakah ada uang atau anggaran yang dikeluarkan oleh APBD Penda Tasikmalaya dalam pelaksanaan proses tersebut?

653. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Tidak, ada sama sekali.

654. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ada.

655. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Cukup, Yang Mulia. Saya bergeser ke Saksi berikutnya.

656. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Agam. Pak Agam.

657. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Ya, Pak.

658. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Agam Sandi, silakan.

659. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Saudara Saksi, berkaitan dengan jabatan anda sebagai ketua PPK, setelah pelaksanaan pemungutan suara, kotak suara itu kan kemudian dari seluruh TPS dikumpulkan di PPS. Dari PPS, kemudian diberangkatkan ke kecamatan, ke gudang tempat penyimpanan. Apakah saksi melihat sendiri bahwa kotak suara tersebut pada waktu dibawa dari PPS ke gudang, dalam keadaan terkunci dengan baik dan tersegel?

660. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Saya melihat sendiri dalam keadaan terkunci dan tersegel.

661. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Dan tersegel. Bisa ceritakan kenapa Anda sampai melihat sendiri?

662. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, dia ketua PPK, Pak.

663. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Baik.

664. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Karena saya sebagai ketua PPK.

665. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, kecuali dia terus pulang, tidur di rumah.

666. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Oke. Apakah Anda ikut mengantar kotak suara tersebut dari tempat PPS, dari rumah PPS ke gudang penyimpanan?

667. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Ikut mengantar.

668. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Ikut mengantar. Jadi, Anda melihat sendiri, ya?

669. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Dari PPS ke (...)

670. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Ya, ketika sampai di gudang, gudang penyimpanan tempat kotak suara kan dikunci, tadi Saudara sampaikan bahwa gudang itu dikunci oleh 3 anak kunci yang dipegang oleh kapolsek, oleh panwascam, dan oleh PPK. Apakah sebelum rapat rekapitulasi pada saat tingkat kecamatan, gudang tempat kotak suara tersebut pernah dibuka?

671. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Tidak pernah.

672. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Tidak pernah. Jadi, gudang kotak suara tersebut baru dibuka pada hari rapat pleno?

673. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Betul.

674. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Baik. Berkaitan dengan adanya dugaan pembukaan apa ... kotak suara di Desa Pakemitan, ada berapa TPS?

675. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

14.

676. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

14, ya berarti ada 14 kotak suara. Tadi Saudara sampaikan bahwa gudang tersebut jaraknya tidak jauh, sekitar 10 atau berapa meter begitu, kan tadi, ya. Berarti untuk ... Desa Pakemitan itu desa keberapa, Pak untuk waktu rekapnya?

677. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Desa yang terakhir.

678. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Desa yang terakhir, ya. Ketika pembukaan kotak untuk desa-desa sebelumnya, ketika gudang dibuka, mengambil kotak suara, apakah pada waktu kotak suara diambil untuk desa yang lainnya, gudang tersebut kemudian dikunci kembali?

679. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Dikunci kembali.

680. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Dikunci kembali. Kemudian, dikunci kembali, pada waktu Desa Pakemitan tentunya gudang dibuka oleh 3 pihak begitu, ya?

681. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Ya.

682. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Dan kemudian itu dibawa. Apakah pada waktu dia dibuka dan dibawa, kotak suara Anda saksikan sendiri dalam kondisi tersegel dan terkunci?

683. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Terkunci dan tersegel.

684. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Terkunci dan tersegel. Itu kotak suara dibawa digeser ke ruang rapat, tadi Saudara sampaikan dijejerkan ada 2 baris, 7 baris, 7 baris. Pada waktu dijejerkan sebelum ada siapa pun yang maju, kotak suara terkunci, ya?

685. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Terkunci dan tersegel.

686. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Terkunci dan tersegel. Saksi kemudian melihat, adanya saksi Pemohon yang maju ke depan, ya?

687. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Betul.

688. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Dari saksi Pemohon. Apa yang dilakukan oleh saksi tersebut sampai kemudian muncul video yang beredar bahwa seakan-akan kabel tiesnya terbuka. Apakah itu dibuka dengan paksa atukah memang terlepas begitu saja?

689. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Dibuka dengan paksa yang kotak suara terdekatnya. Kemudian,lihatkan kepada yang hadir bahwa dia berbicara bahwa mengganggu salah pemasangan kabel tiesnya. Selanjutnya, dia membuka kabel ties yang lainnya.

690. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Oh, selanjutnya dibuka kabel ties yang lainnya, ya. Baik, setelah dibuka, kemudian apakah rapat dilanjutkan atukah melakukan verifikasi terhadap data yang ada di situ?

691. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Setelah kejadian tersebut, setelah kabel ties dibuka, setelah kami menegurnya, kemudian kami mempersilakan kepada Panwascam Kecamatan Cikatomas, yaitu Bapak Haji Utang[sic!] untuk memberikan tanggapannya. Dan beliau memberikan tanggapan bahwa sehubungan kejadian ini telah terjadi, bagaimana kalau rapat pleno ini dilanjutkan untuk melihat membuktikan hasil dari isi yang ada di kotak suara tersebut.

692. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Baik, jadi rapat pleno kemudian dilanjutkan untuk melihat isinya, hasilnya, begitu ya? Apakah ada perbedaan hasil perolehan suara yang ada di dalam kotak maupun yang dipegang oleh panwascam maupun yang dipegang oleh saksi para paslon? Ada perbedaan data tidak hasilnya?

693. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Tidak ada perbedaan data satu pun, baik itu yang di kotak, di panwascam, ataupun di saksi.

694. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Baik, tidak ada perbedaan data. Apakah saksi Pemohon menyatakan keberatan terhadap perolehan suara, ada enggak untuk perolehan suara?

695. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dia tidak tanda tangan, Pak.

696. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Tidak ada ya keberatan untuk itu disampaikan.

697. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Cukup, ya.

698. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Baik. Berikutnya, apakah ada tindak lanjut rekomendasi Bawaslu untuk kasus tersebut?

699. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak sampai ke panwascam tadi.

700. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Tidak ada, ya?

701. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak.

702. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Baik. Dalam kaitan itu, berapa jumlah di Desa Pakemitan jumlah DPT-nya yang Saksi ketahui?

703. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Jumlah DPT-nya 5.180.

704. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

5.180. Baik. Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

705. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dari Pihak Terkait ada pertanyaan?

706. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Ada, Yang Mulia. Terhadap Saksi Agam, pada saat proses rekapitulasi ini kan ada 4 paslon, ya. Nah, pada saat rekap itu, apakah saksi dari Paslon Nomor 1 dan 3 itu ada keberatan terkait rekapitulasi di Desa Pakemitan?

707. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Enggak ada.

708. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Paslon Nomor 1 dan 3, bukan 4, ya.

709. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3 tidak hadir.

710. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Nomor 1 tidak ada, Nomor 3 kebetulan tidak hadir.

711. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Artinya, cuma Nomor 4 ya, yang keberatan.

712. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

713. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Baik. Itu saja untuk mempertegas, Yang Mulia.

714. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Pemohon ada pertanyaan?

715. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRWANDA

Ya, sedikit, Yang Mulia, dari Pak Agam. Pada waktu, Saudara Saksi pada waktu penghitungan suara di tingkat kecamatan itu hari Jumat, benar, ya tanggal 11 Desember 2020?

716. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Betul.

717. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRWANDA

Apakah pada hari itu Panwaslu Kecamatan Cikatomas juga hadir?

718. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Hadir.

719. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRWANDA

Hadir. Apakah dari panwas itu memberikan rekomendasi bahwa menemukan kotak suara, kotak suara yang keadaan kabel ties tidak terpasang secara sempurna?

720. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Tidak, ya.

721. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRWANDA

Karena saya dari keterangan Bawaslu ada (...)

722. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nanti kita dengar Bawaslu.

723. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Baik, Yang Mulia.

724. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Cukup.

725. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRWANDA

Cukup. Ada tambahan dari ... cukup, Yang Mulia.

726. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, ogah-ogahan ini Pemohon yang mendalilkan. Kita buka video itu sebentar coba kayak apa ini, kita buka ya, supaya apa yang dipersoalkan soal segel. Pak Agam? 30 detik diulang, ya? Mana diulang.

PEMUTARAN VIDEO

Ya, ya. Pak Agam itu ya yang dipersoalkan oleh Syaiful, ya?

727. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Ya.

728. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Dari ini ... ini ada Ahli, ya. Kita periksa Ahlinya dulu sebelum ke Hakim nanti. Prof. I Gde Pantja Astawa.

729. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Mohon izin, Yang Mulia. Dari Termohon Dr. Nur Hidayat Sardini.

730. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sori, Pak. Bapak terburu-buru interupsi ini saya mau anu ... Saksi-Saksi bertahan di situ dulu, ya, Pak. Saksi-saksi tunggu nanti ada pertanyaan lagi, Bapak ke belakang Pak Agam, duduk santai di situ dulu. Dr. Nur Hidayat Sardini. Sudah siap, Bapak?

731. AHLI DARI TERMOHON: NUR HIDAYAT SARDINI

Sudah, Yang Mulia.

732. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Bapak agamanya Islam, berkenan berdiri, saya bantu untuk mengucapkan sumpah, tirukan.

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.”

733. AHLI DARI TERMOHON: NUR HIDAYAT SARDINI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

734. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, silakan.

735. AHLI DARI TERMOHON: NUR HIDAYAT SARDINI

Terima kasih.

736. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bapak, bisa memberikan paparan maksimal 10 menit nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, bisa ditambah waktunya. Silakan, Bapak.

737. AHLI DARI TERMOHON: NUR HIDAYAT SARDINI

Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim dalam perkara ini, yang saya hormati Saudara-Saudara Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan/atau Para Ahlinya, yang saya hormati Ahli dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah swt mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya dan sehat walafiat, serta bahagia senantiasa.

Saya akan meringkaskan pendapat atau keterangan sesuai dengan pengalaman dan keahlian saya dengan membatasi pada pokok persoalan, kemudian pemikiran, ketiga analisis, dan akhirnya adalah penutup. Mudah-mudahan 10 menit bisa terjangkau.

Yang Mulia dan hadirin yang berbahagia. Saya diminta oleh KPU melalui Kuasanya untuk kira-kira menjelaskan akan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor Perkara 046, dan seterusnya terkait dengan, ya, tindak lanjut Bawaslu setempat terkait dengan Pasal 71 ayat

(3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu pokok yang dimintakan kepada saya oleh Termohon.

Lalu yang kedua, pemikiran. Tentu ini terkait dengan rangka pemikiran teoritis yang berkenaan dengan sistem keadilan pemilu, ada 3 poin, tapi saya ingin katakan bahwa memilih kandidat itu hal yang mutlak sebagai warga ... sori, maaf, sesuatu hal yang bersifat hak konstitusional warga negara, kemudian wujud dari memilih ... hak memilih tadi adalah yang dikumulasi sebagai kuantifikasi kandidat yang terpilih.

Saya di akhirnya adalah ingin mengutip dari Cicero bahwa negarawan romawi kuno yang mengatakan bahwa suara rakyat adalah hukum tertinggi dalam sebuah negara dan pilihan rakyat adalah pelaksanaan hukum tertinggi itu, kira-kira begitu.

Nah, yang ketiga analisis. Saya diminta seperti yang saya sampaikan tadi terkait dengan rekomendasi surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046 dan seterusnya. Secara kajian formil objek laporan ini ada 3, ya, penerbitan instruksi Bupati Tasikmalaya, dan seterusnya. Yang kedua, surat edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 42 dan seterusnya.

Yang ketiga adalah proses penanganan di Bawaslu dan KPU. Secara objek, peristiwa itu terjadi tanggal 2 dan/atau tanggal 3 September tahun 2020, tetapi yang kemudian dilaporkan kepada Bawaslu setempat, itu antara ... ya itu tanggal 16 Desember 2020, pukul 01.47 WIB. Nah, bagi saya ... saya lihat memang ada jarak waktu yang cukup, padahal undang-undang apa ... Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 itu mengerangkan dan itu adalah juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017 bahwa kerangka waktu untuk laporan itu pada waktu 7 hari, terhitung sejak kejadian, kejadiannya tanggal 2 sampai 3 karena itu menghadap persoalan terkait dengan formil sudah lewat waktu.

Lalu, yang kedua sifat pelanggarannya adalah administratif, apa maknanya bahwa bersifat rekomendatif. Rekomendatifnya itu beda dengan yang bersifat putusan, putusan itu terkait misalnya dengan sengketa proses pemilihan atau kalau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah sengketa proses pemilu.

Nah, itu rekomendatif, makna rekomendatif adalah tidak sepenuhnya mengikat begitu ya, tetapi bersifat fakultatif yang diserahkan kepada penerima rekomendasi ialah Termohon dalam hal ini.

Nah ketiga, keputusan Sentra Gakkumdu dalam hal ini sudah ada yang dinilai Pasal 188, ya, dalam kaitan dengan itu, tidak memenuhi unsur dan dihentikan, tetapi apa ... keputusan Gakkumdu tadi dianggap memenuhi pelanggaran administrasi pemilu.

Nah, Yang Mulia dan Hadirin yang berbahagia terkait dengan status laporan tadi itu memang perlu diuji secara material. Saya

berpendapat memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa.

a. Kebijakan pemerintah pusat.

Jadi perkara yang tadi disinggung, yang saya singgung tadi itu berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan pemerintah pusat adalah kebijakan instansi vertikal ya kementerian, baik Kementerian Agraria dan Tata Ruang, maupun kerja sama ya karena sifatnya adalah tindak lanjut dari surat kerja sama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kepala BPN, kemudian keputusan bersama antara Kementerian Agraria Tata Ruang Kepala BPN tadi dengan Kementerian Dalam Negeri, kemudian Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, itu ada di situ. Kemudian dan karena itu kami apa ... saya, berkeyakinan bahwa ini adalah urusan pemerintahan, wajib pemerintah pusat, gitu ya. Sebagaimana saya maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, 2014, maaf, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, itu adalah urusan pemerintahan pusat yang wajib dilakukan oleh jajaran pemerintahan daerah, apalagi kemudian tiga instansi terkait tadi dan posisi instansi vertikal di bawahnya itu menindaklanjuti sesuai dengan kerangka otonomi daerah.

Nah, Yang Mulia dan Hadirin berbahagia bahwa salah satu kewajiban kepala daerah adalah menindaklanjuti dari keputusan-keputusan maupun kebijakan-kebijakan dari instansi pemerintah vertikal di pusat lalu di daerah untuk menindaklanjutinya.

Lalu yang ketiga, tidak menguntungkan. Adanya unsur tidak menguntungkan dan tidak merugikan, apakah menguntungkan kebijakan itu? Siapa yang diuntungkan? Bagaimana keuntungan itu diperoleh? Dalam posisi ini saya berpendapat bahwa keuntungan itu adalah keuntungan elektoral, keuntungan elektoral adalah keuntungan di mana orang ya pemilih, secara top of mind, itu ingin memilih karena ... karena persoalan yang disampaikan program-program itu. Nah itu harus dibuktikan, apakah dirugikan? Siapa yang dirugikan? Bagaimana kerugian itu diperoleh atau didapat? Cara dan bentuk jenis kerugian itu diperoleh?

Nah, itu pendapat saya, Yang Mulia. Dan diakhirnya penutup, Yang Mulia dan Hadirin yang berbahagia bahwa apa ... rekomendasi Bawaslu ini Nomor 46 dan seterusnya sudah ditindaklanjuti oleh KPU Termohon melalui Berita Acara BA 531 dan seterusnya, tanggal 11 Januari 2021. Dan ini yang penting bahwa ini sudah pernah diuji di MA melalui Putusan Nomor 2P/BAP dan seterusnya, tanggal 28 Januari 2021, oleh Pemohon Saudara Iwan Saputra dan Miptahul Paoz.

Demikian, Yang Mulia yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

738. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Walaikumsalam wr. wb. Dari Termohon, ada yang ditanyakan?

739. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Terima kasih, Yang Mula. Saudara Ahli, berkaitan dengan kewajiban KPU untuk menindaklanjuti. Apakah kewajiban menindaklanjuti tersebut harus sama dan serupa? Ataukah bisa berbeda? Berkaitan dengan adanya rekomendasi.

740. AHLI DARI TERMOHON: NUR HIDAYAT SARDINI

Baik.

741. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Sementara untuk yang putusan kan wajib dilaksanakan, nah, untuk masalah pelanggaran administrasi pemilihan, yang dihasilkan dari proses Per Bawaslu Nomor 8 tentang Pelanggaran Administrasi Pemilihan, apakah KPU wajib melaksanakan secara sama ataukah menindaklanjuti dengan cara tertentu, hasilnya bisa berbeda? Silakan, Ahli.

742. AHLI DARI TERMOHON: NUR HIDAYAT SARDINI

Baik, terima kasih Saudara PH dari Pihak Termohon. Saya ingin definisikan dulu apa pengertian tindak lanjut. Kalau kita kutip dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 yang dibuatkan oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 atau kita sebandingkan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 bahwa tindak lanjut itu adalah proses yang dilakukan bahkan tindak lanjut itu untuk menghentikan, itu sendiri tindak lanjut. Itu pengertian resmi yang dicantumkan di undang-undang ... undang-undang pemilu dan/atau undang-undang pilkada sama, karena dari dulu itu selalu begitu.

Nah, yang kedua bagaimana kedudukan Termohon dalam hal ini untuk apakah ... bagaimana format tindak lanjut itu diserahkan kepada lembaga itu dalam hal ini adalah Termohon, ya, dan yang pasti bahwa itu adalah bersifat istilah saya fakultatif. Fakultatif itu boleh memilih boleh, ya, boleh tidak dalam rangka tindak lanjut. Nah, ketika yang saya lihat bahwa ini sudah ditindaklanjuti oleh KPU sebagai Termohon dalam berupa apa, mengklarifikasi, mengumpulkan bukti-bukti yang kira-kira gitu, ya, supaya meningkatkan kualitas sebenarnya dari penerusan laporan atau rekomendasi tadi yang diajukan oleh Bawaslu setempat dan

kemudian sudah dilakukan. Karena itu saya ingin katakan bahwa rekomendasi itu berbeda dengan sifat putusan.

Kalau putusan itu karena Bawaslu dalam kedudukan sebagai ... ada pelaksana pada bagian tertentu sebagai fungsi yudisial gitu, ya dan dalam hal ini bukan putusan tetapi adalah rekomendasi. Rekomendasi itu artinya tidak mengikat tetapi tidak mengikat 100%. Tetapi kalau saya analogikan kalau waj ... putusan itu wajib, kalau rekomendasi itu sunnah, ya, tapi saya bilang harus sunnah ... suannah muakad lah begitu. sunnah yang ... yang dibuatkan atas kesunnahannya karena itu otoritas sepenuhnya ada di Termohon. Nah, Termohon juga tidak bisa main-main, ya, tapi dia harus memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan KPU yang mengikat. Terima kasih.

743. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Ya, cukup, Prof. Bapak ... ada, Pak Ahli, masih ada?

744. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Baik. Masih ada.

Yang kedua berkaitan dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 tentang Tata Cara Penanganan Administrasi Pemilihan itu dibatasi dalam waktu 7 hari. Nah, kita ketahui bahwa Pasal 71 ayat (3) itu, kan berhadapan pada bab kampanye. Sedangkan laporan misalnya dibuat pada tanggal 16 Desember. Di sisi lain kebijakannya pada tanggal 2 September, jadi waktunya cukup luas. Sementara ketika dia mengajukan dalam perkara sengketa pelanggaran administrasi, Pemohon atau pelapor pada waktu itu mengakui mengajukannya pada tanggal 5 Desember yang berbeda dengan pada tanggal 16 Desember. Laporan itu pun dibuat setelah yang bersangkutan kalah bukan sebelumnya ... sebelumnya begitulah. Nah, dalam kaitan itu bagaimana Bawaslu seharusnya menyikapi suatu laporan yang tidak "curang" begitu, ya, hal yang sebetulnya sudah dia ketahui sejak awal dilaporkan belakangan setelah dia tahu kalah. Apalagi terhadap satu persoalan kebijakan yang sifatnya terbuka, bukan kebijakan yang sifatnya (...)

745. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak ... Pak Ali, jangan Ahli dibawa di apa ... dorong untuk menilai atau me-judge kebutuhan Bawaslu. Tidak etis pertanyaan itu, coba pertanyaan lain ... pertanyaan lain, Pak.

746. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Baik. Saya koreksi, Yang Mulia.

Bagaimana Ahli memahami pengertian batas waktu 7 hari? Masa pelaporan yang diterima oleh Bawaslu terhadap suatu kebijakan yang dibuat oleh petahana. Terima kasih.

747. AHLI DARI TERMOHON: NUR HIDAYAT SARDINI

Baik, terima kasih.

Umum tidak juga harus pada kasus ini, ketentuan Bawaslu yang saya pahami dan sesuai dengan pengalaman saya juga sebagai mantan panwaslu maupun Bawaslu itu wajib, ya, karena ada ketentuan formil 7 hari ... 7 hari sejak kejadian. Kalau sudah sejak kejadian lewat waktu apalagi dengan gambaran seperti itu, ya menurut saya, ya untuk umum saja, ya, saya tidak selalu menginduk pada kasus ini maka, ya batal demi hukum kalau formilnya sudah lewat waktu. Bagaimana penanganan Bawaslu? Itu (ucapan tidak terdengar jelas) sebenarnya, ya melalui peraturan Bawaslu itu ada ketentuan bahwa itu dijadikan temuan. Tetapi jangan lupa bahwa temuan itu pun harus mengkerangkakan merujuk pada limitasi waktu atau pewaktuan ialah itu tadi. Terima kasih.

748. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Baik, terakhir berkaitan dengan tindak lanjut.

Apabila fakta yang ditemukan oleh KPU berbeda dengan Bawaslu, apakah KPU bisa memberikan pendapat yang berbeda terhadap kesimpulan yang dibuat oleh Bawaslu?

749. AHLI DARI TERMOHON: NUR HIDAYAT SARDINI

Baik. Konotasi bahwa fakultatif sepenuhnya otoritas pada penerima rekomendasi ialah Termohon dalam perkara ini dan karena itu, ya, maka bukan suka-suka, ya, tetapi tetap pada ... pada ruang lingkup yang ada melalui prosedur-prosedur yang telah ditentukan. Saya kira itu.

750. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sunnah, ya, Pak.

Cukup. Tadi sudah sekali ... satu lagi. Silakan, Pihak Terkait.

751. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RIDWAN SALEH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Ahli, ini masih berkaitan dengan proses penanganan suatu pelanggaran administratif di mana kemudian muncul rekomendasi Bawaslu, muncul tindak lanjut dari KPU, pihak yang tidak puas

dipersilakan untuk menempuh langkah hukum selanjutnya ke Mahkamah Konstitusi eh ... ke Mahkamah Agung, ya.

Nah, dalam kasus ini sebagaimana tadi Saudara Ahli informasikan bahwa Pemohon sudah menempuh upaya-upaya tersebut. Pertanyaannya adalah masih adakah upaya hukum yang bisa ditempuh terkait dengan pelanggaran administratif ini Saudara Ahli dan kalau masih ada bagaimana dengan menurut Ahli untuk mencari kepastian hukum karena secara undang-undang prosesnya kan sampai mentok di Mahkamah Agung saja, itu bunyi Undang-Undang Pemilihan ya. Nah, ini terkait dengan kepastian hukum. Ada sisi lain yang harus dilindungi kepentingan hukumnya, yaitu kami dari Pihak Terkait kalau ini tidak ada batasannya untuk melakukan upaya hukum kan jadi tidak ada kepastian hukum dan tidak ada perlindungan hukum juga bagi kami.

752. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, sudah. Sudah bisa ditangkap.

753. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RIDWAN SALEH

Silakan Ahli, terima kasih.

754. AHLI DARI TERMOHON: NUR HIDAYAT SARDINI

Ya, terima kasih. Bahwa poin saja, bahwa yaitu adalah MA terakhir, ya untuk melakukan penyelesaian atas perkara ini dan saya percaya bahwa MA sudah melalui prosedur yang ada, toh sudah diputus melalui satu keputusan MA. Nah, apakah kemudian dan seterusnya soal kepastian tentu itu kan justru memastikan menurut saya karena hal semacam ini sebenarnya juga terjadi di ratusanlah pengalaman saya di banyak tempat dan bukan dalam musim pilkada 2020 ini karena itu saya justru memastikan bahwa keputusan MA dalam keyakinan saya sebagaimana juga terjadi pada perkara-perkara lain itu sudah cukup untuk menyatakan seperti itu. Upaya peradilan lain tentu kalau dilihat dari sisi lain ya itu kan ada, ya itu normatif ya ada penanganan pelanggaran pidana, ada penanganan pelanggaran administrasi, ada pelanggaran kode etik. Nah itu silakan dikaji sejauh mungkin kemudian dinilai oleh pihak, kemudian dalam tanda kutip "menguntungkan", begitu. Terima kasih.

755. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Cukup, ya?

756. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RIDWAN SALEH

Cukup.

757. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Cukup, baik. Dari Pemohon, cukup? kayak tidak semangat.

758. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRWANDA

Satu saja, Yang Mulia.

759. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Supaya tidak semangat soalnya.

760. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRWANDA

Baik, Yang Mulia.

761. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi tetap diberi kesempatan.

762. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRWANDA

Baik. Saudara Ahli, saya ingin menanyakan terkait dengan di dalam aturan pemilu itu kan Bawaslu bisa melakukan rekomendasi, ya atau putusan KPU sendiri juga bisa mengkoreksi atau bisa memeriksa kembali. Saya ingin menanyakan Saudara Ahli secara akedemik. Itu kan ada 2 Pak, Bawaslu mempunyai peran sebagai pengawas ya dan kemudian KPU sebagai penyelenggara. Apakah menurut Ahli, baiknya dalam sistem demokrasi kita itu dibuat terintergrasi satu-kesatuan atau memang dua lembaga ini dibiarkan untuk berbeda gitu? Bisa Bawaslu punya keputusan sendiri, KPU bisa mengkoreksi atau seperti apa menurut pandangan Ahli dalam sistem demokrasi negara yang baik itu seperti apa? Baik, terima kasih.

763. AHLI DARI TERMOHON: NUR HIDAYAT SARDINI

Baik, terima kasih. Kalau soal harapan betul kita bisa diskusikan dengan forum lain, ya. Tapi terkait dengan dan saya juga boleh jadi sependapat dengan itu, tetapi pembentuk undang-undang sudah mengerangkan bahwa mekanisme seperti itu. Nah, apakah ini bisa dibikin confuse terhadap satu perkara, saya kira tidak. Karena analogi

dalam proses sengketa baik pemilihan maupun proses sengketa pemilu itu bisa kok secara simultan berjalan. Misalnya dalam ... dalam kasus di Lampung, kasus di Gorontalo, kasus di mana lagi musim pilkada ini juga nyatanya nggak apa-apa. Bahwa kemudian bagaimana baiknya tentu ini ranah pembentuk undang-undang dan saya sangat boleh jadi setuju juga bahwa ada perbaikan, tapi dalam forum ini hanya itu yang bisa saya jawab. Terima kasih.

764. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, dari Hakim ada? Cukup? Oh, silakan!

765. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya ke Saksi dulu Agam Sandi.

766. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Agam, Saksi? Pak Agam saksi, masih ada?

767. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Ada, Yang Mulia.

768. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, Bapak bicaranya agak kuat, Pak! Miknya agak dekat. Silakan!

769. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Pak Agam tadi sempat menyaksikan video yang diputar itu? Pak Agam? Apakah sempat menyaksikan video yang tadi diputar?

770. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Ya, Yang Mulia.

771. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Agak keras suaranya! Kurang jelas.

772. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Melihat.

773. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Gimana?

774. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Agak kuat!

775. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Melihat, Yang Mulia.

776. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Melihat. Ini kalau saya baca di dalam apa ... kesaksian tertulis ini ada di poin 7, itu dinyatakan bahwa rapat Pleno rekapitulasi tingkat kecamatan Cikatomas dan seterusnya itu kemudian saksi pasangan Calon Nomor Urut 4 secara tiba-tiba menarik dengan paksa salah satu kotak suara yang telah disusun rapi dan tersegel dikarenakan saksi pasangan Nomor Urut 4 tersebut berpendapat bahwa kab ... kabel ties kotak suara tidak terpasang dengan rapi. Selanjutnya, saksi pasangan Nomor Urut 4 membuka kotak suara lain secara paksa sebanyak 14 kotak suara dari 14 TPS di Desa Pakemitan. Pertanyaan saya adalah apakah video tadi itu direkam setelah ini terjadi? Peristiwa ini terjadi atau bukan?

777. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Setelah itu terjadi, Yang Mulia.

778. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Jadi, video itu diambil setelah dibuka paksa oleh sepasangan saksi nomor urut 4?

779. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Ya, betul.

780. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Betul, ya? Jadi bukan itu diambil sebelum peristiwa ini, ya? Tapi justru karena peristiwa ini baru diambil video itu?

781. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Ya.

782. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Betul, ya?

783. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Betul.

784. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Itu pukul berapa itu kira-kira video diambil? Ingat enggak?

785. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Sekitar Pukul 20.30, Yang Mulia.

786. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Pukul 20.30, emang itu pasangan calon ... Saksi Pasangan Calon Nomor 4 masih hadir?

787. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Hadir.

788. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Hadir? Bukan, maksud saya ketika video itu diambil, saksinya masih ada?

789. SAKSI DARI TERMOHON: AGAM SANDI

Ada, Yang Mulia.

790. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ada, ya? Oke. Saya kira untuk saksi Pak Agam saya kira cukup, ya. Saya ke Saksi Bapak Kepala BPN (...)

791. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Yang Mulia, boleh izin saya menyela?

792. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Suwardi?

793. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Sekiranya saya bisa meninggalkan tempat (...)

794. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh masih.

795. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Oh ya.

796. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh sebentar, Bapak, sebentar lagi.

797. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Ya, ya. Siap, siap, siap.

798. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ahli nanti saya juga ada satu pertanyaan Ahli bisa tunggu sebentar.

799. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Suwardi, ada tambahan?

800. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik Pak. Pak Suwardi, ini terkait dengan PTSL ini tadi Bapak mengatakan target 2019 itu kurang-lebih 57.000, ya?

801. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Ya, Yang Mulia.

802. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Itu hanya untuk Kabupaten Tasikmalaya saja atau untuk seluruh Indonesia?

803. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Untuk Kabupaten Tasikmalaya.

804. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kabupaten Tasikmalaya. Nah, 57.000 itu tahun 2019, terpenuhi tidak target itu?

805. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Terpenuhi, Yang Mulia.

806. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Terpenuhi, ya? Pada waktu 2019 itu termasuk dengan tanah wakaf atau belum?

807. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Termasuk, Yang Mulia.

808. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Sudah termasuk? Nah, ini kalau bicara proses teknis dari Pemda memang nanti mudah-mudahan ada saksi dari Pemda supaya bisa diklarifikasi. Nah, Bapak sejak kapan jadi Kepala BPN di Tasik, Pak?

809. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

19.

810. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

2009[Sic!] itu bulan apa, Pak?

811. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Bulan Maret 2019.

812. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Bulan Maret?

813. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Ya.

814. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Nah, pada waktu ini kan sebenarnya kedudukan BPN ini kan secara vertikal ya? Dia tidak diotonomikan, ya?

815. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Ya, Yang Mulia.

816. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Dalam melakukan fungsi koordinasi dengan pemerintahan daerah, Pemda, apakah dari BPN itu kanwil itu mekanismenya harus ke provinsi dulu, baru ke kabupaten kota, atau boleh dari misalnya kepala kantor di tingkat kabupaten, kepala BPN kabupaten dan kota bisa langsung? Dalam kaitan PTSL ini, Pak.

817. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Bisa langsung, Yang Mulia (...)

818. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Bisa langsung (...)

819. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Sesuai koordinasi dengan pemerintah daerah setempat.

820. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Jadi tidak mesti harus melalui provinsi, ya?

821. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Tidak, Yang Mulia.

822. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke sejak Bapak jadi kepala BPN di Tasik, bagaimana bentuk apa koordinasi dengan Pemda? Apakah misalnya Bapak mengajukan surat ke Pemda atau dengan sendirinya Pemda tahu ada program ini?

823. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Izin, Yang Mulia. Jadi dengan adanya surat dari BPN Pusat, kami melapor ke Pemda dan saya beritahukan ke Pemda, Pak.

824. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Bapak melapor?

825. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Ya.

826. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Itu datang langsung atau bersurat, Pak?

827. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Saya datang langsung.

828. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh datang langsung? Bertemu siapa? Bupatinya? Pak, Pak Suwardi ke datang langsung itu bertemu Bupatinya, Wakilnya atau Sekdanya?

829. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Bertemu dengan sekretarisnya Pak Bupati, bertemu dengan Pak Sekdanya (...)

830. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh jadi ada sekretaris Pak Bupati juga dengan Sekmildanya, ya? Oke. Jadi pada waktu Bapak kesana, apa percakapannya? Ini, ini pada tahun 2019 atau sudah 2020 waktu Bapak kesana?

831. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Saya hal-hal 2019, saya melapor, saya sudah dilantik dan programnya ini selain TPS-nya banyak, programnya saya sampaikan ke beliau, ke Pak Bupati. Di tahun 2020, itu pun juga kami laporkan program-program BPN di Kabupaten Tasikmalaya. Seluruh program, kegiatan-kegiatan BPN seperti halnya pengadaan tanah, perluasan tanah, (ucapan tidak terdengar jelas) tanah, PTSL untuk kami memohon agar program target kami berfokusnya PTSL tercapai.

832. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke itu 2019, ya?

833. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Sama, sama Pak 2019 dan 2020.

834. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke 2019. Nah ini tadi kalau tidak salah ada instruksi Bupati, ya, tindak lanjut dari program percepatan pendaftaran tanah yang PTSL ini, Pak, ya? Itu keluar setelah Bapak bertemu bupati quote and quote lewat sekda dan sekretarisnya tadi baru keluar surat instruksi itu atau surat edaran itu atau sudah keluar sebelum Bapak bertemu?

835. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Belum keluar, Pak.

836. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Belum keluar, ya.

837. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

(Suara tidak terdengar jelas) koordinasi baru mohon bantuan ke ... baik ke Pak Sekda atau baik ke Pak Bupati maupun Pak Sekda untuk memberikan ... apa namanya (...)

838. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Surat edaran?

839. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Ya, untuk memberikan agar target kami tercapai, Pak.

840. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Jadi, sebenarnya ini inisiatif Bapak sebagai kepala BPN datang ke pemerintah daerah bahwa ada program percepatan ini ya, soal sertifikasi ini. Oke, saya kira dari saya cukup sekian untuk Pak Suwardi. Terima kasih.

Saya mau ke Ahli sebentar.

841. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Suwardi tunggu sebentar, ya, nanti mungkin ada dari Hakim lain. Silakan, Ahli.

842. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Pak Ahli, satu saja. Dalam kaitan dengan hubungan pusat dan daerah, Pak. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu kan ada urusannya yang dilimpahkan kepada daerah tetapi ada yang menjadi kewenangan pemerintah pusat ya dalam urusan pemerintahan.

Nah, dalam kaitan dengan ini, apakah Bapak bisa membantu mendeskripsikan, apakah urusan pertanahan ini masuk domain pemerintah daerah atau pemerintah pusat? Karena tadi kalau mungkin Bapak sempat mendengar ada pertanyaan saya terkait dengan kepala BPN itu mereka hanya melakukan fungsi koordinasi. Bisa digambarkan tentang utusan pemerintahan ini? Terima kasih. Suaranya belum ada, Pak.

843. AHLI DARI TERMOHON: NUR HIDAYAT SARDINI

Baik, Yang Mulia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah itu ada beberapa pasal, gitu ya, dan bahkan menurut saya agak detail tentang urusan-urusan baik di level pusat karena semua karena bagian atau konsekuensi dari negara kesatuan maka sebenarnya semua hal itu kewenangan ada di pusat. Otonomi daerah maupun ... apa itu ... ditransfer ke daerah, ya. Otonomi daerah, desentralisasi, itu ada 3. Desentralisasi finansial, desentralisasi administrasi, dan desentralisasi fiskal.

Nah, kemudian ini adalah terkait dengan desentralisasi vertikal dan kaitannya dengan permasalahan pertahanan itu, itu adalah urusan pemerintahan wajib yang dilimpahkan kepada daerah atau yang diselenggarakan oleh daerah berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014. Karena itu, maka kemudian instansi vertikal yang menangani urusan gini ya karena itu adalah memang kewenangan dari pemerintah pusat, pemerintah adalah pemerintah pusat. Ketika kemudian disebut daerah, maka adalah pemerintah daerah. Itu sebagaimana kita tahu ada SKB 3 menteri yang yang merupakan kerjasama padahal adalah program Pak Presiden termasuknya yang dipercepat karena melihat perkembangan proses sertifikasi tanah dan seterusnya terkait dengan masalah agraria itu belum rampung dan komitmen pemerintahan sekarang adalah melaksanakan dengan begitu detail dan kemudian disusullah surat keputusan bersama antara 3 menteri, Menteri Agraria dan seterusnya, Menteri Agama terkait dengan keagamaan, dan seterusnya.

Singkat kata, Yang Mulia. Bahwa ini adalah urusan wajib pemerintah ya yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah, semua pemerintah daerah. Terima kasih, Yang Mulia.

844. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ketua.

845. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Untuk saksi, saya sudah cukup. Ahli tadinya juga saya siapkan pertanyaan, tapi karena tadi Ahli sudah pamit, saya khawatir ada ... ada tempat lain yang sudah mengagendakan kembali untuk Ahli. Kalau saya tahan Bapak-Bapak ... saya tahan Bapak agak lama, nanti dianggap menghalangi kesempatan jadi ahli.

846. AHLI DARI TERMOHON: NUR HIDAYAT SARDINI

Memang mau mengajar, Yang Mulia.

847. KETUA: ASWANTO

Baik.

848. AHLI DARI TERMOHON: NUR HIDAYAT SARDINI

Terima kasih, Yang Mulia.

849. KETUA: ASWANTO

Kalau mengajar bisa ditunda, Pak. Kalau ahli yang ndak bisa ditunda.

850. AHLI DARI TERMOHON: NUR HIDAYAT SARDINI

Terima kasih, Yang Mulia. Baik.

851. KETUA: ASWANTO

Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia.

852. AHLI DARI TERMOHON: NUR HIDAYAT SARDINI

Terima kasih, Yang Mulia. Izin.

853. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Wah, saya jadi tidak bertanya juga ini. Baik. Saya satu ... Bapak mau buru-buru, silakan, Pak. Sebenarnya ada pertanyaan dari Pak Ketua Panel tadi dengan saya juga mau tanya juga. Tapi ya sudah, mungkin nanti melalui Ahli yang lain.

854. AHLI DARI TERMOHON: NUR HIDAYAT SARDINI

Ya.

855. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak.

856. AHLI DARI TERMOHON: NUR HIDAYAT SARDINI

Mohon pamit, Yang Mulia. Salam.

857. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Mari, Pak. Pak Suwardi, Saksi? Pak Suwardi?

858. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Izin. Masih, Yang Mulia.

859. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Pak, yang target 2019 berapa tadi, Pak? Tolong diulang?

860. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Target 2019=57.000.

861. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pas itu? Bulat, Pak?

862. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Ya, Pak?

863. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bulat 57.000.

864. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Ya.

865. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau 20?

866. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Kalau 20 target sertifikasinya 66.442

867. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

2021, Pak?

868. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Tahun 2021 targetnya 120.000.

869. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

120.000, ya?

870. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Ya.

871. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, terima kasih, Pak. Jadi, untuk Saksi, semua sudah selesai. Silakan bisa meninggalkan (...)

872. SAKSI DARI TERMOHON: SUWARDI

Terima kasih, Yang Mulia.

873. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, baik, Pak. Sekarang kita dengarkan Saksi Pihak Terkait.

874. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Yang Mulia, kami mengajukan bukti tambahan tadi melalui sekretariat, termasuk juga alat bukti keterangan Ahli dari Prof. Asep Warlan dan Ibu Titi Anggraini. Terima kasih, Yang Mulia.

875. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, Dr. H, Mohamad Zen. Sudah hadir? Saksi Dr. Mohamad Zen?

876. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT:

Sudah hadir, Majelis.

877. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kusnanto, S.Sos.?

878. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT:

Hadir semua.

879. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Panji Permana? Panji Permana? Kuasa Hukumnya jangan di situ, Bapak yang mundur, ya. Bapak berpindah supaya saksinya kelihatan. Berdiri semua, Pak, beridir, Bapak. Nah, Pak Mohamad Zen yang mana? Angkat tangan, Pak. Oke, terima kasih. Pak Kusnanto? Pak Panji? Baik, agamanya semua Islam ya, Pak? Baik. Mana Rohaniwannya? Bapak ada di samping menghadap ke barisan. Baik, angkat ... Alqurannya taruh di atas, baik. Tirukan saya, saya bantu lafalnya, Bapak-bapak.

"Bismillahirrahmaanirrahiim."

880. SELURUH SAKSI DARI PIHAK TERKAIT:

Bismillahirrahmaanirrahiim.

881. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Diulang ya Pak, ya? Supaya kompak.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

882. SELURUH SAKSI DARI PIHAK TERKAIT:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

883. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, duduk kembali. Pihak Terkait, siapa dulu yang akan didengar?

884. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Baik, Yang Mulia. Saksi pertama, Bapak Mohamad Zen, Yang Mulia.

885. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini mau menjelaskan apa ini?

886. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Bapak Mohamad Zen akan menjelaskan yang pertama berkaitan dengan koordinasi sertifikasi tanah wakaf yang tadi disampaikan oleh (ucapan tidak terdengar jelas), Yang Mulia.

887. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, oke. Terus, kalau Kusnanto?

888. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Pak Kusnanto akan menjelaskan 4 hal, Yang Mulia. Yang pertama tentang itu, yang ke-2 tentang penyusunan APBD Kabupaten Tasikmalaya, Yang Mulia.

889. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang mana?

890. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Bapak Muhammad Zen, Yang Mulia.

891. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh.

892. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Kemudian, Beliau juga akan menjelaskan tentang dana-dana penanganan Covid-19 Kabupaten Tasikmalaya termasuk tentang RT Siaga, serta netralitas ASN, Yang Mulia.

Kemudian untuk Bapak Kusnanto, Yang Mulia, karena Beliau ini adalah Camat Singaparna dan Ketua Forum Camat se-Kabupaten Tasikmalaya, Beliau akan menjelaskan tentang ... yang pertama masih tentang sertifikasi tanah wakaf, Yang Mulia, koordinasi di tingkat kecamatannya bagaimana, kemudian juga terkait dengan tuduhan-tuduhan dari Pemohon untuk penyalahgunaan apa ... dana Covid tingkat kecamatan, Yang Mulia. Kemudian (...)

893. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, satu-satu dulu, Pak.

894. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Ya.

895. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nanti kita ... kalau apa ... saksinya itu Bapak bisa (...)

896. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Baik, Yang Mulia.

897. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, Pak Mohamad Zen, Sekda, ya? Sekretaris Daerah, ini?

898. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Betul, Yang Mulia.

899. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Bapak, maju ke depan, Pak. Pak Mohamad Zen, baik. Maju, Pak. Duduk, Pak. Duduk, Pak, silakan. Pak Sekda, bisa dites suaranya?

900. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Cek.

901. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, oke. Bapak akan menceritakan tentang apa ini? 4 hal pokok ... singkat-singkat saja, Pak, silakan.

902. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

903. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Walaikumsalam wr. wb.

904. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Terima kasih, Yang Mulia. Saya, Mohamad Zen, Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, diberi kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi terhadap Termohon tentang beberapa hal yang ada kaitannya dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang diantaranya sertifikasi tanah wakaf.

Sertifikasi tanah wakaf yang merupakan kebijakan pemerintah pusat di daerah yang bertanggung jawab Badan Pertanahan Nasional setempat. Hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri Agraria, Kepala BPN

tentang percepatan dan pensertifikasian tanah wakaf. Tanah tempat peribadatan di seluruh Indonesia.

Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Tasikmalaya, berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengenai pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf. Pada bulan Januari 2020, saya selaku sekda, menerima kunjungan kepala BPN dengan tim yang bermaksud meminta untuk mendapat dukungan dari pemerintah daerah agar pelaksanaan sepakat sesuai target pemerintah pusat.

Pada tahun 2019, PTSL di Kabupaten Tasikmalaya atau pendaftaran tanah sistematis lengkap di Tasikmalaya belum mencapai target maka saya atas nama ... atas informasi tersebut, memerintahkan ke bagestra[sic!] untuk menindaklanjuti dengan merancang kebijakan dalam upaya percepatan sertifikasi tanah wakaf. Namun akibat Covid-19, hal tersebut da ... belum dapat diselesaikan. Pada akhir bulan Agustus, kepala BPN dan tim berkoordinasi kembali dan menyampaikan bahwa pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf masih belum mencapai target. Setelah itu, saya memerintahkan asisten administrasi umum untuk melakukan rapat koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional, kantor kementerian Agama, Majelis Ulama, Dewan Masjid Indonesia dan tokoh agama. Hasil rapor direkomendasikan diterbitkannya intruksi dan surat edaran bupati mengenai percepatan persertifikasian tanah wakaf di Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan demikian, Yang Mulia, proses dan penerbitan intruksi dan surat edaran bupati Tasikmalaya, tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Tasikmalaya.

905. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, ya.

906. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Dan pada waktu (...)

907. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah, Pak.

908. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

2021 (...)

909. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak. Bapak. Berkaitan dengan itu, sudah. Sekarang yang berikutnya, keterangan apa?

910. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Tentang kebijakan anggaran, Yang Mulia.

911. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, anggaran. Bagaimana anggaran?

912. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Selanjutnya, Yang Mulia. Berkaitan dengan kebijakan anggaran, pemerintah Tasikmalaya, saya akan sampaikan hal-hal pokok sebagai berikut. Yang pertama. Bahwa proses tahapan mekanisme penyusunan APBD dan APBD perubahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satunya ... diantaranya, Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020. Diawali musrembang tingkat desa, kecamatan, tingkat kabupaten dan diintegrasikan dengan rencana kerja pembangunan daerah. Tim anggaran pemerintah daerah, atau APD melakukan pembahasan secara rinci tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas laporan anggaran sementara. Kemudian KUA PPAS disampaikan kepada DPRD untuk di bahas oleh banggar dan komisi-komisi DPRD. Kemudian dalam rapat paripurna DPRD, disepakati rancangan KUA PAS. Rancangan KUH PPAS menjadi dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang (...)

913. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, sebentar. Ini (...)

914. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Pelanggaran (...)

915. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Se ... sebentar, Pak.

916. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Undang-undang daerah APBD 2020 (...)

917. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak ... Pak

918. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Dengan disampaikan oleh bupati kepala DPRD

919. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebentar, Pak. Sebentar, Bapak. Setop dulu. Ini di (...)

920. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Baik, Yang Mulia.

921. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Didalilkan tidak anggaran pemerintah daerah itu?

922. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Kami buktikan, Yang Mulia.

923. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Didalilkan Pemohon tidak?

924. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Didalilkan, Yang Mulia.

925. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di nomor berapa?

926. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Pada awal-awal permoho ... di perbaikan permohonannya itu, Pemohon telah menuduh tentang adanya penyusunan APBD yang seolah-olah kemudian di ... dimaksudkan (...)

927. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di halaman berapa itu di permohonan perbaikan? Jangan negelantur-ngelantur kalau ... tahu tidak ngelantur. Kalau yang ... dalil yang di keterangan tadi itu kan, relevan sekali dengan apa yang di ... kalau soal penyusunan APBD ini, ada tidak dipersoalkan Pemohon? Pemohon merasa tidak? Dimana?

928. KUASA HUKUM PEMOHON: TONNY IRAWAN

P halaman 19 sampai 30, Yang Mulia.

929. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa itu dalilnya? Dalilnya apa?

930. KUASA HUKUM PEMOHON: TONNY IRAWAN

9 ... poin 9 bahwa tindakan TSM dengan pemanfaatan APBD untuk kepentingan menyukseskan pemenangan Paslon Nomor 2, Yang Mulia.

931. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

He eh.

932. KUASA HUKUM PEMOHON: TONNY IRAWAN

Sebelumnya telah direncanakan dengan matang oleh Calon Nomor 2 yang dapat dilihat dari peningkatan anggaran sejak tahun 2019 dan APBD 2020 berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2019 (...)

933. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Pak Sekda, kalau penjelasan Bapak kan APBD-nya justru malah turun jadi 2020, ya? Jawab, Pak

934. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Ya, Pak.

935. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Turun, ya? Oke. Apalagi yang mau dijelaskan soal anggaran Bapak? Jadi tidak ada ... ini ada ... ada benar, ada tidak kaitan antara

proses penyusunan anggaran terlepas itu outputnya itu naik atau turun tapi dengan dugaan yang didalilkan Pemohon bahwa ada nuansa-nuansa karena mau pencalonan kembali petahana. Ada tidak itu?

936. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Tidak ada, Yang Mulia.

937. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ada, di pembahasan juga tidak ada misalnya ada anggaran yang kemudian seolah-olah ini anggaran yang tidak relevan, kemudian dibuat-buat seolah-olah menjadi pokok ataukah sebaliknya yang ... ataukah pokok-pokok mata anggaran yang baru yang kelihatannya seperti rekayasa begitu ada tidak?

938. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Tidak ada, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia, sedikit menjelaskan (...)

939. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak, Pak. Kalau Bapak membuat banyak sekali keterangan Bapak ini. Kami hanya ingin pokok-pokoknya saja. Kalau itu didalilkan Pemohon bahwa ada dugaan dari Pemohon yang mengatakan bahwa TSM ... TSM itu ada proses-proses yang berkaitan dengan penyusunan anggaran di Kabupaten Tasikmalaya yang ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan petahana ini di dalam pencalonan kembali sebagai bupati. Itu esensinya itu saja, Pak. Nah, ada tidak, Bapak selaku sekda ... sekda itu kan kepala rumah tangga pemerintah daerah. Di dalam penyusunan itu, ada tidak? Bapak sudah disumpah tadi.

940. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Tidak ada, Yang Mulia.

941. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ada. Bapak banyak sekali keterangannya. Terus apalagi, Pak, yang ... yang ... apa ... yang krusial yang akan dijelaskan? Soal anggaran sudah. Kemudian yang berikutnya mengenai apa?

942. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Berkaitan dengan penanganan Covid, Yang Mulia.

943. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, silakan! Bahan Covid singkat saja, Pak!

944. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Terima kasih, Yang Mulia. Dalam upaya penanganan Covid-19, dibentuk gugus tugas penanganan Covid-19 secara berjenjang. Mulai gugus tugas penanganan Covid-19 tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa dan tingkat rumpun tetangga yang disebut RT Siaga. Yang menjadi dasar pembentukan gugus tugas penanganan covid-19, yaitu Keppres Nomor 7 Tahun 2020. Gugus tugas tingkat kabupaten mencakup forkopimda plus. Di tingkat kecamatan dan desa disesuaikan dengan gugus tugas tingkatannya. Selanjutnya untuk menjangkau lingkungan terkecil, maka dibentuk gugus tugas tingkat RT yang disebut RT Siaga. Itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penanganan Covid di Kabupaten Tasikmalaya. Jadi kami lakukan dari semua tingkatan tertentu (...)

945. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, sampai ke tingkat RT, ya, Pak.

946. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Ya, betul, Yang Mulia.

947. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada anggaran-anggaran yang diturunkan sampai ke tingkat RT tidak, Pak, untuk Covid ini?

948. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Ada, Yang Mulia.

949. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada?

950. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Ada.

951. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Melalui camat, ya?

952. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Betul, Yang Mulia.

953. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, kalau ada ... apa ... penyerahan uang kepada RT Siaga ini konteksnya untuk ... apa ... insentifnya RT Siaga ataukah untuk keperluan lain, dalam konteks covid itu?

954. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Untuk operasional, Yang Mulia.

955. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Berapa itu?

956. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Karena (...)

957. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Berapa, Pak?

958. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Sekitar Rp500.000,00.

959. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Per apa? Per bulan?

960. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Eenggak, per-3 bulan, Pak.

961. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Rp500.000,00 per-3 bulan, ya?

962. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Betul, Yang Mulia.

963. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi tadi saksi ... sebentar, Pak, saya klir kan dulu.
Saksi ... Susilo Firdaus tadi, RT Siaga, dia menerima Oktober, November, September, Pak. Tiap bulan Rp500.000,00, Rp500.000,00. Bagaimana, Pak?

964. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Tidak benar, Yang Mulia.

965. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Hah?

966. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Tidak benar, Yang Mulia. Tidak benar.

967. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bapak kan tidak tahu ini.

968. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Ya.

969. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Makanya saya tidak ... hanya ... apa ... sebenarnya untuk memperbandingkan saja. Kok di ... di 21 September terima Rp500.000,00, 19 Oktober Rp500.000,00. 26 November, Rp500.000,00. Nah, melalui camat, betul. Hanya di sana, Bapak mungkin tidak tahu. Tadi kan ceritanya oleh Pak Sekdes, "Tolong dibantu, Pak Camat, untuk mendukung Paslon Nomor 2." Bapak, enggak tahu ya, Pak?

970. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Tidak tahu, Yang Mulia.

971. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Enggak tahu. Bukan tidak ada, Pak. Oke. Tapi yang jelas dari kabupaten sendiri, Rp500.000,00 itu adalah per-RT Siaga, per-3 bulan, ya, Pak?

972. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Betul, Yang Mulia.

973. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh. Bukan kemudian diserahkan sebelum pilkada itu 3 kali itu untuk 9 bulan begitu, Pak? Tidak? Tapi dikasih (ucapan tidak terdengar jelas), di depan? Tiap bulan, tiap bulan.

974. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Ya, seperti ... ya (...)

975. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada, enggak? Ada ... apa ada tidak policy seperti itu dari kabupaten? Ini insentif (...)

976. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Ada ... terkait dengan SK-nya, Pak.

977. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada?

978. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Ya.

979. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada bagaimana, Pak? Apakah yang mestinya 3 bulan sekali diberikan di depan karena menjelang-menjelang pilkada itu?

980. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Tidak, Pak.

981. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, itu. Kok (...)

982. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Tetap kami sesuai dengan waktu yang diberikan. Jadi, kami (...)

983. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tiga bulanan?

984. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

(Suara tidak terdengar jelas) keluar waktunya, betul. Karena melalui (suara tidak terdengar jelas) bupati.

985. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, itu dia. Itu uang lain, ya? Enggak ada lagi selain yang Rp500.000,00, Rp500.000,00 yang lain tidak ada, Pak untuk insentif yang lain ... untuk insentif yang lain?

986. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Kalau insentif di RT itu adalah per bulan Rp250.000,00.

987. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

RT? RT?

988. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Itu per bulan. Itu sudah (...)

989. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Enggak, Pak ini konteksnya RT, RT Siaga, Pak.

990. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Ya, betul, ya betul.

991. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Beda, beda kalau itu kan memang semacam salary begitu, gaji, ya, gaji atau honor.

992. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Betul, Pak yang per bulan Rp250.000,00.

993. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Honor kalau itu, ya.

994. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Ya, beda ini untuk operasional RT Siaga, jadi bukan untuk 1 orang Pak RT, tapi untuk semua di RT Siaga itu.

995. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saya jadi RT enggak pernah dapat gaji. Oke, Pak Sekda apa lagi yang mau dijelaskan yang penting?

996. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Baik, Yang Mulia. Terakhir, mungkin saya sampaikan tentang berkaitan dengan netralitas ASN. Saya selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya bepegang teguh pada aturan yang sudah ditetapkan tentang netralitas ASN untuk Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya dikuatkan dengan diterbitkan surat edaran Bupati Tasikmalaya tentang netralitas ASN di lingkungan pemerintah Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2020 pada tanggal 24 Februari. Maka dapat dipastikan tidak ada pengarahannya dan penggiringan kepada seluruh ASN yang jumlahnya 12.400 orang ASN untuk memilih salah satu pasangan calon.

997. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ada.

998. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Adapun 2 orang ASN yang sudah dinyatakan bersalah di pengadilan dengan hukuman ringan itu bersifat personal dan tidak ada perintah dari siapa pun.

999. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

1000. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Mungkin itu, Yang Mulia.

1001. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, sudah disiasati dengan adanya surat edaran? Dipastikan.

1002. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Betul, Yang Mulia.

1003. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan dipastikan, Pak, seharusnya kan tidak ada, begitu. Buktinya memang ada. Itu salah satu camat itu, ya, Pak?

1004. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Ya.

1005. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau yang sampai ke pengadilan apa, Pak?

1006. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Mantan camat sama satpol PP, Pak.

1007. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh. Apa putusannya pengadilan, Pak?

1008. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Dengan hukuman ringan membayar denda, Pak, Yang Mulia.

1009. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Denda, Pak ya?

1010. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Ya.

1011. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sekarang ada tindakan lain dari pemerintah daerah selain putusan pengadilan?

1012. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Sebetulnya Pak Camat Jatiwaras itu memang kejadiannya tanggal 22 November, namun dia itu dalam kondisi mungkin dalam suasana kebatinan dia sudah menerima SK pensiun. Karena sejak tanggal 1 Desember Pak Camat Jatiwaras itu masuk pensiun, Pak, jadi dia sudah ketika dihukum itu dalam posisi mantan camat, bukan camat, Yang Mulia. Terima kasih.

1013. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Tapi SK-nya kan TNT-nya desember, ya?

1014. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

1 Desember, Yang Mulia.

1015. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, tapi ketika tanggal 20 November masih menjabat?

1016. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Betul, Yang Mulia.

1017. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kok mantan kalau begitu?

1018. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Ya, maksudnya sekarang ketika dihukum, Yang Mulia.

1019. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, sekarang ya karena sudah 21. Oke, Pak. Nanti mungkin ada tambahan lagi dari ... saya ke Pak Saksi berikutnya, Bapak berkenan ke belakang dulu Pak Sekda.

1020. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Terima kasih, Yang Mulia.

1021. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, jangan pulang dulu, Pak, ini masih ada yang ditanya nanti. Ini kalau sekda ini pejabat daerah. Bapak di mana ini saksi berikutnya? Kusnanto, S.Sos.

1022. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Siap, Yang Mulia!

1023. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa jabatan Bapak ini?

1024. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Jabatan saya, Pak, Camat Singaparna.

1025. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Camat mana?

1026. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Camat Singaparna.

1027. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Singaparna. Camat Singapura ini sebenarnya. Kalau di sana pada-pada apa itu ... jadi paradoks, ejekan, bercanda. Gimana, Pak? Mau menjelaskan apa Bapak?

1028. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Baik, terima kasih, Yang Mulia, saya akan menjelaskan terkait dengan percepatan persetifikatan tanah wakaf sesuai instruksi bupati.

1029. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1030. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Kami menindaklanjuti di tingkat kecamatan dengan melaksanakan sosialisasi melalui rapat koordinasi yang dihadiri oleh danramil, kapolsek, kepala kantor urusan agama kecamatan, ketua MUI kecamatan, ketua DMI kecamatan, pimpinan (ucapan tidak terdengar jelas) yang ada di kecamatan, kemudian juga pak kepala desa.

1031. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

1032. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Kami sampaikan bahwa percepatan (...)

1033. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Suaranya engga ada, Pak Camat?

1034. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Baik, selanjutnya juga dari rapat tersebut (...)

1035. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Miknya agak dekat, Pak! Itu miknya bisa didekatkan. Agak kuat bicaranya Bapak.

1036. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Baik, baik. Dalam kegiatan rapat tersebut, kami sampaikan tentang mekanisme proses pendaftaran juga alur setelah pendaftaran langsung disampaikan ke KUA, seperti itu. Jadi, yang mengeluarkan akta ikrar wakaf adalah KUA. Dalam kegiatan tersebut tidak ada sama sekali

mengajak ataupun menggiring kepada yang hadir dalam rapat untuk memilih salah satu pasangan calon.

1037. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Enggak ada, ya. Sebentar, Pak. Itu kapan Bapak mengajak apa itu ... Muspika itu, kapan itu?

1038. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Ya, tanggal 7 itu.

1039. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

7?

1040. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Tanggal 7 Desember.

1041. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Desember tahun?

1042. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

2020.

1043. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

2020?

1044. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

7 September.

1045. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

September 2020, ya. Berapa ... mana yang lebih dulu dengan surat edaran bupati ... instruksi?

1046. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Ya. Lebih dulu surat instruksi bupati, tanggal 2 September.

1047. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, tanggal 2 September. Bukan karena mau pilkada supaya lebih semangat dan dipercepat?

1048. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Bukan, Yang Mulia.

1049. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan, ya.

1050. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Karena memang mungkin (suara tidak terdengar dengan jelas) tidak hanya ... tidak untuk perorangan, tetapi untuk lembaga. DKM, pesantren, dan juga madrasah.

1051. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, ya. Tidak ada, ya?

1052. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Tidak ada.

1053. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bapak jadi Camat Singaparna sejak kapan?

1054. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Sejak September 2019.

1055. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

2019. 2019 sudah ada belum percepatan sertifikasi tanah wakaf ini?

1056. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Belum.

1057. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tadi kata BPN sudah ada. Apakah sampai ke Singaparna?

1058. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Singaparna belum, Pak.

1059. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Belum, benar?

1060. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Tidak semua.

1061. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

50.000 ... 57.000, Pak. Belum mencapai ke Singaparna yang 2019?

1062. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Yang pada saat saya menjabat itu belum pernah saya.

1063. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Belum.

1064. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Belum.

1065. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau di Singaparna sendiri untuk yang 2020 targetnya berapa, Pak? Bapak proyeksikan berapa?

1066. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Itu targetnya tidak ... tidak ada target, Yang Mulia.

1067. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ada target.

1068. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Yang jelas kami hanya menyampaikan sosialisasi agar (...)

1069. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. 2019, Bapak belum mendapat instruksi untuk percepatan wakaf, ya, sertifikasi itu, ya?

1070. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Belum.

1071. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Belum, baru 2020 ... di 2020 bulan 9, ya?

1072. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Betul.

1073. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Apa lagi yang mau dijelaskan, Pak?

1074. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Kaitan dengan bantuan operasional gugus tugas kecamatan, bantuan dari gugus tugas kabupaten.

1075. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Gugus tugas apa ini?

1076. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.

1077. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa itu?

1078. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Bahwa kami menerima bantuan operasional untuk gugus tugas kecamatan dan itu kami gunakan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di tingkat kecamatan.

1079. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bapak dapat bulan apa itu?

1080. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Ya, Pak?

1081. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bulan apa, Pak, mendapat anggaran untuk percepatan itu?

1082. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Desember 2020.

1083. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

September, ya?

1084. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Ya, betul.

1085. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Berapa besarnya?

1086. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Rp7.500.000, 00.

1087. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

7?

1088. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

7.500.000,00.

1089. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini untuk apa, Pak?

1090. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Untuk kegiatan kami di lapangan karena kami di lapangan ada posko, Pak.

1091. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Untuk camat, ya?

1092. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Ya, untuk gugus tugas camat (suara tidak terdengar dengan jelas) operasional di lapangan.

1093. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Untuk operasional camat di lapangan, ya?

1094. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Gugus tugas kecamatan. Jadi untuk gugus tugas bukan untuk camat.

1095. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan, yang kemudian dibagi-bagi untuk RT siaga itu?

1096. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Bukan.

1097. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Beda lagi.

1098. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Bukan, ini untuk operasional, beda lagi.

1099. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Makanya untuk operasional, ya. Apa Rp7.500.000,00 ini untuk bulan September saja atau bulan-bulan berikutnya dapat juga?

1100. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

September.

1101. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Hanya untuk September? Ya, Pak, camat?

1102. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Ya.

1103. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Hanya untuk September?

1104. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Ya.

1105. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oktober dapat lagi?

1106. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Oh, enggak. Ini saya (suara tidak terdengar dengan jelas).

1107. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh. Kalau yang anggaran dari pemerintah daerah untuk RT siaga itu disalurkan melalui camat juga?

1108. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Betul, Yang Mulia.

1109. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi Bapak bukan di kecamatan yang ada Susilo Firdaus tadi, ya?

1110. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Ya, saya di sini sebagai ketua forum, Yang Mulia.

1111. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bagaimana, Pak?

1112. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Saya dipercaya oleh para camat menjadi Ketua Forum Camat Kabupaten Tasikmalaya, Yang Mulia.

1113. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebelum di Singaparna di mana?

1114. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Saya di Sukahening, Yang Mulia.

1115. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa?

1116. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Kecamatan Sukahening, Yang Mulia.

1117. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kecamatan? Kecamatan apa, Bapak?

1118. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Sukahening, Yang Mulia.

1119. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, baru di ... baru 2019 akhir dipindah ke ini, ya (...)

1120. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Dialihtugaskan.

1121. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Singaparna?

1122. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Betul.

1123. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa lagi yang mau dijelaskan, Pak?

1124. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Tentang RT Siaga, Yang Mulia.

1125. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, RT Siaga, gimana?

1126. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Jadi gugus tugas, Kabupaten ... gugus tugas percepatan penanganan Covid Kabupaten Tasikmalaya memberikan amanah kepada saya untuk menyerahkan bantuan RT Siaga tersebut, dan kami terima, kemudian kami serahkan ke desa. Dan oleh desa kemudian diserahkan ... diserahkan kepada RT, nah, jadi dalam penyerahan ini, di kecamatan menghadirkan kepala desa dan dihadiri juga oleh unsur muspika. Jadi tidak ada (...)

1127. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada tidak, Pak, Pak Camat?

1128. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Siap.

1129. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada tidak pesan-pesan untuk mendukung salah satu pasangan?

1130. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Sama sekali tidak ada, Yang Mulia.

1131. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ada. Itu saja kan, sebenarnya Bapak ingin menjelaskan itu kan? Tidak pernah diminta atau diperintah.

1132. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Ya.

1133. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Diperintahkan untuk menggiring.

1134. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Betul, Yang Mulia.

1135. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, sudah.

1136. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Betul, Yang Mulia.

1137. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Cukup, Pak?

1138. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Ya, sementara.

1139. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Bapak mundur, ganti Pak Panji Permana.

1140. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Betul, Yang Mulia.

1141. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ketua Asosiasi Pemerintah Daerah Desa Seluruh Indonesia. Ketua ... Pak Panji?

1142. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: PANJI PERMANA

Siap, Yang Mulia.

1143. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bapak ini Ketua Asosiasi, berarti domisili Bapak di mana ini?

1144. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: PANJI PERMANA

Di Salawu, Pak. Desa Karangmukti.

1145. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di mana itu?

1146. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: PANJI PERMANA

Desa Salawu. Desa Karangmukti, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya.

1147. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, tapi Ketua Asosiasi untuk seluruh Indonesia, ya?

1148. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: PANJI PERMANA

Itu DPC (...)

1149. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pemerintah daerah desa seluruh Indonesia.

1150. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: PANJI PERMANA

Cabang Tasikmalaya.

1151. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, untuk Tasikmalaya?

1152. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: PANJI PERMANA

Ya.

1153. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, apa yang ... mau menjelaskan apa, Pak? Tentang RT Siaga ini Bapak mau jelaskan.

1154. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: PANJI PERMANA

Ya, Yang Mulia, terima kasih. Saya Panji Permana, Desa Karangmukti, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, selaku ... saya selaku Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Kabupaten Tasikmalaya, yang dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai instruksi menindaklanjuti instruksi bupati tentang sertifikat wakaf, tentang program sertifikat wakaf yang mana hal tersebut, saya dapat informasi dari Pak Camat langsung ke pihak desa dan saya menindaklanjuti langsung ke merapatkan di desa kami, (suara tidak terdengar jelas) walaupun dalam suasana Covid, tapi kami berkumpul terbatas pada waktu itu hanya tokoh-tokoh masyarakat yang berkaitan dengan keagamaan, yang seperti DMI atau MUI, yang DKM tersebut, Yang Mulia. Dalam rapat tersebut, dalam kondisi tersebut, kami langsung menyampaikan kepada tokoh masyarakat yang memiliki atau yang menerima hibah wakaf keagamaan waktu itu untuk segera membuat permohonan dilengkapi dengan hal-hal persyaratan-persyaratan, dan dalam pertemuan tersebut kami pihak desa tidak pernah menyarankan atau mengajak siapapun (...)

1155. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1156. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: PANJI PERMANA

Untuk menggiring salah satu (...)

1157. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di salah satu pasangan calon. Tidak ada, Pak, ya?

1158. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: PANJI PERMANA

Tidak ada, Yang Mulia.

1159. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kemudian, yang kedua, mengenai RT Siaga, bagaimana?

1160. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: PANJI PERMANA

Di mana RT Siaga, yang mana yang telah dibentuk oleh gugus tugas kabupaten, kecamatan, dan desa kami pun di sana melakukan, di desa melakukan musyawarah dengan RT-RT, dengan tokoh masyarakat, dengan protokol kesehatan kita jalankan dengan keterbatasan situasi waktu itu, ya kami membentuk ya apa ... itu RT Siaga ataupun gugus tugas, di setiap ke-RT-an, alhamdulillah jadi pengunanya untuk kontrol masyarakat yang datang dari kota maupun dari kampung atau dari desa pergi ke kota. Jadi kami di sana bisa mendata masyarakat yang keluar masuk kampung tersebut.

1161. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, tidak, Pak, Bapak? Bapak?

1162. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: PANJI PERMANA

Ya, siap.

1163. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi tidak ada Program RT Siaga itu juga ada message atau pesanan-pesanan, tumpangan-tumpangan tentang untuk mensukseskan salah satu pasangan calon? Tidak ada itu?

1164. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: PANJI PERMANA

Tidak ada, Yang Mulia.

1165. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kemudian, biar kami yang bertanya saja, Pak, kami yang bertanya kami ambil alih. Kemudian, betul honorinya Rp500.000,00 per 3 bulan?

1166. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: PANJI PERMANA

Betul, Yang Mulia.

1167. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Betul, ya.

1168. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: PANJI PERMANA

Itu operasional.

1169. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, konsumsi, posko penjagaan, jaga malam dan operasional, dan lain sebagainya, ndak ada pesan-pesan untuk mendukung pasangan calon. Keterangan Bapak seperti ini, betul?

1170. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: PANJI PERMANA

Enggak ada, Yang Mulia.

1171. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

1172. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: PANJI PERMANA

Betul.

1173. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang ketiga. Bapak dengarkan saja. Tentang keterlibatan ASN adalah itu tanggung jawab pribadi, tidak ada hubungannya dengan pilkada. Maksud Bapak begitu kan?

1174. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: PANJI PERMANA

Betul.

1175. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, yang terakhir. Asosiasi yang Bapak pimpin itu juga tidak pernah ada kaitannya dengan dukung mendukung dengan salah satu pasangan calon?

1176. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: PANJI PERMANA

Tidak ada, Yang Mulia.

1177. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Baik, nanti ada tambahan, Pak. Ini Saksinya dari Pihak Terkait. Silakan kalau mau ada pendalaman 1-2 pertanyaan.

1178. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Ya, baik. Untuk ke Pak Sekda dulu, Pak.

1179. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Sekda maju, Pak Panji ke belakang

1180. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Baik, Yang Mulia.

1181. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Saudara Saksi. Tadi Saudara Saksi menerangkan tentang penyusunan anggaran APBD, ya. Saudara Saksi, apakah Pemohon ini juga terlibat dalam penyusunan APBD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020, Saudara Saksi? Dan kedudukannya sebagai apa kalau terlibat?

1182. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu, kan petahana, kan, Bapak? Ya, kan?

1183. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Kenapa, Pak?

1184. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Waktu itu, kan masih menjabat, kan? Ya. Enggak usah ditanya kedudukan sebagai apa. sebagai bupati, kan.

1185. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Pemohon, Yang Mulia.

1186. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, Pemohon. Pemohon coba jawab, Pak.

1187. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Baik, Yang Mulia.

Pada waktu penyusunan anggaran 2020, Pemohon itu sebagai kepala bappeda yang dalam susunan tim anggaran pemerintah daerah, dia sebagai wakil ketua TAPD.

1188. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Baik. Jadi Pemohon ini wakil ketua TAPB, ya karena kepala bappeda.

1189. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Betul.

1190. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Kemudian Saudara Saksi di permohonan Pemohon, kan ada tuduhan bahwa ada kenaikan dana hibah yang luar biasa dari ... di APBD Tasikmalaya 2020 ini. Nah, berdasarkan surat keterangan dari Saudara Saksi dana hibah itu antara lain digunakan untuk membiayai pilkada. Mungkin Saudara Saksi bisa menjelaskan tentang hal tersebut, Saudara Saksi?

1191. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Baik. Besaran hibah di APBD dan APBDT di 2020 itu Rp174 miliar yang terbagi antara hibah rutin dan hibah dalam rangka penyelenggaraan pilkada. Jadi, kalau melihat hitungan kebutuhan pilkada 81 miliar rupiah, maka ap ... hibah rutin itu tidak naik artinya tetap seperti di 2019. Bahkan di 2018 lebih besar dari 2019 dan 2020, jadi tidak benar kalau ketika 2020 ada peningkatan hibah yang signifikan. Itu hanya semata-mata tuntutan undang-undang untuk membiayai penyelenggaraan pilkada di Tasikmalaya dengan besaran Rp81 miliar.

1192. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Baik. Jadi, untuk hibah itu naik karena untuk penyelenggaraan pilkada, Saudara Saksi, ya? Berikutnya Saudara Saksi tadi, Yang Mulia pak ... Bapak Suhartoyo menanyakan tentang pencairan R ... dana RT siaga. Bisa Saudara Saksi jelaskan sejak awal pembentukan RT siaga sampai mungkin Desember tahun 2020, berapa kali dana RT siaga itu dicairkan dan di bulan apa saja? Silakan, Saudara Saksi.

1193. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Baik.

Untuk anggaran operasional RT siaga itu diberikan 3 tahap. Yang pertama di bulan Mei, yang kedua di bulan Agustus, dan yang ketiga di bulan November itu dengan besaran yang sama untuk biaya operasional gugus tugas tingkat RT, bukan untuk bapak RT. Itu mohon dipertegas gitu, ya.

1194. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Baik. Terima kasih, Saudara Saksi. Jadi dicairkan secara bertahap, tidak dicairkan (...)

1195. KETUA: ASWANTO

Saudara jangan ulang-ulang terus, sudah jelas.

1196. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Baik.

Berikutnya, Saudara Saksi. Terkait dengan adanya tuduhan juga dari Pemohon, ya, di mana seolah-olah ada pemberian juga bantuan dana penanganan operasional Covid kepada Kapolres Kabupaten Bekasi, Kapolres kota eh ... mohon maaf ... Kapolres Tasikmalaya, Kapolres Kabupaten Tasikmalaya, terus Dandim dan kejaksaan negeri yang kemudian dihubungkan dengan pilkada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya ini. Apakah benar bantuan yang diberikan kepada instansi-instansi yang dituduh oleh Pemohon itu terkait dengan pilkada atau bagaimana, Saudara Saksi? Mohon penjelasannya, Saudara Saksi.

1197. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Baik. Kaitan dengan operasional yang diberikan ke kapolres, dandim, kajari, itu adalah pemberiannya bukan ke orang, tapi ke lembaga ... ke institusi. Jadi, untuk operasional institusi polres ... polrse kabupaten, polres kota, kemudian komandan kodim, dan kejaksaan negeri. Karena mereka melakukan upaya-upaya ke dalam (...)

1198. KETUA: ASWANTO

Cukup, Pak cukup ... cukup. Sudah dijawab, Pak. Pak Sekda, cukup. Silakan, pertanyaan lain.

1199. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Untuk Pak Sekda sementara cukup, mungkin Saksi berikutnya Pak Panji (...)

1200. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RIDWAN SALEH

Ada tambahan.

1201. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Ada tambahan.

1202. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RIDWAN SALEH

Ada tambahan, Yang Mulia.

1203. KETUA: ASWANTO

Dari?

1204. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RIDWAN SALEH

Untuk pertanyaan Pak Sekda.

1205. KETUA: ASWANTO

Silakan! Jangan diulang yang sudah dijawab tadi.

1206. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RIDWAN SALEH

Tidak, Yang Mulia. Pak Sekda atau Saksi terkait masalah tuduhan masalah DKM dan pondok pesantren ada hibah ini ya. Ini bagaimana penjelasan dari pemerintah daerah melalui Pak Sekda ini karena menurut informasi yang kita terima, ini sudah rutin dari sejak tahun 2006, 2010 mungkin bisa dijelaskan secara singkat terkait masalah hibah ke pondok pesantren dan DKM.

1207. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Baik, kaitan dengan hibah ke pondok pesantren dan DKM itu masuk dalam hibah rutin. Jadi, pelaksanaan ini bukan karena di 2020 saja itu sejak beberapa tahun sebelumnya sudah dilaksanakan walaupun di 2019 dan 2020 itu lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya, seperti uraian UKM dan (...)

1208. KETUA: ASWANTO

Baik, sudah ... sudah jelas Pak ... Pak Saksi sudah jelas. Masih ada pertanyaan untuk?

1209. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RIDWAN SALEH

Ya, informasi yang kita terima. Apakah ada, ini saya dengar ada pondok pesantren untuk Paslon Nomor 4. Apakah menerima juga bantuan dari hibah tersebut?

1210. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Menerima, karena itu program secara rutin yang tidak membedakan hal-hal lain karena semata-mata merupakan bentuk bantuan stimulan ke pondok-pondok pesantren yang membantu pemerintah dalam pembangunan mentalitas keagamaan untuk warga Tasikmalaya.

1211. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RIDWAN SALEH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

1212. KETUA: ASWANTO

Cukup? masih ada lagi yang mau didalami dari Saksi yang lain?

1213. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Ada, Yang Mulia Saksi Panji Permana, Yang Mulia.

1214. KETUA: ASWANTO

Silakan! Pak Panji, silakan maju!

1215. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: PANJI PERMANA

Ya, terima kasih.

1216. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Baik, Saudara Panji Permana. Bapak kan di samping Kepala Desa juga Ketua Apdesi Kabupaten Tasikmalaya. Betul, ya. Kaitannya dengan RT Siaga Saudara Saksi dalam PT-19 kami menyampaikan bukti tentang keputusan-keputusan kepala desa pembentuk RT Siaga. Apakah betul pembentuk RT Siaga itu didasarkan kepada keputusan kepala desa?

1217. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: PANJI PERMANA

Betul.

1218. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Betul, ya? Betul.

1219. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: PANJI PERMANA

Betul.

1220. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Kemudian, terkait dengan penggunaan dana operasional RT Siaga, tadi disampaikan Saksi Pak Sekda bahwa itu bukan untuk individu-individu ketua RT tapi untuk operasional RT Siaga. Mungkin bisa dijelaskan, untuk keperluan apa itu kira-kira penggunaan operasional RT Siaga yang RP500.000,00 per 3 bulan itu Saudara Saksi?

1221. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: PANJI PERMANA

Ya, terima kasih. Walaupun nilainya kecil tapi bagi kami sangat berarti itu uang RP500.000,00 untuk menambah motivasi masyarakat bergotong-royong untuk kelompok-kelompok atau pun sedikit dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama ataupun kader-kader posyandu ikut serta semua. Jadi setiap siang malam mereka bekerja mereka apa ... atau pun bergantian di pos tersebut. Jadi anggaran tersebut untuk operasional setiap harinya mereka yang jaga, begitu.

1222. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Baik, dilanjutkan rekan saya, Yang Mulia.

1223. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RIDWAN SALEH

Baik, Saudara Saksi, ya, Pak ... terkait masalah proses di ... ini kan kebetulan Kepala Desa, Asosisasi juga. Nah, berapa persoalan yang Bapak ketahui selama pilkada di desa Bapak itu. Kalau dicatatan kami ini ada 351 ya kalau nggak salah, betul, ya?

1224. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: PANJI PERMANA

Betul.

1225. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RIDWAN SALEH

Nah, apakah ada informasi yang terkait dari 351 itu ada persoalan terkait masalah pilkada?

1226. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: PANJI PERMANA

Ada, cuma 1 orang kepala desa yang juga mengakui ke khilafannya waktu itu. Saya tanya, "kenapa seperti itu?" inisiatif sendiri bukan atas perintah siapa pun apalagi saya selaku Ketua Asosisasi tidak pernah menghimbau atau menyarankan atau pun apa ... untuk memilih salah satu calon waktu pilkada kemarin. Saya ... dibebaskan semua tidak ada pengarahan apapun.

1227. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RIDWAN SALEH

Tapi sudah diproses ya setahu Saksi?

1228. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: PANJI PERMANA

Sudah, sudah diproses di pengadilan umum, sudah diproses.

1229. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RIDWAN SALEH

Oke.

1230. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: PANJI PERMANA

Itu ya keputusannya subsider, Pak.

1231. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RIDWAN SALEH

Baik. Cukup, Yang Mulia.

1232. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Cukup, ya. Dari Kuasa Pemohon ada pertanyaan?

1233. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRWANDA

Terima kasih, Yang Mulia. Kami ingin menanyakan ke Pak Zein ... Pak Sekda ya.

1234. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Sekda, maju! Pak Sekda. sekretaris daerah.

1235. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRWANDA

Sekretaris daerah. Saudara Saksi, tadi Saudara Saksi menerangkan terkait dengan RT siaga, ya, Pak. Apakah Saudara Saksi mengetahui tentang Keputusan Bupati, 360/KEP/DPD/2020 tentang RT Siaga tersebut?

1236. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: PANJI PERMANA

Mengetahui.

1237. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tahu, tahu, Pak.

1238. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRWANDA

Tahu, ya?

1239. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1240. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: PANJI PERMANA

Tahu.

1241. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRWANDA

Nah, itu di keputusan itu kan dikeluarkan pada 11 Mei 2020, ya? Saudara Saksi.

1242. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: PANJI PERMANA

19.

1243. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRWANDA

Bulan Mei, ya?

1244. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: PANJI PERMANA

19 Maret, 19 Maret 2020.

1245. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRWANDA

Bukan bulan Mei?

1246. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: PANJI PERMANA

Bukan.

1247. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRWANDA

Nah, itu kan di keterangan tadi ada dari Saksi kami, itu ada kan dari September, Oktober, November. Kemudian tadi ada keterangan mulainya diberikannya pada bulan Mei, dan seterusnya. Kalau pun ke keputusannya dikeluarkan bulan Maret, apa yang menjadi landasan dari Pemerintah Daerah itu diberikannya mulai dari bulan Mei padahal tadi Saudara Saksi menerangkan bahwa ini sudah ada di bulan Maret aturannya. Apa yang menjadi landasan dari Pemerintah Daerah itu baru dikeluarkan bulan Mei dan kemudian dibuat beberapa kali pemberian. Terima kasih.

1248. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: PANJI PERMANA

Baik. Kaitan pemberian itu karena anggaran itu juga dari DPT yang sebelumnya tidak ada. Jadi kita melakukan rep ... realokasi anggaran dari berbagai kegiatan yang bisa ditanggihkan menjadi dana BPT dan ... dan pembayaran operasional pun itu dari BPT dan ada erat kaitannya dengan perkembangan Covid di kami di Kabupaten Tasikmalaya. Jadi itu sekali lagi tidak ada hubungan dengan pilkada. Jadi itu hanya murni bagaimana kita mengatasi pencegahan dan penanganan Covid-19 dengan menguatkan gugus tugas tingkat RT, seperti itu.

1249. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Bapak tidak usah menyimpulkan tidak ada kaitannya, itu tidak ditanyakan Pak oleh ... cukup, Pak.

1250. KUASA HUKUM PEMOHON: TONNY IRAWAN

Boleh menambahkan, Yang Mulia?

1251. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRWANDA

Tambahan, Yang Mulia, dari (...)

1252. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan.

1253. KUASA HUKUM PEMOHON: TONNY IRAWAN

Ya, untuk Pak Zen, ya. Terkait tadi bahwa ada SK tentang percepatan penetapan bantuan stimulan. Nah yang jadi pertanyaan saya. Yang jadi Ketua Satgas Covidnya sendiri siapa, ya, Pak?

1254. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Itu sesuai dengan ketentuan yang menjadi ketua itu Bupati.

1255. KUASA HUKUM PEMOHON: TONNY IRAWAN

Bupati? Bupati (...)

1256. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Ya, sesuai dengan ketentuan. Ya.

1257. KUASA HUKUM PEMOHON: TONNY IRAWAN

Atas nama?

1258. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Selaku ketua ASN.

1259. KUASA HUKUM PEMOHON: TONNY IRAWAN

Atas nama siapa, Pak?

1260. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Arif Sugiyanto.

1261. KUASA HUKUM PEMOHON: TONNY IRAWAN

Arif Sugiyanto.

1262. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Bapak Arif Sugiyanto.

1263. KUASA HUKUM PEMOHON: TONNY IRAWAN

Oke. Nah pembagian DPT itu untuk dana Covid itu ada yang dibagikan melalui dana BPPD ya, Pak, ya? Ada yang dibagikan melalui dana satpol PP di sininya nih, rincian bantuan stimulan ini yang tadi yang seperti Pihak Terkait bicarakan ada yang untuk ke camat dan ramil, dan lain sebagainya itu dananya dari Satpol PP betul, Pak?

1264. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Itu sekali lagi dari dana dari BPT yang pelaksanaannya yang pertama dibayarkan melalui BPPD.

1265. KUASA HUKUM PEMOHON: TONNY IRAWAN

Ya.

1266. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Adapun setelah operasional dalam pelaksanaan kemudian itu ada evaluasi karena di satpol pp itu bagian dari penanganan Covid gitu.

1267. KUASA HUKUM PEMOHON: TONNY IRAWAN

Ya, intinya ada masuk ke satpol pp juga selain BPPD tadi, Pak, ya?

1268. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Ya.

1269. KUASA HUKUM PEMOHON: TONNY IRAWAN

Oke.

1270. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Betul, betul.

1271. KUASA HUKUM PEMOHON:

Sedikit, Yang Mulia, Pemohon, Yang Mulia.

1272. KUASA HUKUM PEMOHON: TONNY IRAWAN

Ada tambahan dari Pemohon yang online ini, Yang Mulia.

1273. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Siapa itu?

1274. KUASA HUKUM PEMOHON: TONNY IRAWAN

Geofedi.

1275. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ha?

1276. KUASA HUKUM PEMOHON: TONNY IRAWAN

Dari Kuasa Pemohon.

1277. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, Kuasa Hukum. Mau tanya ke siapa, Pak?

1278. KUASA HUKUM PEMOHON: GIOFEDI RAUF

Masih ke Pak Zen saja, Yang Mulia. Mau menanyakan sedikit saja, Pak Saudara Saksi, terkait dengan realokasi anggaran, apakah Saudara Saksi mengetahui bahwa kami Pemohon, Pak Iwan Syahputra masih terlibat atau tiba ... tidak dalam relo ... realokasi anggaran terkait dengan penanganan covid dan lain sebagainya?

1279. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jawab, Pak Sekda.

1280. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Hadir. Beliau pensiun sejak 1 Juni. Jadi langkah-langkah awal itu masih bagian dari gugus tugas secara utuh. Artinya, SKPD Bappeda itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari TAPD Kabupaten Tasikmalaya.

1281. KUASA HUKUM PEMOHON: GIOFEDI RAUF

Begini, Saudara Saksi. Tadi kan Saudara Saksi menyebutkan di awal dalam keterangan Saudara bahwa Pemohon terlibat. Kemudian Saudara Saksi juga menjelaskan bahwa ada realokasi anggaran. Pertanyaan saya cukup jelas, apakah Pemohon terlibat dalam realokasi anggaran tersebut atau tidak? Jangan menyimpulkan Saudara, Saudara Saksi tahu apa tidak?

1282. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah, perta ... pertanyaannya jangan juga begitu, jangan begitu menekan.

1283. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Keberatan, Yang Mulia.

1284. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Santai saja.

1285. KUASA HUKUM PEMOHON: GIOFEDI RAUF

Mohon maaf, mohon maaf.

1286. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Melalui, melalui Hakim saja kalau begitu. Pak Sekda, Pemohon ikut tidak ketika menyusun realokasi anggaran?

1287. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Sampai bulan Juni beliau masih terlibat karena sebagai ketua sekda.

1288. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Sampai Juni? Realokasi anggaran kapan itu ada mulai?

1289. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Mulai dari bulan Maret itu sudah berjalan.

1290. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah berjalan. Setelah (...)

1291. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Karena dilakukan berkali-kali.

1292. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Setelah Juni baru tidak, ya? Cukup ya, Kuasa Hukum?

1293. KUASA HUKUM PEMOHON: GIOFEDI RAUF

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

1294. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Santai saja, Pak, jangan terlalu semangat malah (...)

1295. KUASA HUKUM PEMOHON: GIOFEDI RAUF

Siap, Yang Mulia.

1296. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Dari ... cukup, kan?

1297. KUASA HUKUM PEMOHON: TONNY IRAWAN

Masih ada untuk yang lain. Tadi (...)

1298. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang mana maksudnya?

1299. KUASA HUKUM PEMOHON: TONNY IRAWAN

Untuk Kusnanto dan Panji.

1300. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, silakan. 1, 2 pertanyaan, jangan (...)

1301. KUASA HUKUM PEMOHON: TONNY IRAWAN

Ya. Mungkin salah satu sajalah, yang Kusnanto saja, Yang Mulia.

1302. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Sekda mundur, Kusnanto maju.

1303. KUASA HUKUM PEMOHON: TONNY IRAWAN

Ya, Saudara Saksi Pak Kusnanto, ya.
Pak Kusnanto, di sini kan sebagai Ketua Asosiasi Camat ya se-Kabupaten Tasikmalaya, betul?

1304. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Forum.

1305. KUASA HUKUM PEMOHON: TONNY IRAWAN

Forum? Ya pertanyaan saya, forum tersebut itu ada pembicaraan enggak mengenai dana satpol PP yang tadi Bapak bicarakan itu di dalam forum itu? Forum ini kan bentuknya organisasi, ya? Betul?

1306. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Tidak ada.

1307. KUASA HUKUM PEMOHON: TONNY IRAWAN

Tidak ada. Tapi bapak tadi ... dari tadi menyampaikan itu sebagai ketua asosiasi?

1308. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Betul.

1309. KUASA HUKUM PEMOHON: TONNY IRAWAN

Betul. Berarti Bapak menyampaikan sendiri atau sebagai ketua asosiasi yang berdasarkan perkumpulan tadi, keterangan Bapak sebelumnya tadi?

1310. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Sendiri

1311. KUASA HUKUM PEMOHON: TONNY IRAWAN

Sendiri. Berarti Bapak sebagai Camat Singaparna ya keterangan yang tadi? Nah, pertanyaan selanjutnya. Dari mana Bapak tahu bahwa ada beberapa kecamatan yang lainnya tadi, Bapak kan menganggapnya secara umum tadi itu keterangan Bapak seolah-olah itu ada di seluruh kabupaten se-Kabupaten Tasikmalaya pernyataan Bapak tadi.

1312. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa pertanyaannya, Pak? Bapak itu mau nanya apa? Jangan menjebak dengan saksi itu.

1313. KUASA HUKUM PEMOHON: TONNY IRAWAN

Ya, maksudnya pertanyaan tadi yang berdasarkan keterangan saksi terkait sertifikasi wakaf, tuduhan pemohon (...)

1314. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, itu berlaku untuk semua kecamatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya (...)

1315. KUASA HUKUM PEMOHON: TONNY IRAWAN

Berlaku untuk semua kecamatan atau hanya Kecamatan Singaparna saja?

1316. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Semua.

1317. KUASA HUKUM PEMOHON: TONNY IRAWAN

Semua?

1318. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Semua.

1319. KUASA HUKUM PEMOHON: TONNY IRAWAN

Kalau semua, saya balik lagi tadi. Bapak bertindak di sini sebagai asosiasi, ketua asosiasi, forum (...)

1320. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Bukan asosiasi, forum (...)

1321. KUASA HUKUM PEMOHON: TONNY IRAWAN

Atau sebagai camat Singaparna?

1322. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Forum.

1323. KUASA HUKUM PEMOHON: TONNY IRAWAN

Forum. Coba, saya sekali lagi (...)

1324. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Mohon izin, Yang Mulia. Saya pikir pengacara tidak bisa menilai saksi fakta apa yang disampaikan itulah kenyataan (...)

1325. KUASA HUKUM PEMOHON: TONNY IRAWAN

Begini, Yang Mulia. Kan kita harus melihat posisi saksi sebagai perorangan (...)

1326. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, lewat Hakim. Jadi begini, supaya tidak miss. Yang Anda maksud adalah ... Pak Camat, Pak Camat?

1327. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Ya, Yang Mulia.

1328. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Anda tadi kan memberi keterangannya sebagai Camat Singaparna atau ketua forum?

1329. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Ketua forum.

1330. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ketua forum, bukan camat? Bukan?

1331. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Dua-duanya.

1332. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dua-duanya? Oke. Pak Camat, tadi makanya saya selalu panggil Pak Camat karena Bapak jabatannya camat, tentunya ... apa ... relevansinya adalah karena konteks yang diceritakan adalah soal sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Singaparna yang dia ketahui di periode dia akhir 2019 ke 2020, kemudian RT Siaga sesungguhnya klasternya adalah klaster kaitannya dengan jabatan dia. Bisa saja begini, Pak Kuasa Hukum Pemohon. Seorang saksi itu by risk. Karena apa? Menghadapi forum seperti ini ... sebenarnya dua-duanya itu dia ketahui, baik dia alami sebagai camat maupun dia sebagai ketua forum. Itu kan satu ... satu ... apa ... dua peristiwa yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan saksi itu.

Nah, sekarang pertanyaan Saudara apa? Dalam kaca mata sebagai ketua forum, apa yang Saudara tanyakan?

1333. KUASA HUKUM PEMOHON: TONNY IRAWAN

Ya, katanya tadi kalau tadi Saksi bertindak sebagai ketua forum (...)

1334. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa pertanyaan?

1335. KUASA HUKUM PEMOHON: TONNY IRAWAN

Apakah ada pembicaraan tadi kan pertama, apakah ada pembicaraan terkait permasalahan tanah wakaf, terus terkait RT Siaga dan lain sebagainya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya (...)

1336. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pembicaraan kepada siapa?

1337. KUASA HUKUM PEMOHON: TONNY IRAWAN

Yang tadi di forum, Yang Mulia.

1338. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, kepada siapa? Kepada Pasangan Calon Nomor 2 atukah di forum anggota (...)

1339. KUASA HUKUM PEMOHON: TONNY IRAWAN

Nah, kalau forum keanggotaan itu kan berarti ada pembahasan sehingga (...)

1340. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada, tidak, Pak? Pak? Bapak sebagai ketua forum pernah mengumpulkan anggotanya atau perwakilan untuk membahas soal dua masalah tadi wakaf dan RT Siaga di forum itu? pernah, tidak?

1341. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Tidak ada. Tidak.

1342. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak. Cukup?

1343. KUASA HUKUM PEMOHON: TONNY IRAWAN

Cukup, Yang Mulia.

1344. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Sekarang dari Kuasa Hukum Termohon.

1345. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Supaya tidak bergeser ke saksi kedua. Saudara Saksi, tadi disebutkan Saksi juga merangkap sebagai Ketua Forum Camat di Kabupaten Tasikmalaya. Dalam kaitan itu, adanya surat

instruksi bupati kan kepada seluruh camat yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Sebagai Ketua Forum, apakah Saksi pernah bertemu dengan bupati pada waktu itu yang merupakan petahana? Apakah saksi pernah diminta oleh bupati agar mendukung beliau atau tidak sebagai ketua forum ataupun sebagai camat, maupun sebagai pribadi dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf?

1346. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Tidak pernah.

1347. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Tidak pernah? terima kasih. Bergeser ke Saksi ke-3.

1348. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Tidak pernah ke Bupati, tidak pernah juga (...)

1349. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Terima kasih, Saksi. Sekarang bergeser (...)

1350. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Pak, Saksi ke-3, Pak Panji, ya?

1351. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Pak Panji.

1352. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Panji, silakan, Pak.

1353. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Saudara Saksi, sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Desa se-Indonesia, cabang Tasikmalaya, apakah Saksi pernah diminta tolong bertemu dengan Pak bupati selaku petahana ataupun dari Pak Sekda atau jajaran Pemda Tasikmalaya berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf agar dalam pelaksanaan tersebut diiming-imingi dengan atau ajakan untuk mendukung petahana sebagai salah satu pasangan calon? Ada atau tidak?

1354. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: PANJI PERMANA

Tidak ada.

1355. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Tidak ada? Terima kasih, cukup, Saksi. Bergeser ke Saksi yang pertama.

1356. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Sekda.

1357. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Izin, Yang Mulia. Kami lanjutkan, Saudara Saksi, tadi disampaikan bahwa diawal tahun Saudara menerima kunjungan dari Kepala BPN beserta tim dalam pelaksanaan sertifikasi PTSL, begitu ya, termasuk di dalamnya sertifikasi tanah wakaf. Dan yang kedua, pada akhir Agustus berkaitan dengan pertemuan yang menunjukkan bahwa itu tidak ter ... apa ... belum tercapai targetnya. Dalam kaitan itu, dibutuhkan tadi tindak lanjut. Nah, ketika tindak lanjut, itu kan keluar SK Bupati. Pada waktu dengan bertemu bupati, terkait dengan penyusunan kebijakan SK instruksi bupati ataupun surat edaran kepada beberapa kelompok keagamaan. Apakah ada permintaan, arahan, ataupun bentuk lainnya kepada Pak Sekda agar dalam kebijakan tersebut juga diarahkan untuk mendukung petahana atau bupati sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2?

1358. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Tidak, karena (...)

1359. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Terima kasih, Yang Mulia.

1360. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, cukup, Bapak. Pak Sekda, Pak Mohamad Zen, mundur dulu. Kita ... kami akan memeriksa Ahli sebentar, nanti mungkin dari Hakim ada tambahan-tambahan, ya? Saksi sama ... Saksi-Saksi istirahat dulu sebentar. Prof. I Gede Pantja Astawa sudah siap, Prof?

1361. AHLI PIHAK TERKAIT: I GEDE PANTJA ASTAWA

Siap, Yang Mulia.

1362. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, berdiri, Prof. Saya bantu lafal sumpahnya. Oke? Berdiri, Rohaniwan sudah?

1363. AHLI PIHAK TERKAIT: I GEDE PANTJA ASTAWA

Sudah, Yang Mulia.

1364. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.
"Om atah paramawisesa."

1365. AHLI BERAGAMA HINDU DISUMPAH:

Om atah paramawisesa.

1366. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

"Saya bersumpah sebagai Saksi."

1367. AHLI BERAGAMA HINDU DISUMPAH:

Saya (...)

1368. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Diulang, diulang, Prof.
"Om atah paramawisesa. Saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Om shanti shanti shanti om."

1369. AHLI DARI PIHAK TERKAIT:

Om atah paramawisesa. Saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Om shanti shanti shanti om.

1370. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, Prof. Waktunya 10 menit, maksimal, berkenan memberikan paparan, nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari Para Pihak, dipersilakan.

1371. AHLI PIHAK TERKAIT: I GEDE PANTJA ASTAWA

Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan menyampaikan pendapat saya ini, hal-hal yang kritikal, seperti. Walaupun barangkali Yang Mulia sudah memperoleh atau mendapatkan keterangan tertulis saya. Masalah pokok sebetulnya yang dipersoalkan oleh Pemohon ini kan berkaitan dengan soal kebijakan. Artinya, kebijakan yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Bupati Tasikmalaya. Kebijakan yang saya maksud ini adalah dalam bentuk Instruksi Bupati Nomor 6 Tahun 2020, kemudian Surat Edaran Nomor 42 Tahun 2020, dan saya sudah menginventarisasi 26 Keputusan Bupati.

Nah, semua kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Tasikmalaya, dalam perspektif hukum administrasi negara terkait dengan apa yang disebut sebagai kewenangan bebas, Yang Mulia, *rechts bevoegdheid*. Atau yang lebih dikenal sebagai diskresi, *discretionary power* atau *freies ermessen*.

Diskresi ini secara etimologis berarti pertimbangan, khususnya pertimbangan yang baik. Selain itu diskresi juga mengandung arti *choice* (memilih) diantara 2 atau lebih pilihan. Pertimbangan apa yang akan diberikan dan pilihan apa yang akan diambil serta cara apa yang akan digunakan oleh pejabat administrasi negara untuk melaksanakan kekuasaannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu sama sekali tidak ditentukan oleh pembentuk undang-undang atau *wait keeper*[sic!].

Dan oleh karena itu, diskresi sering dikategorikan sebagai kewenangan bebas (*rechts bevoegdheid*). Kewenangan bebas ini pada gilirannya melahirkan kebebasan mengambil kebijakan *beleids pray heid*[sic!] dan kebebasan memberikan pertimbangan *behordelein pray heid*[sic!]. Dalam kaitannya dengan mengambil kebebasan kebijakan berupa keputusan yang bersifat pengaturan atau keputusan tertulis yang didasarkan pada wewenang diskresi inilah yang dikenal sebagai peraturan kebijakan, kalau dalam bahasa Belandanya *beleidsregel*, atau (ucapan tidak terdengar jelas), atau *spiegel recht*, dalam Bahasa Inggrisnya adalah *policy rules*.

Apa itu peraturan kebijakan? Peraturan kebijakan itu adalah peraturan yang dibuat baik kewenangan maupun materi muatannya tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan delegasi dan mandat melainkan berdasarkan pada wewenang yang timbul diskresi atau *freies ermessen* yang dilekatkan pada jabatan administrasi negara untuk memajukan ... maaf ... untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu

yang dibenarkan oleh hukum. Dengan demikian, peraturan kebijakan tidak lain dari penggunaan diskresi atau *freies ermessen*, the exercise of the discretionary power yang menampakkan keluar suatu kebijakan ter ... tertulis (Ahli menggunakan Bahasa Belanda), diumumkan keluar dan mengikat umum. Nah, hal yang penting yang perlu saya sampaikan di sini, Yang Mulia. Peraturan kebijakan lebih bertolak pada aspek pencapaian tujuan atau manfaat yang dikenal dalam istilah Belanda *doelmatigheid* itu daripada dasar pembenaran secara hukum. *Rechtmatigheid*.

Oleh sebab itu, pengadilan tidak boleh mengadili kebijakan dalam artian, hakim tidak boleh mempertimbangkan *doelmatigheid* atas suatu kebijakan pemerintah atau organisasi negara karena fungsi dan kompetensi peradilan dalam suatu negara hukum hanya terbatas pada aspek *rechtmatigheid* atas kebijakan pemerintah administrasi negara. Nah, bekenaan dengan hal ini, saya mengutip pendapat dari pakar hukum administrasi Belanda yaitu *Belin France*[sic!] dalam bukunya *Chord Begrip Van Het Administiton Recht*. Dia menyatakan, lalu saya terjemahkan dalam Bahasa Indonesia bahwa hakim tidak boleh duduk atas kursi administrasi, dia memikul tanggung jawabnya sendiri. Nah hal senada juga dikemukakan oleh rekan Van Den Boorg yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh duduk di atas kursi administrasi. Hal Ini telah lama menjadi ungkapan tetap dalam literatur hukum administrasi. Dengan ungkapan itu, dinyatakan bahwa hakim ketika memberikan pertimbangan terhadap keputusan dan tindakan administrasi pemerintah yang diajukan kepadanya, harus menghormati kebijakan pemerintah. Hakim tidak boleh menilai lagi menimbang kepentingan kekuasaan administrasi negara. Nah, nampaknya, ungkapan ini, memang pernah dipraktikkan dan diputus, Yang Mulia, singkat saja, dalam pende ... apa ... dalam putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta Nomor 148/PIP/32/PPDKI tanggal 29 Desember 2003 dalam perkara pembelian fasilitas kredit likui ... likuiditas oleh Direktur Bank Indonesia. Dalam salah satu pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat demi ... demikian. Pengadilan tidak berhak menilai suatu kebijakan atau beleid dari pemerintah dalam ini, Bank Indonesia. Terlepas daripada apakah kebijakan tersebut berasal atau tidak untuk menyelamatkan sistem moneter atau perbankan atau perekonomian negara. Hal yang sama juga dipertegas oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 57/2K/PID/2003 tanggal 4 Februari 2004 dalam perkara Ir. Akbar Tanjung yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara. Nah, dalam pertimbangannya antara lain disebutkan apa yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa baik selaku Mensekneg maupun selaku koordinator yang menangani program pengadaan penyaluran sembako tersebut tetapi merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan

oleh seorang koordinator atau Mensekneg dalam keadaan darurat sesuai dengan kewenangan diskresioner yang dimilikinya.

Nah, yang tidak kalah penting juga harus dipahami bahwa berkaitan dengan bentuk atau jenis-jenis peraturan kebijakan itu dalam praktek itu beragam, Yang Mulia. Diantaranya kita jumpai dalam bentuk kebijakan, peraturan-peraturan yang bersifat regelling (mengatur), pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk, surat edaran, resolusi, instruksi-instruksi, nota kebijakan, keputusan-keputusan yang bersifat beschikking dan pengumuman-pengumuman. Pada dasarnya berbagai macam atau jenis peraturan kebijakan ini ditujukan untuk intern administrasi negara. Namun karena sifat tugas administrasi negara menyangkut pihak luar, maka secara tidak langsung akan mengenai juga masyarakat umum.

Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Nah, saya akan bicara tentang keterkaitan dengan keabsahan. Keabsahan diskresi yang menjadi dasar bagi administrasi negara mengeluarkan aturan kebijakan. Secara umum dapat disebutkan bahwa diskresi itu dianggap sah jika terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Nah, terkait dengan ini, sudah terbit Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Instansi Pemerintah. Di situ disebutkan persyaratan bagi keabsahan diskresi diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyebutkan pejabat pemerintah yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat:

- a. Sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- b. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- d. Berdasarkan alasan-alasan yang objektif.
- e. Tidak menimbulkan konflik kepentingan.
- f. Dilakukan dengan iktikad baik.

Nah, dalam hal ini saya perlu juga sampaikan kepada Yang Mulia bahwa ketentuan Pasal 22 khususnya huruf b. Tadi saya katakan, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diubah berdasarkan ketentuan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sehingga berbunyi, "Pejabat pemerintah yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (a) ... ayat (2)." Nah, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dihapus. B, sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. C, berdasarkan alasan-alasan yang objektif. D, tidak menimbulkan konflik kepentingan. Dan e, dilakukan dengan iktikad baik.

Nah, dengan adanya perubahan atau penghapusan norma Pasal 24 huruf b Undang-Undang Administrasi Pemerintah berdasarkan ketentuan Pasal 175 Undang-Undang Cipta Kerja, maka ketentuan Pasal 175 Undang-Undang Cipta Kerja itu sejalan dengan esensi diskresi

sebagai kewenangan bebas, rechtsbevoegdheid dan bukan kewenangan terikat, gebonden, dan bevoegdheid.

Nah, berdasarkan apa yang saya sampaikan tadi, Yang Mulia, izinkan saya menyampaikan pendapat kepada perkara a quo ini. Nah, yang pertama bahwa semua kebijakan Bupati Tasikmalaya mulai dari terbitnya SE ... instruksi bupati, surat edaran, dan sejumlah keputusan bupati yang jumlahnya 26, semuanya itu adalah peraturan kebijakan yang diterbitkan atau ditawarkan oleh Bupati Tasikmalaya berdasarkan wewenang diskresi yang melekat pada jabatannya. Untuk apa? Untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu.

Kedua, peraturan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Tasikmalaya berdasarkan wewenang diskresi yang melekat pada jabatannya itu didasarkan pada alasan-alasan yang objektif, yaitu untuk menjawab kondisi faktual dan mengatasi persoalan konkret yang dihadapi. Dalam hal ini, belum terpenuhinya target nasional tentang program sertifikat tanah wakaf dan tempat ibadah di Kabupaten Tasikmalaya, dan juga belum adanya kepastian hukum tentang kepemilikan tanah wakaf dan tempat ibadah di Kabupaten Tasikmalaya. Karena itu, untuk menjawab dan mengatasi persoalan konkret tersebut, sekaligus untuk melaksanakan amanat dari program pemerintah pusat yang dituangkan dalam bentuk instruksi presiden, nih, banyak, Yang Mulia, peraturan menteri agraria, peraturan ... banyak sekali peraturan menteri agraria, ya. Instruksi menteri agraria, keputusan bersama menteri agraria dan tata ruang kepada badan ... kepala badan pertahanan nasional, menteri dalam negeri dan menteri desa. Maka Bupati Tasikmalaya menyampaikan kebijakan berupa yang tadi itu. Instruksi, surat edaran, dan keputusan bupati. Sehingga dalam hal ini (...)

1372. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Waktunya, Prof. Waktunya 2 menit lagi.

1373. AHLI PIHAK TERKAIT: I GEDE PANTJA ASTAWA

Baik, Yang Mulia.

Sehingga dalam hal ini, kebijakan yang diterbitkan oleh Bupati Tasikmalaya tidak sepenuhnya kebijakan murni dalam konteks pemerintahan daerah setempat. Ada juga merupakan pelaksanaan dari perintah pusat yang berkaitan dengan program sebagai petahana dan seterusnya.

Demikian pula dalam rangka menjawab dan mendalami kondisi darurat pandemi Covid-19. Bupati Tasikmalaya mengeluarkan atau menyampaikan peraturan kebijakan dalam sejumlah putusan bupati. Mohon maaf, Yang Mulia, saya tidak sampaikan di sini, banyak sekali.

Ketiga. Semua peraturan kebijakan yang dilakukan oleh Bupati Tasikmalaya diarahkan pada tujuan, ini sesuai dengan persyaratan diskresi

- a) Terpenuhinya persertifikatan tanah wakaf dan tempat ibadah serta adanya kepastian hukum atas pendaftaran sertifikat tanah wakaf dan tempat ibadah.
- b) Terlibatnya peran serta masyarakat sipil sampai ke tingkat desa dalam percepatan penanganan Covid-19 dengan terbentuknya antara lain RT Siaga, dan seterusnya.

Yang keempat. Semua peraturan kebijakan diterbitkan oleh Bupati Tasikmalaya sekali lagi sesuai dengan persyaratan diskresi adalah sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, di antaranya asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, ketidakberpihakan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

Kelima. Semua peraturan kebijakan yang diterbitkan oleh Bupati Tasikmalaya tidak menimbulkan konflik kepentingan. Hal ini beralasan karena semua peraturan kebijakan oleh ... yang dikeluarkan oleh Bupati Tasikmalaya sama sekali tidak ada hubungannya atau relevansinya dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya. Tidak ada pula indikasi itu kecenderungan bahwa Bupati Tasikmalaya melalui peraturan kebijakan yang diterbitkan mengintimidasi atau mempengaruhi warga untuk memilih salah satu pasangan calon.

Dan yang terakhir, semua peraturan kebijakan yang diterbitkan oleh Bupati Tasikmalaya dilakukan dengan iktikad baik. Sebetulnya bisa saya tunjukkan di sini contoh-contohnya, cuma karena mengingat waktu.

1374. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, nanti bisa pendalaman itu.

1375. AHLI PIHAK TERKAIT: I GEDE PANTJA ASTAWA

Ya, Yang Mulia. Dengan demikian, sedikit lagi, Yang Mulia. Dengan demikian, peraturan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Tasikmalaya berdasarkan diskresi, sah karena sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

1376. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Terima kasih, Prof. Jadi, dari Pihak Terkait ada yang mau ditanyakan?

1377. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Saudara Ahli sudah memberikan pendapatnya. Dalam kemampuan saya yang terbatas untuk menyimpulkan apa yang menjadi pendapat Saudara Ahli, satu yang saya simpulkan bahwa instruksi bupati maupun surat edaran Bupati Tasikmalaya tentang akselerasi dan percepatan persertifikatan tanah wakaf tersebut adalah termasuk peraturan kebijakan. Yang ingin saya tanyakan adalah ini ada kaitannya dengan laporan ke Bawaslu karena di laporan di Bawaslu itu kan ada jangka waktunya.

Nah, kapan suatu peraturan kebijakan itu dianggap sudah diketahui oleh khalayak umum, Saudara Ahli? Apakah sebagaimana layaknya peraturan-peraturan yang lain, misalnya undang-undang itu berlaku asas ... fiksi hukum, begitu dikeluarkan, begitu diumumkan, maka semua orang dianggap mengetahui. Terima kasih, Ahli.

1378. AHLI PIHAK TERKAIT: I GEDE PANTJA ASTAWA

Ya, jadi kalau Anda simak pendapat saya tadi, itu dianggap, diketahui oleh umum ketika peraturan kebijakan itu diterbitkan atau dikeluarkan, baik itu berupa surat edaran seorang administrasi negara, instruksi, maupun keputusan-keputusan. Jadi, sama berlaku dari fiksi di situ, dianggap tahu.

1379. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, cukup?

1380. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Cukup, Yang Mulia.

1381. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, dari Pemohon ada pertanyaan? Cukup?

1382. KUASA HUKUM PEMOHON: GIOFEDI RAUF

Ada, Yang Mulia, ada.

1383. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pemohon, teman Saudara. Silakan, Pak!

1384. KUASA HUKUM PEMOHON: GIOFEDI RAUF

Izin, Yang Mulia. Terima kasih. Saudara Ahli, Prof Gede, tadi agak kurang jelas saya menangkapnya, apakah surat edaran maupun instruksi ini bisa bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka diskresi tadi? Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

1385. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan, Prof dijawab.

1386. AHLI PIHAK TERKAIT: I GEDE PANTJA ASTAWA

Baik, Yang Mulia. Tadi kalau Anda simak pendapat saya, memang semula persyaratan untuk terbitnya peraturan kebijakan yang didasarkan pada diskresi di antaranya, persyaratan nih, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tetapi sejak keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya Pasal 175, persyaratan yang berkaitan dengan tidak bertentangnya peraturan perundang-undangan itu dihapus, ya. Kenapa dihapus? Karena seperti tadi saya katakan, yang namanya peraturan kebijakan berdasarkan diskresi itu adalah kewenangan bebas, bukan kewenangan terikat. Begitu, lho. Jadi, sejalan dengan esensi diskresi. Yang saya katakan sejalan itu adalah bunyi Pasal 175 Undang-Undang Cipta Kerja. Maaf nih, yang keliru itu adalah bunyi Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang kemudian dikoreksi oleh Undang-Undang Cipta Kerja, ya.

1387. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, Prof. Dari Termohon?

1388. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Ahli, berkaitan dengan beleidsregel tadi, adanya peraturan kebijakan dalam rangka mencapai doelmatigheid, begitu ya. Dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pilkada yang mengatur larangan penggunaan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Bagaimana mengatur atau membuat suatu parameter atau penilaian bahwa kebijakan tadi digunakan atau disalahgunakan untuk menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam konteks pilkada? Terima kasih, Ahli.

1389. AHLI PIHAK TERKAIT: I GEDE PANTJA ASTAWA

Sebetulnya tadi juga sudah saya jawab. Poin penting dari namanya peraturan kebijakan itu lebih mengedepankan doelmatigheid daripada wetmatigheid. Karena itu saya kutip pendapat dari ahli hukum administrasi negara Belanda itu tegas mengatakan bahwa hakim dilarang untuk mengadili atau hakim dilarang duduk di atas kursi administrasi. Hakim saja dilarang apalagi misalnya ada pihak-pihak tertentu yang bukan hakim menilai, tidak boleh itu, ya karena itu menyangkut tentang kebijakan, bukan atas berarti kebijakan itu bisa dilakukan secara sewenang-wenang karena itu kebijakan itu bertumpu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik diantaranya tidak boleh bertindak sewenang-wenang.

1390. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, cukup?

1391. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Cukup, Yang Mulia.

1392. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, sekarang dari Hakim, baik Ahli maupun Saksi. Silakan, Pak Daniel atau Pak Ketua Panel.

1393. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Saya ke Pak Sekda dulu.

1394. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Sekda, Mohamad Zen, masih ada?

1395. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Siap.

1396. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Pak Sekda, terkait dengan program percepatan PTSL ini, Pak Sekda. Setelah pertemuan dengan kepala BPN itu ada berapa banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Bupati?

1397. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Baik, Yang Mulia. Hanya dua saja.

1398. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Hanya dua?

1399. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Instruksi dan edaran.

1400. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Itu yang surat instruksi dan surat edaran?

1401. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Betul.

1402. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tidak ada lebih lagi dari itu, Pak, tindak lanjut dari itu?

1403. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Tidak ada.

1404. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tidak ada, ya. Tadi Bapak sempat dengar keterangan Ahli dari Pihak Terkait ada sejumlah sekian banyak itu apakah itu benar atau tidak, atau hanya dua?

1405. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Benar, tapi itu kaitan dengan penanganan Covid.

1406. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, penanganan Covid. Bukan PTSL?

1407. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Bukan.

1408. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Jadi PTSL hanya dua ini, ya?

1409. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Betul, Yang Mulia.

1410. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Bisa saya tahu, Pak, periode Pak Sekda dari tahun berapa sampai tahun berapa?

1411. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Saya diangkat jadi Sekda tanggal 27 Desember 2019, Yang Mulia.

1412. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, dari ... berarti 2019, ya?

1413. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMAD ZEN

Ya.

1414. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Untuk Pak Sekda, saya kira cukup. Kemudian ke Saksi yang camat Pak Kusnanto, baik. Pak Kusnanto, Bapak selain sebagai camat adalah Ketua Forum Camat se-Kabupaten Tasikmalaya?

1415. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Betul.

1416. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Boleh saya tahu periodenya dari kapan sampai kapan, Pak?

1417. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Di forum camat itu tidak ada periodisasi, tetapi apabila pindah tugas di luar camat dengan sendirinya ada pemilihan kembali, seperti itu. Jadi selama saya jadi camat (...)

1418. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Dia semacam paguyuban saja atau dia berbentuk badan hukum?

1419. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Betul. Tidak, hanya paguyuban.

1420. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Hanya paguyuban. Apakah Bapak diangkat dengan SK bupati?

1421. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Tidak.

1422. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tidak. Jadi berarti Bapak hanya mendapat legitimasi saja?

1423. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Betul, dari para camat.

1424. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Dari para camat. Sudah sejak kapan Bapak jadi ketuanya?

1425. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Desember 2020.

1426. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, baru?

1427. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

2019, mohon maaf.

1428. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

2000?

1429. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

2019, mohon maaf, Yang Mulia.

1430. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, 2019. Itu periodenya walaupun tidak ada periode itu berapa lama itu? Satu tahun, dua tahun, atau selamanya, Pak?

1431. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Kalau saya alih tugas di luar menjadi kepala bagian misalnya, otomatis dari camat melaksanakan pemilihan, seperti itu.

1432. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, gitu, kalau Bapak misalnya pak bupati terpilih mengangkat Bapak kan, berarti Bapak akan diganti, ya?

1433. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KUSNANTO

Betul.

1434. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kalau tidak di ... Pak bupati tidak terpilih berarti Bapak tetap saja sebagai camat, ya? Enggak, ini hanya kelakar saja, Pak, enggak usah serius.

Baik, saya ke Ahli.

1435. AHLI PIHAK TERKAIT: I GEDE PANTJA ASTAWA

Ya, Yang Mulia.

1436. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Terima kasih dari Saksi. Saya ke Ahli dulu. Prof. Pantja terima kasih untuk keterangan Ahlinya, saya mencermati apa yang sudah diberikan keterangan, ini ada sedikit saja yang mengganjal saya terkait ada diskresi yang doelmatigheid, yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Itu tadi Bapak mengangkat ada putusan pengadilan tinggi dan Putusan Mahkamah Agung, itu sebenarnya putusan itu sudah agak lama karena semangat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 itu kan sebenarnya ada menjadi rujukan baru, tadi Ahli

tidak mengangkat satu contoh pun setelah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

1437. AHLI PIHAK TERKAIT: I GEDE PANTJA ASTAWA

Ya.

1438. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Dalam kaitan dengan diskresi ini bebas maupun terikat, kalau kita lihat dalam kasus beleidsregel yang dikeluarkan oleh Bupati Tasik, itu kan sebenarnya dia mendasarkan pada beleidsregel yang ada pada pemerintah pusat, ada instruksi presiden, ada terkait juga dengan beleidsregel yang dikeluarkan oleh Menteri BPN.

1439. AHLI PIHAK TERKAIT: I GEDE PANTJA ASTAWA

Betul.

1440. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kemudian, tadi juga Ahli menguraikan terkait dengan Pasal 24 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, kemudian itu sudah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kalau kita cermati di dalam Pasal 75 ini, walaupun sudah dicabut terkait dengan peraturan perundang-undangan, tapi itu kan masih ada ukuran lain yang menjadi pegangan bagi administrasi pemerintahan dalam mengeluarkan sebuah kebijakan yang diskretif.

1441. AHLI PIHAK TERKAIT: I GEDE PANTJA ASTAWA

Betul, Yang Mulia.

1442. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Antara lain misalkan harus sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, alasan-alasannya objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, kemudian dilakukan dengan iktikad baik.

1443. AHLI PIHAK TERKAIT: I GEDE PANTJA ASTAWA

Ya.

1444. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Nah, bagaimana untuk menilai bahwa sebuah diskresi, sebuah beleidsregel, dia tidak menimbulkan konflik kepentingan kalau tidak dinilai oleh pengadilan?

1445. AHLI PIHAK TERKAIT: I GEDE PANTJA ASTAWA

Ya.

1446. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Karena tadi Bapak mengutip pendapatnya Belivante dan Van Den Burg[sic!], ya?

1447. AHLI PIHAK TERKAIT: I GEDE PANTJA ASTAWA

Betul, Yang Mulia.

1448. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Itu kan mereka mengatakan, "Hakim tidak boleh diatas kebijakan."

1449. AHLI PIHAK TERKAIT: I GEDE PANTJA ASTAWA

Ya.

1450. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tapi bagaimana kita bisa mengukur bahwa dia tidak menimbulkan konflik kepentingan kalau pengadilan tidak memiliki ranah untuk masuk pada beleid itu ... beleidsregel itu?

1451. AHLI PIHAK TERKAIT: I GEDE PANTJA ASTAWA

Baik.

1452. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Mungkin itu saja, mohon pencerahan dari Ahli. Terima kasih.

1453. AHLI PIHAK TERKAIT: I GEDE PANTJA ASTAWA

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, ini pertanyaanya bagus sekali. Ibaratnya seorang pejabat administrasi negara itu menerbitkan peraturan kebijakan yang didasarkan pada diskresi itu berada di tepi jurang, kalau tidak hati-hati. Bisa diterjun ke jurang atau dia bisa tetap tegak, walaupun dia di tepi jurang. Ukurannya apa? Parameternya apa? Tadi saya katakan yang tidak boleh dinilai adalah doelmatigheid-nya tujuan akhir yang menjadi pertimbangan-pertimbangan pejabat administrasi negara itu untuk menerbitkan peraturan kebijakan. Itu yang tidak bisa dinilai, kemudian apa parameter untuk bisa menilai asas-asas umum pemerintahan yang baik, Yang Mulia? Jadi tentu kembali ... berpulang kembali kepada atasan dari pejabat administrasi negara tersebut, untuk mengoreksi kalau ternyata dia berlawanan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, bisa saja pejabat yang bersangkutan itu dikenai sanksi, tentu sanksinya sendiri, sanksi administratif bukan sanksi pidana. Karena wilayahnya bukan wilayah pidana. Ini wilayahnya wilayah administrasi negara.

Demikian, Yang Mulia.

1454. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Dari saya, Yang Mulia. Saksi dan Ahli, cukup.

1455. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih, Prof. sudah cukup.

1456. AHLI PIHAK TERKAIT: I GEDE PANTJA ASTAWA

Ya, terima kasih kembali, Yang Mulia.

1457. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dan Para Saksi juga sudah selesai. Silakan untuk bisa meninggalkan apa ... saluran sidang online ini. Kemudian kita lanjutkan dengan mendengar keterangan dari Bawaslu ya. Bawaslu, Pak, siap, Pak.

1458. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Yang Mulia? Dari Termohon, kami barusan mengajukan alat bukti tambahan, keterangan dari Pak Hasyim Asy'ari. Terima kasih, Yang Mulia.

1459. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Dari Bawaslu di samping keterangan yang sudah diberikan pada sidang yang lalu, kami akan minta penjelasan lebih lanjut, berkaitan dengan rekomendasi itu bagaimana sih sesungguhnya kronologisnya? Tapi singkat-singkat saja, ya, Bapak. Siapa yang akan memberikan penjelasan? Silakan siapa, Pak?

1460. BAWASLU: DODI JUANDA

Ya. Izin, Yang Mulia.

1461. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Pake ... maskernya dipakai saja, Pak.

1462. BAWASLU: DODI JUANDA

Terkait dengan ... apa namanya ... rekomendasi yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya menin ... untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, itu terkait dengan hal laporan dari Pasangan Calon Nomor 04 Saudara Iwan Saputra dan Iip Miptahul Paoz terkait dengan ... apa namanya ... pengeluaran SE dan intruksi bupati. Kami memproses itu, ya yang dilaporkan pada tanggal 16.

1463. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang melaporkan ini tim sukses atau langsung pasangan?

1464. BAWASLU: DODI JUANDA

Lang ... langsung pasangan calon didampingi (...)

1465. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu bukti berapa? PK?

1466. BAWASLU: DODI JUANDA

PK-15.

1467. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

PK-15. Langsung ditindaklanjuti itu kapan itu laporan?

1468. BAWASLU: DODI JUANDA

Tanggal 16, ya, laporannya tanggal 16, kami langsung me (...)

1469. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Desember, ya?

1470. BAWASLU: DODI JUANDA

Ya, Desember. Dan kami proses sampai di ... apa namanya ... memenuhi unsur syarat formil dan materiil. Sampai proses ke ... karena kami ber apa ... ada unsur pidananya dan kami dibawa ke Sentra Gakkumdu, ada pembahasan pertama dan kedua. Di Sentra Gakkumdu pada pembahasan kedua pada tanggal 26 Desember 2000 ... 2020 tindak pidananya tidak memenuhi unsur. Itu diputuskan dalam Sentra Gakkumdu.

1471. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Jadi, yang terbukti?

1472. BAWASLU: DODI JUANDA

Yang terbukti menurut Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya adalah pelanggaran administrasinya memenuhi unsur pelanggaran administrasinya.

1473. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

PK berapa?

1474. BAWASLU: DODI JUANDA

PK-15 juga.

1475. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Keputusannya?

1476. BAWASLU: DODI JUANDA

Ya. Kami meneruskan untuk ke ... merekomendasikan kepada KPU untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Form A-14.

1477. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

PK-15, ya?
Kalau yang produknya Gakkumdu?

1478. BAWASLU: DODI JUANDA

Sama di PK-15. Rangkaiannya sama.

1479. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bapak memberikan Bukti PK-15 saja kayak disertasi seperti ini belum ... satu bukti itu bisa berapa ratus halaman. Kalau substansinya sendiri sebenarnya apa itu SE dan intruksi itu?

1480. BAWASLU: DODI JUANDA

Kalau terkait dengan waktu yang dilarang sesuai dengan (...)

1481. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan waktunya. Materinya apa materi SE dan intruksinya itu apa, Pak? Mengenai apa?

1482. BAWASLU: DODI JUANDA

Terkait dengan percepatan kebij apa ... bupati mengeluarkan kebijakan terkait dengan percepatan tanah wakaf itu.

1483. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sertifikasi itu, ya?

1484. BAWASLU: DODI JUANDA

Ya.

1485. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu memang tanggal berapa dikeluarkan, Pak?

1486. BAWASLU: DODI JUANDA

Tanggal 2 dan tanggal 3 September 2020.

1487. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

2 dan 3 September?

1488. BAWASLU: DODI JUANDA

Ya.

1489. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada 2 anu, ya ... 2 surat, ya.

1490. BAWASLU: DODI JUANDA

SE dan intruksi itu.

1491. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

SE yang nomor berapa?

1492. BAWASLU: DODI JUANDA

4 ... 42.

1493. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

SE-nya 42 tanggal 2 des ... September, ya.

1494. BAWASLU: DODI JUANDA

Ya.

1495. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

2 September 2020. Mengenai apa ini SE, Pak? Percepatan?

1496. BAWASLU: DODI JUANDA

Akselerasi percepatan pendaftaran sertifikat.

1497. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau yang 3, 2000 (...)

1498. BAWASLU: DODI JUANDA

Nomor 6.

1499. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

6 ... 6 Tahun 2020 eh, tanggal 3 juga, ya. Tanggal 3, ya?

1500. BAWASLU: DODI JUANDA

Ya.

1501. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini apa produknya es ... SE atau apa? P, nomor 6. Intruksi atau?

1502. BAWASLU: DODI JUANDA

Intruksi itu, Pak.

1503. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang 6? Jadi, yang 42 tadi SE. Yang 6 ini intruksi? Berkaitan dengan apa?

1504. BAWASLU: DODI JUANDA

Terkait dengan apa per ... sama. Isinya terkait dengan proses percepatan pensertifikatan tanah wakaf itu. Objeknya yang berbeda. Disampaikannya kepal ... kalau intruksi itu kepada camat dan kepala desa, tetapi kalau surat edaran pada pimpinan ketua MUI, MK apa ... MKDT, dan pondok-pondok pesantren.

1505. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Surat edaran kepada pimpinan-pimpinan. Oke. Terus rekomendasi itu dikeluarkan tanggal berapa, Pak?

1506. BAWASLU: DODI JUANDA

Tanggal 30 Sep ... 30 Desember.

1507. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

30 Desember?

1508. BAWASLU: DODI JUANDA

Ya.

1509. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

2020, ya?

1510. BAWASLU: DODI JUANDA

Ya, 2020.

1511. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini berarti sudah jauh setelah pemilihan, ya?

1512. BAWASLU: DODI JUANDA

Betul, Yang Mulia.

1513. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Laporan pada dari Pasangan Nomor ... ini laporannya tanggal?

1514. BAWASLU: DODI JUANDA

16 Desember.

1515. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

16 Desember, ya belum ... tapi sudah ... sudah ada hasil rekapitulasi itu ya?

1516. BAWASLU: DODI JUANDA

Sudah, Yang Mulia.

1517. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah. Sebelumnya tidak ada laporan-laporan tentang ini?

1518. BAWASLU: DODI JUANDA

Ada, Yang Mulia.

1519. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa? Mengenai apa?

1520. BAWASLU: DODI JUANDA

Ya, sama.

1521. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tanggal berapa?

1522. BAWASLU: DODI JUANDA

Itu tanggal 7 Desember.

1523. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

7 Desember?

1524. BAWASLU: DODI JUANDA

Ya.

1525. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kenapa yang dirujuk yang laporan 16 September?

1526. BAWASLU: DODI JUANDA

Kami menurut kami Bawaslu bahwa yang memenuhi unsur syarat formil material itu yang tanggal 16 Desember.

1527. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada penanganan yang 7 September?

1528. BAWASLU: DODI JUANDA

Ada apa ... belum kami tangani karena mereka menyerahkan bukti-buktinya belum cukup.

1529. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukti laporannya ada?

1530. BAWASLU: DODI JUANDA

Ada.

1531. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

7 September di berapa?

1532. BAWASLU: DODI JUANDA

Enggak kalau itu belum kami registrasi karena tidak apa namanya ... belum memenuhi syarat-syarat formil materiil sebagai laporan.

1533. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, tapi kan itu sebuah apa ... masukkan apa pun kejadian, peristiwa yang seharusnya teradministrasi toh Pak.

1534. BAWASLU: DODI JUANDA

Ya, tidak dilampirkan dalam ini, Yang Mulia.

1535. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak, tapi ada?

1536. BAWASLU: DODI JUANDA

Ada di.

1537. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dibawa tidak sekarang?

1538. BAWASLU: DODI JUANDA

Enggak.

1539. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Ini untuk ... apa ... satu-kesatuan penilaian kenapa ketika rekapitulasi sudah keluar baru melaporkan yang sebelumnya ini kan ada iktikad-iktikad yang dinilai oleh Hakim juga kenapa kalau memang laporkan tidak dari awal. Ini kan September, Oktober, November kan ada

sequence waktu yang cukup. Kemudian Pemohon juga apa ... bagian dari pemerintah daerah yang masih menjabat ketika itu kan punya jabatan.

Oke, kemudian kalau yang ada hubungan keluarga itu dari Bawaslu itu siapa, Pak? Hubungan keluarga dengan pasangan nomor Pemohon ini?

1540. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Saya, Yang Mulia.

1541. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saudara?

1542. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Ya.

1543. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Siapa namanya, Pak?

1544. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Ahmad Aziz Firdaus.

1545. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ahmad?

1546. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Aziz Firdaus.

1547. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Aziz Firdaus.

1548. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Ya. Istri saya sama istrinya, istri sama istri, Pak.

1549. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Istri Bapak?

1550. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Sama istri pasangan calon.

1551. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dengan istrinya, yang mana? Dengan istrinya?

1552. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Wakilnya.

1553. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, dengan istri wakil.

1554. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Jadi, istri sama istri bukan (...)

1555. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Siapa namanya, Pak?

1556. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Yang mana, Pak?

1557. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Wakilnya, Yang Mulia.

1558. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Pak Iip Miptahul Paoz.

1559. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak?

1560. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Iip Miptahul Paoz.

1561. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Iip, ya?

1562. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Ya.

1563. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh. Ini pengambilan rekomendasi ini juga anu ... Pak ... bulat atau ada yang voting?

1564. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Pleno semua, Pak. Lewat Pleno, Yang Mulia.

1565. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, artinya suara terbanyak anu ... dengan suara bulat atau ada yang?

1566. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Ada dissenting opinion.

1567. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada?

1568. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Ya.

1569. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Berapa skornya?

1570. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

1 orang.

1571. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

23? 21?

1572. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

41.

1573. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

41, Pleno di mana?

1574. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Di kantor Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya.

1575. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Berapa jumlah semuanya? 5, ya?

1576. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

5 orang, Yang Mulia.

1577. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi 1.

1578. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Dissenting opinion.

1579. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mengatakan berpendapat tidak cukup bukti, gitu?

1580. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Biar disampaikan langsung oleh, Pak.

1581. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Siapa yang punya pendapat berbeda?

1582. BAWASLU: DODI JUANDA

Izin, Yang Mulia. Saya yang berpendapat yang berbeda.

1583. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, Bapak?

1584. BAWASLU: DODI JUANDA

Ya.

1585. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, oke. Nanti saya, tapi pendapat Bapak intinya apa coba? Sebentar!

1586. BAWASLU: DODI JUANDA

Intinya karena menurut saya bahwa tindak pidananya tidak terpenuhi.

1587. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tindak pidananya, ya?

1588. BAWASLU: DODI JUANDA

Ya.

1589. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Administrasinya?

1590. BAWASLU: DODI JUANDA

Ya karena kami melihat di undang-undang apa ... di pasal itu juga apa namanya ... melanggar ada kata-kata melanggar. Kalau melanggarkan, pemikiran saya itu harus ada keputusan pengadilan.

1591. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi Bapak tindak pidana tidak terbukti, seharusnya administrasinya juga tidak terbukti?

1592. BAWASLU: DODI JUANDA

Tidak terbukti, betul.

1593. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Memang pengambilan administrasi dengan Gakkumdu, duluan mana?

1594. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Izin, Yang Mulia. Saya menambahkan.

1595. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1596. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Terkait dengan proses penanganan pelanggaran yang dilaporkan oleh pasangan 04, proses di Gakkumdu di ... di Gakkumdu tahap pembahasan pertama itu memenuhi unsur formil materiil dan mengambil kesimpulan untuk dilakukan klarifikasi terkait dengan laporan. Kemudian kami melakukan klarifikasi beberapa pihak sesuai dengan Per Bawaslu Nomor 8 yang kami apa pedomani tentunya. Yang pertama dengan Saksi/Ahli Pidana. Yang kedua, Saksi/Ahli Hukum Tata Negara. Saksi/Ahli Hukum Pidana dan Tata Negara menyampaikan bahwa persoalan penanganan pelanggaran dugaan penanganan pelanggaran, baik pidana atau administrasi itu berjalan berdiri sendiri tanpa harus keterkaitan dengan hasil keputusan inkrah pengadilan terkait dengan pidananya terbukti atau tidak.

Sehingga Bawaslu yang diberi kewenangan, menurut Per Bawaslu Nomor 8 tahun 2020, penanganan pelanggaran administrasi. Nah, kami melakukan pleno, saya berlima kemudian disimpulkan hasil pleno itu (...)

1597. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Pak, sudah bisa ditangkap (...)

1598. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Ya.

1599. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pertanyaan hakim tadi kan, mana yang lebih dulu itu diputuskan?

1600. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Dipidana, ya.

1601. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dipidana?

1602. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Ya. Sama, harinya sama.

1603. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Harinya sama?

1604. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Di tanggal, di tanggal 26. Sama, hanya beda jam saya.

1605. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Beda jam?

1606. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Beda.

1607. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Duluan mana, Pak?

1608. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Duluan dipidana, di Gakkumdu.

1609. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Duluan pidananya?

1610. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Ya, sekitar 1 jam (...)

1611. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, Bapak berbeda pendapat karena memang sudah tahu bahwa pidana tidak terbukti itu, ya?

1612. BAWASLU: DODI JUANDA

Betul, Yang Mulia.

1613. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sehingga dijadikan tujuan ketika pleno untuk pengambilan rekomendasi itu ... oke. Kemudian tanggal 26 diambil keputusan, tanggal berapa diserahkan ke KPU?

1614. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Tanggal 30 Desember.

1615. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

30 Desember. Kalau Bapak yang Ahmad Aziz bagaimana Saudara sebagai Komisioner Bawaslu, yang sejak awal punya Saudara punya ada masih ada hubungan keluarga menjadi salah satu Pasangan Calon.

1616. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Ya.

1617. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau di internal Bawaslu sendiri bagaimana aturan yang Saudara ketahui?

1618. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Baik, Yang Mulia. Setiap hasil pengawasan di Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, baik itu informasi awal dari Panwascam, dari pengawas jajaran kami, PPKD sampai ke PTPS tentu saya sebagai koordinator pengawasan memberikan informasi ke pimpinan yang lain di Bawaslu untuk dilakukan pembahasan selalui ... sesuai mekanisme yang ada di Per Bawaslu Nomor 8. Jadi tidak hanya saya secara pribadi selaku koordinator pengawasan menentukan atas segala keputusan, baik itu hasil pengawasan berupa temuan ataupun laporan yang masuk ke Bawaslu.

1619. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Artinya bahwa setiap Bapak melak ... melaksanakan tugas (...)

1620. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Ya.

1621. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dilaporkan secara kolektif kolegial (...)

1622. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Betul, betul, Yang Mulia.

1623. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, pertanyaan saya tadi arahnya bukan kesitu, arahnya sebagai anggota atau komisioner Bawaslu (...)

1624. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

He em.

1625. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kemudian, ada salah satu anggota keluarga yang ikut jadi kontestan yang Bapak awasi (...)

1626. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Ya.

1627. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau di internal Bawaslu sendiri seperti apa ketentuan yang ada yang Bapak tahu? Ada tidak ketentuan (...)

1628. BAWASLU: DODI JUANDA

Ya menyampaikan, saya menyampaikan ke semua pimpinan yang ada di Bawaslu.

1629. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pimpinan dimana?

1630. BAWASLU: DODI JUANDA

Di Bawaslu Kabupaten (...)

1631. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Internal?

1632. BAWASLU: DODI JUANDA

Ya.

1633. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau di ketentuan di dalam, di internal Bawaslu secara, secara global secara keseluruhan Bapak tahu tentang (...)

1634. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Tidak ada.

1635. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Enggak ada?

1636. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Ya.

1637. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di Bawaslu tuh kalau mau jadi anggota Bawaslu ada pakta intergritas, tidak?

1638. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Oh ya, karena (...)

1639. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada?

1640. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Ya, ada.

1641. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kode etik ada, tidak? Ada?

1642. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Ada.

1643. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kode etiknya itu ada berapa butir, Pak? Banyak?

1644. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Banyak.

1645. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Banyak?

1646. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Ya. Saya, ya (...)

1647. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada tidak (...)

1648. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Tidak, tidak hafal semua (...)

1649. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Hah? Tidak hafal semua, tapi ada tidak kemudian yang salah satu (...)

1650. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Ya, harus menjaga tentunya, apa independensi.

1651. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah.

1652. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Kami sebagai Komisioner Bawaslu apakah itu keterkaitan hubungan keluarga atau pun sekalipun di luar hubungan keluarga.

1653. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1654. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Yang, yang ada berkaitan dengan (...)

1655. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada Saudara memberi tahu itu ke pimpinan Bawaslu di Bawaslu RI?

1656. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Disampaikan, disampaikan ke.

1657. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sampaikan (...)

1658. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

1659. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dan Bawaslu RI?

1660. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Bahwa saya secara pribadi apa ... ada hubungan kekeluargaan dari istri. Dari istri, istri, dan istri. Nah sampai pada pilkada ini tentu silaturahmi agak apa macet karena proses pilkada ini (...)

1661. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada tidak kalau di aturan internal, apakah di pakta integritas yang menjaga independensi, kemudian di butir-butir kode etik itu bahwa harus mengundurkan diri ketika ada (...)

1662. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Tidak ada, Yang Mulia.

1663. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Conflict interest (...)

1664. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Tidak ada, Yang Mulia.

1665. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ada?

1666. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Ya.

1667. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi harus tetap menjaga independensi.

1668. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Independensi, ya. Integritas, Yang Mulia.

1669. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak bisa kemudian karena jabatan, Bapak harus (...)

1670. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Tidak ada, Yang Mulia.

1671. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Menggunakan hak ingkar itu, enggak ada?

1672. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Tidak ada, Yang Mulia.

1673. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu di berapa, Pak? Waktu (suara tidak terdengar jelas) seperti apa? Di mana bisa diberikan ke Hakim dan kode etiknya?

1674. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Maaf, Yang Mulia? Maksudnya?

1675. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kode etiknya ada, ya?

1676. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Ada.

1677. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada.

1678. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Tentu ada.

1679. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nanti kami pelajari, kami baca.

1680. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Ya.

1681. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, Pak. Jadi istri bapak dengan istrinya Pak Wakil yang calon wakil ini (...)

1682. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Sepupuan.

1683. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sepupuan.

1684. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Ya.

1685. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Satu nenek, ya. Bukan kandung, ya?

1686. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Bukan.

1687. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sepupuan.

1688. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Sepupuan.

1689. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Kalau yang berkaitan dengan RT Siaga, ada laporan tidak?

1690. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Kalau RT Siaga, Yang Mulia, berdasarkan hasil pengawasan dan laporan dari tingkat kecamatan, kami ... dari sekian kegiatan RT Siaga itu, kami merekap pada di 20 titik kegiatan. Itu, Yang Mulia. Di antaranya mulai tanggal 24 Juli bulan Agustus, September, Desember.

1691. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bulan apa?

1692. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Bulan ... bulan Juli tanggal 24 Juli, dimulai 24 Juli, kami menerima data dari pengawas kecamatan kemudian di ... bulan Agustus tanggal 7, kemudian mulai di bulan September juga tanggal 12.

1693. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya?

1694. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Kemudian mulai juga di Desember itu di tanggal 5 Desember.

1695. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini mulai apanya?

1696. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Ya, mulai informasi ada kegiatan RT Siaga (...)

1697. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa Bapak dari Bawaslu menemukan tidak kalau ini juga ada (...)

1698. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Ya, terkait dengan ada dugaan pelanggaran, tidak ada laporan dari panwas kecamatan.

1699. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dari ... dari 4 titik, Juli, Agustus, September (...)

1700. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Betul.

1701. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu dari hasil ... apa ... walaupun tidak ada laporan dan temuan atau dari hasil pengawasan Saudara, bagaimana itu soal RT Siaga itu?

1702. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Terkait dengan RT Siaga, itu program yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, baik sebelum Pasangan Calon Nomor Urut 2 itu sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon.

1703. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Pak, yang satu Bapak siapa namanya, Pak?

1704. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Pak Dodi.

1705. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak?

1706. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Pak Dodi.

1707. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Dedi?

1708. BAWASLU: DODI JUANDA

Dodi.

1709. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Dodi saja yang memberi keterangan, ya?

1710. BAWASLU: DODI JUANDA

Ya.

1711. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau Pak Dodi pandangannya bagaimana tentang RT Siaga?

1712. BAWASLU: DODI JUANDA

Kami tidak bisa mengartikan apa itu RT Siaga, tugas kami adalah mengawasi ... apa namanya ... pengawasan yang dilakukan dan juga menerima laporan dari warga masyarakat.

Dan sampai kemarin pada saat proses tahapan kampanye, kami juga ada laporan-laporan itu, tetapi setelah kami lakukan ... apa namanya ... tindak lanjut secara mendalam tidak terpenuhi unsur-unsur pelanggaran.

1713. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Untuk RT Siaga, ya?

1714. BAWASLU: DODI JUANDA

Ya.

1715. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Kalau ini, Pak, yang berkaitan dengan ... tadi ada kasus yang pembukaan ... eh, segel kotak suara itu, ada laporan tidak?

1716. BAWASLU: DODI JUANDA

Terkait dengan kejadian pada tanggal 11 Desember 2020 di Aula Kantor Kecamatan Cikatomas bahwa hasil pengawasan yang pada pokoknya menemukan adanya kotak suara yang keadaan kabel tis tidak terpasang secara sempurna diketahui pada saat rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan. Panwaslu Kecamatan Cikatomas memberikan rekomendasi langsung secara lisan untuk memastikan kotak suara tersegel sesuai tata cara prosedur mekanisme yang diatur dalam peraturan KPU sekaligus memastikan tidak adanya perubahan jumlah perolehan hasil suara.

Bahwa rekomendasi Panwaslu Kecamatan Cikatomas atas kejadian tersebut ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Cikatomas pada kegiatan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan. Demikian, Yang Mulia.

1717. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ditindaklanjuti terus kemudian selesai atau bagaimana?

1718. BAWASLU: DODI JUANDA

Ya, ditindaknya sesuai dengan ... apa ... tidak ada perubahan-perubahan (...)

1719. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sesuai dengan rekomendasi lisan tadi?

1720. BAWASLU: DODI JUANDA

Ya.

1721. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Rekomendasinya supaya ... tadi kan faktanya memang tadi ... kalau di video tadi kan memang tidak tersegel?

1722. BAWASLU: DODI JUANDA

Betul.

1723. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kemudian rekomendasinya apa? Apakah itu kemudian bagaimana?

1724. BAWASLU: DODI JUANDA

Kami sampaikan, ini hasil dari kerja teman-teman Panwas Kecamatan Cikatomas.

1725. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1726. BAWASLU: DODI JUANDA

Memberikan secara lisan untuk memastikan su ... kotak suara tersegel sesuai tata cara prosedur mekanisme yang diatur dalam peraturan KPU (...)

1727. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1728. BAWASLU: DODI JUANDA

Sekaligus memastikan tidak adanya perubahan jumlah perolehan hasil suara.

1729. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, ada laporan bahwa kemudian suara itu berubah? Perolehan suara?

1730. BAWASLU: DODI JUANDA

Tidak ada.

1731. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ada. Kalau sudah tidak ada perubahan perolehan suara, tapi ada fakta betul bahwa memang itu segelnya tadi terbuka, apakah kemudian menjadi membenaran itu? Artinya, persoalan dianggap selesai?

1732. BAWASLU: DODI JUANDA

Ya ... apa namanya ... kalau menurut teman-teman itu juga ... apa ... bahwa segel itu terpasang, tetapi tidak sempurna.

1733. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, kan terbuka tadi?

1734. BAWASLU: DODI JUANDA

Iya.

1735. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Padahal, segel itu kan mestinya (...)

1736. BAWASLU: DODI JUANDA

Harusnya kuat.

1737. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, Bawaslu kan harus tahu tentang bagaimana bekerjanya segel itu kan hal yang sangat teknis kan harus diketahui juga.

1738. BAWASLU: DODI JUANDA

Betul.

1739. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, jadi karena sudah tidak ada kaitan dengan surat suara yang kemudian (...)

1740. BAWASLU: DODI JUANDA

Berubah.

1741. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Berubah, kemudian penyegelan, kemudian dianjurkan supaya diperbaiki, itu sudah dianggap selesai, ya?

1742. BAWASLU: DODI JUANDA

Ya, Yang Mulia.

1743. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, kalau dari pengawasan Saudara sendiri atau Panwascam yang ada di sana, itu sebenarnya disebabkan apa, Pak, terbukanya segel itu?

1744. BAWASLU: DODI JUANDA

Ya, kalau laporan dari teman-teman Panwaslu Kecamatan Cikatomas hanya tidak sempurna saja.

1745. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak sempurna (...)

1746. BAWASLU: DODI JUANDA

Ketidakpahaman ... apa (...)

1747. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak sempurna apanya? Kita buka lagi, coba videonya dibuka, Cuma 30 detik kok. Kalau tidak sempurna itu kan 1 atau 2, ini kan kayaknya secara ... kita ... kita lihat.

PEMUTARAN VIDEO

Itu, Pak, artinya kalau tidak sempurna, itu berkaitan dengan 1 kotak, yang lain rapi, itu mungkin ... itu ... ini kan hampir semua tadi seperti itu. Oke, tapi itu kan sudah ... sudah apa ... sudah berlalu dan dari Panwascam, intinya sudah memberikan rekomendasi secara lisan untuk penyegelan. Nah, sebenarnya kan pertanyaan saya tadi apakah kemudian hanya dianggap selesai begitu saja atautkah sebenarnya harus ada tindakan-tindakan lain, Pak, kalau memang sudah ... peristiwa itu betul terjadi terlepas ada pengaruh ke suara atau tidak.

1748. BAWASLU: DODI JUANDA

Ya, apa ... kalau menurut kami karena kami hanya mendapatkan laporan dari teman-teman Panwascam bahwa mereka memberikan rekomendasi secara lisan dan ditindaklanjuti, jadi dianggap selesai.

1749. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dari Panwascam, ya?

1750. BAWASLU: DODI JUANDA

Iya.

1751. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu sudah, tadi sudah. Baik, Bapak jadi anggota Bawaslu sudah berapa pe ... kali? Sudah periode pertama atau sudah ... baru satu periode atau sudah (...)

1752. BAWASLU: DODI JUANDA

Saya menjadi pengawas pemilu itu dari tahun 2009 dan menjadi anggota ... Bawaslu kabupaten di tahun 2018.

1753. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

2018. Nah, kalau berkaitan dengan pilpres, kemarin sudah ikut? Pilpres ... Pileg?

1754. BAWASLU: DODI JUANDA

Ikut.

1755. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, kalau 2018 kan juga ada Pileg Pilpres itu, 2019. Sebenarnya ada tidak mencuat soal percepatan sertifikasi wakaf ini?

1756. BAWASLU: DODI JUANDA

Tidak ada, Pak.

1757. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ada. Itu kan kalau mendengar penjelasan dari BPN tadi kan itu program dari 2018 sehingga 2019 tercapai 55 ... lima puluh ribu sekian, 57.000 nah ini, targetnya naik. Tapi, belum ... belum jadi isu yang dipersoalkan di situ, ya waktu itu ya, Pak?

1758. BAWASLU: DODI JUANDA

Betul, Yang Mulia.

1759. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Kalau laporan-laporan berkaitan dengan ketika RT ... sori, RT dikumpulkan di kecamatan-kecamatan tadi yang ... yang disampaikan oleh Susilo Firdaus tadi. Itu bahwa ada pesan-pesan dari sekdes juga pernah dapat laporan?

1760. BAWASLU: DODI JUANDA

Tidak ada, Yang Mulia.

1761. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bahwa supaya dibantu pak camat berkaitan dengan Pasangan 02, tidak ada?

1762. BAWASLU: DODI JUANDA

Tidak ada, Yang Mulia.

1763. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak, kalau Bapak, Pak Dodi, Pak Dodi, ya?

1764. BAWASLU: DODI JUANDA

Betul, Yang Mulia.

1765. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saya ingin sedikit argumen Anda karena pidana tidak terbukti, kemudian administrasi menurut Saudara karena ini ada keterkaitan apalagi ada unsur melanggar itu, itu apakah kemudian, secara substansi ... saya katakan secara substansi. Karena secara formal karena ada unsur

melanggar itu kaitannya dengan pidana tidak terbukti, kemudian Bapak menyandarkan ke sana. Sebenarnya secara substansial, menurut Bapak bagaimana sih, surat edaran dan surat instruksi itu? Substansinya. Maksudnya substansi dan isunya itu dengan ... apa ... momentum ada sebagai Bawaslu kan punya intuisi yang lebih tajam soal itu kan, mestinya. Kalau mendengar keterangan pemerintah daerah, keterangan Pihak Terkait, pasti kan atau ... tapi kan ini persoalannya adalah diperlukan sebuah intuisi yang tajam untuk seorang Bawaslu, bagaimana sih momentum ini dengan ... dengan keluarnya itu dengan ... padahal pak sekda juga mengatakan ini sebenarnya dari Maret ... eh, dari ... ya, dari Maret, pak BPN sudah menghadap. Kemudian karena Covid, akhir-akhir bulan, bulan 9 dikeluarkanlah relaksasi itu. Bagaimana panda ... pemahaman Saudara soal ... untuk Pak Dodi, ya?

1766. BAWASLU: DODI JUANDA

Ya. Izin, Yang Mulia. Kalau kami ... apa ... menurut saya, sih, sederhana bahwa program itu adalah program pemerintah pusat dan dalam di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ya, terkait hal itu, terkait kebijakan atau program pemerintah daerah. Jadi kalau kami melihat bahwa itu adalah program pemerintah pusat dan kami juga mengaitkan dengan ... apa ... pandangan pribadi saya terkait dengan bahwa pelanggaran pemilunya tidak terpenuhi, tidak memenuhi unsur maka secara ... apa ... logika saya, secara administrasinya pun juga terpenuhi karena pasalnya juga sama, sanksinya juga sama.

1767. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Meskipun tahu itu lembaganya berbeda yang memutuskan?

1768. BAWASLU: DODI JUANDA

Betul.

1769. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Pak Ketua Panel dan Pak Daniel masih ... ada pendalaman?

1770. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih. Itu laporan yang tanggal 7 Desember tadi dikatakan dan tanggal 16 Desember itu sebetulnya sama, ya?

1771. BAWASLU: DODI JUANDA

Sama.

1772. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tapi tanggal 7 itu karena masih kekurangan dokumen mungkin, ya. Yang tanggal 7 itu, siapa yang laporkan?

1773. BAWASLU: DODI JUANDA

Efka MT[sic!]. Itu adalah pemantau pemilu (...)

1774. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Pemantau pemilu?

1775. BAWASLU: DODI JUANDA

Ya.

1776. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kemudian tanggal 16?

1777. BAWASLU: DODI JUANDA

Pasangan calon.

1778. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Paslon?

1779. BAWASLU: DODI JUANDA

Ya.

1780. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Jadi waktu pemantau pemilu ajukan ini, ini, karena dokumennya tidak lengkap, tidak diregistrasi.

1781. BAWASLU: DODI JUANDA

Betul.

1782. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tapi yang pasti bahwa laporan ini sudah ada, ya?

1783. BAWASLU: DODI JUANDA

Ada

1784. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Sudah ada. Soalnya tadi Termohon ... Kuasa Termohon mengatakan laporan itu baru setelah tahu kalah misalnya, ya. Kalau tidak salah seperti itu. Tapi ternyata ini sudah ada laporan duluan oleh pemantau pemilu?

1785. BAWASLU: DODI JUANDA

Betul.

1786. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Pemantau pemilu itu terakreditasi tidak?

1787. BAWASLU: DODI JUANDA

Terakreditasi.

1788. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Terakreditasi. Ada berapa pemantau pemilu yang terakreditasi di dalam pilkada?

1789. BAWASLU: DODI JUANDA

Yang terkait itu, akreditasi pem ... pem apa ... pemantau pemilu adalah KPU Kabupaten Tasik.

1790. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya. Oh, ya. Boleh Termohon ada berapa pemantau yang terakreditasi?

1791. TERMOHON: ZAMZAM ZAMALUDIN

Izin, Yang Mulia. Untuk pelaksanaan pilkada tahun 2020 di Kabupaten Tasikmalaya hanya ada 1 pemantau saja.

1792. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Hanya ada 1, ya. Nah, pemantau ini yang melaporkan tanggal 7 itu, ya?

1793. TERMOHON: ZAMZAM ZAMALUDIN

Ke Efka ... bahwa Efka MT[sic!] itu betul adalah pemantau pemilu di pilkada.

1794. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Jadi itu ... yang pasti sudah ada laporan tetapi bukan oleh paslon, ya?

1795. BAWASLU: DODI JUANDA

Betul, Yang Mulia.

1796. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Bukan oleh paslon. Nah, terkait dengan diskualifikasi, ya. Pada waktu diskualifikasi itu tadi di Pleno (...)

1797. BAWASLU: DODI JUANDA

Izin.

1798. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya?

1799. BAWASLU: DODI JUANDA

Izin, Yang Mulia. Bahwa rekomendasi Bawaslu tidak ada kata-kata diskualifikasi.

1800. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Bukan. Yang tanggal 16 ... laporan tanggal 16.

1801. BAWASLU: DODI JUANDA

Betul, Yang Mulia.

1802. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Itu tidak ada diskualifikasi?

1803. BAWASLU: DODI JUANDA

Dalam hal rekomendasi yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya, kata-kata kami tidak ada mendiskualifikasi pasangan calon. Yang ada adalah untuk merekomendasikan kepada KPU untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1804. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, jadi normatif saja, ya?

1805. BAWASLU: DODI JUANDA

Ya.

1806. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1807. BAWASLU: DODI JUANDA

Ya.

1808. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Nah, tapi tidak ada putusan yang terkait diskualifikasi? Dalam laporan ... dalam laporan di temuan itu, ada tidak?

1809. BAWASLU: DODI JUANDA

Dalam hal kajian hukum itu memang ada.

1810. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kajiannya ada, tetapi kalau putusan tidak ada?

1811. BAWASLU: DODI JUANDA

Tidak ada.

1812. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kajiannya ada. Oke. Kemudian ini yang terkait dengan surat nomor 288/Kab.Bawaslu, tertanggal 15 Desember, Pak. Itu Apakah sudah ada feedback-nya dari KPU?

1813. BAWASLU: DODI JUANDA

Itu perlu diperjelas bahwa kami menyampaikan secara langsung terkait rekomendasi pada saat sidang pleno rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Tasik terutama terkait dengan elemen data pemilih.

1814. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

He eh.

1815. BAWASLU: DODI JUANDA

Dan itu sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya pada saat proses yang sedang berjalan. Permasalahannya karena kami mengirimkan surat resmi, KPU tidak menjawabnya. Tetapi pada dasarnya sudah ditindaklanjuti pada saat sidang rapat pleno itu.

1816. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Mungkin saya ke Termohon dulu. Terkait hal itu, bisa ada penjelasannya?

1817. TERMOHON: ZAMZAM ZAMALUDIN

Baik, terima kasih, Yang Mulia, mohon izin, terkait dengan rekomendasi Bawaslu untuk perbaikan elemen data pemilih pada saat pelaksanaan pleno di 23 kecamatan itu disampaikan secara lisan pada saat pleno, yaitu di tanggal 15 Desember tahun 2020. Dan kemudian, langsung kita ... kami tindaklanjuti pada saat itu juga dengan memerintahkan kepada rekan-rekan PPK beserta teman-teman KPU untuk menelusuri dan memperbaiki data tersebut sehingga setiap

kecamatan kemudian setelah adanya perbaikan ... input data pemilih dari setiap kecamatan kemudian disampaikan kepada para saksi dan juga pada pihak Bawaslu pada saat itu, apakah perbaikan tersebut sudah dapat dinyatakan klir dan diterima oleh seluruh pihak. Dan pada saat itu juga setiap kecamatan dari 23 kecamatan tersebut dinyatakan klir dan diterima oleh baik saksi maupun oleh pihak Bawaslu. Sehingga atas perolehan ... apa ... penetapan perolehan suara dari masing-masing kecamatan di 23 kecamatan tersebut dinyatakan sah.

Dan kemudian, surat tertulis dari pihak Bawaslu itu kami terima pada tanggal 16 Desember, yaitu setelah rapat ... rekapitulasi setelah rapat pleno tersebut berakhir atau selesai, dinyatakan selesai. Seperti itu.

1818. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tanggal 16 Desember surat dari Bawaslu?

1819. TERMOHON: ZAMZAM ZAMALUDIN

Ya, betul. Kami terima langsung yang di ... apa ... disampaikan secara langsungnya tanggal 16, yaitu setelah pleno berakhir.

1820. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Jadi itu langsung ditindaklanjuti?

1821. TERMOHON: ZAMZAM ZAMALUDIN

Betul, karena sebelumnya disampaikan secara lisan.

1822. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh. Jadi ada informasi lisan dulu, baru kemudian surat tertulis, ya?

1823. TERMOHON: ZAMZAM ZAMALUDIN

Betul.

1824. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Saya balik ke Bawaslu lagi.

Terkait dugaan adanya keterlibatan ASN, ya. Khususnya ketua satpol PP. Itu apakah memantau sampai dimana perkembangannya di pengadilan?

1825. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Izin, Yang Mulia, terkait dengan netralitas ASN, saudara Iwan, itu sudah dilampirkan tadi tambahan alat buktinya.

1826. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, ada tambahan alat bukti? (...)

1827. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Sudah ada.

1828. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke.

1829. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Itu keputusan pengadilannya tanggal 8 Februari 2021 Nomor 43/PIB.SUS/2021/PN Tasikmalaya.

1830. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, putusannya apa di situ?

1831. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Putusannya terbukti melanggar pidana pemilihan terkait netralitas ASN, Pasal 71. Itu denda pidana Rp4.000.000,00.

1832. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Dendanya Rp.4.000.000,00.

1833. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Ya, Rp.4.000.000,00.

1834. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, kemudian apakah tahu bahwa beliau sekarang masih sebagai ketua satpol PP?

1835. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Masih sebagai kepala satpol pp.

1836. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Masih, ya?

1837. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Masih.

1838. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kemudian tadi yang camat yang katanya pensiun itu kan tanggal 1 Desember, ya?

1839. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Betul, Yang Mulia. Terkait dengan Camat Jatiwaras, sama. Sudah diputus oleh pengadilan tertanggal 18 Januari 2021. Terkait dengan laporannya, karena Camat Jatiwaras ini laporan bentuknya dari masyarakat kejadiannya pada tanggal 24 ... 25 ... 25, laporannya, Desember ... November, sebelum pension, pak camat.

1840. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Itu laporannya November apa Desember?

1841. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

November, Yang Mulia.

1842. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

November?

1843. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Ya.

1844. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Putusan di pengadilannya?

1845. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Di pengadilannya Januari tanggal 18.

1846. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Jadi, putusannya itu beliau sudah pensiun?

1847. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Sudah, Yang Mulia.

1848. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Karena tanggal 1 Desember?

1849. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Betul.

1850. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Itu SK pensiunnya kok jauh-jauh hari sebelum beliau pensiun, ya?
Apakah Bawaslu punya dokumen?

1851. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Tidak ada, Yang Mulia.

1852. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tidak ada. saya tadi baca dokumen mana saya lupa, tapi itu justru permohonan pensiunnya sudah jauh-jauh hari, ya. Nah, itu mungkin yang tadi penjelasan Pak Sekda, ya karena mungkin ada aspke psikologis seperti apa. Tapi yang pasti putusannya itu dia sudah pensiun?

1853. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Ya, ya, Yang Mulia.

1854. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

1855. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya ke Pak Dodi Juanda dulu, ya atau semua terserah siapa yang mau menjawab di antara dua, Pak Dodi, Pak Ahmad Aziz, mana Pak Ahmad Aziz? Terserah nanti siapa yang mau menjawab.

Saya kembali ke ini, ke soal Kecamatan Jatiwaras. Ini tadi yang baru-baru disampaikan sudah apa ... pidananya sudah, sudah pensiun baru putus pidananya. Betul?

1856. BAWASLU: DODI JUANDA

Betul, Yang Mulia.

1857. KETUA: ASWANTO

Kemudian, Pak Enong Mawardi itu siapa itu?

1858. BAWASLU: DODI JUANDA

Camat Jatiwaras, Yang Mulia.

1859. KETUA: ASWANTO

Oh, itu yang camat itu?

1860. BAWASLU: DODI JUANDA

Ya.

1861. KETUA: ASWANTO

Oke. Kemudian yang satpol PP? Siapa yang menjawab, silakan, yang satpol PP?

1862. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Izin, Yang Mulia, untuk Pak satpol PP ini sifatnya temuan dari pengawas pemilu yang berawal dari informasi awal dari masyarakat kepada Bawaslu sesuai dengan Perbawaslu 8 kami melakukan penelusuran apakah untuk memastikan kebenaran informasi awal itu dengan melakukan klarifikasi sampai pada proses dimana hasil penelusuran itu dinaikkan kepada laporan hasil pengawasan untuk diteruskan di pembahasan di Sentra Gakkumdu. Nah, di Sentra Gakkumdu sudah terpenuhi sesuai dengan unsur formil materiil di tahap

lanjut ke penyidikan, penyelidikan dan ke penyidikan sampai ke kejaksaan, kemudian dilimpahkan ke pengadilan sampai pada inkraht berdasarkan Nomor Putusan Pidana 43/PID.SUS/2001/PN Tasikmalaya per 8 Februari 2021.

1863. KETUA: ASWANTO

Berapa lama dipidana dia? Pidananya berapa lama?

1864. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Denda saja, Yang Mulia.

1865. KETUA: ASWANTO

Denda saja?

1866. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Ya.

1867. KETUA: ASWANTO

Hukuman denda saja, ya?

1868. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Ya, denda.

1869. KETUA: ASWANTO

Baik. Kemudian, ini soal pembukaan kotak tadi di Kecamatan Cikatomas. Saya masih apa namanya ... belum terlalu jelas betul. Itu dibuka di tingkat kecamatan, ya atau di tingkat kabupaten?

1870. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Di tingkat kecamatan.

1871. KETUA: ASWANTO

Tingkat kecamatan. Berapa kotak suara di tingkat kecamatan itu?

1872. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

14 kotak suara.

1873. KETUA: ASWANTO

14 kotak suara. Semua tidak tersegel?

1874. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Menurut laporan teman-teman panwaslu kecamatan itu, itu tersegel, cuma tidak (...)

1875. KETUA: ASWANTO

Enggak, tadi kan kita sudah lihat gambarnya. Tersegel itu kalau segelnya diklep. Tadi itu cuma dimasukkan saja lalu terbuka begini, kan?

1876. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Betul, Yang Mulia.

1877. KETUA: ASWANTO

Berarti tidak tersegel?

1878. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Ya.

1879. KETUA: ASWANTO

Nah, ini agak-agak apa ... agak problem memang karena kan kalau Pasal 112 kita lihat salah satu yang menyebabkan PSU itu adalah kotak terbuka. Bahkan Mahkamah Konstitusi sudah pernah membuat putusan kotak suara itu hanya boleh dibuka di tempat yang memang sudah ditentukan, TPS, PPK, kabupaten, atau provinsi. Nah, ini kami agak panjang menggali ini karena ini sangat prinsip. Terlepas berpengaruh atau tidak berpengaruh di undang-undang tidak dijelaskan itu. Pembukaan kotak suara itu implikasinya Pasal 112. Nah, tidak disegel itu bisa dimaknai terbuka. Ini, ini perlu apa namanya ... kami dalam lebih jauh karena ini sangat prinsip.

Baik, kemudian tadi, ini ada apa namanya ... perbedaan pandangan antara 5 komisioner, ada 4 yang mengatakan terbukti melanggar Pasal 73, ya? Pasal 71 ayat (3) atau Pasal 73?

1880. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

71 ayat (3).

1881. KETUA: ASWANTO

Undang-Undang Nomor 10 atau?

1882. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016.

1883. KETUA: ASWANTO

Pasal 71 ayat (3), "Gubernur, wakil gubernur ... tidak boleh menggunakan kewenangan." Itu yang ter ... bukti?

1884. BAWASLU: AHMAD AZIZ FIRDAUS

Betul, Yang Mulia.

1885. KETUA: ASWANTO

Nah, di rekomendasi Saudara ditegaskan bahwa Pasal 71 ayat (3) itu yang dilanggar? Betul?

1886. BAWASLU: DODI JUANDA

Betul, Yang Mulia.

1887. KETUA: ASWANTO

Apa sanksinya kalau Pasal 71 ayat (3) itu? Tadi kan ini saya ke Pak Dodi, kan Pak Dodi mengatakan di dalam rekomendasi Bawaslu itu tidak ada frasa *dis* atau kata *diskualifikasi*, tidak ada diksi *diskualifikasi*. Apakah ada sanksi lain selain diskualifikasi atau pembatalan sebagai pasangan calon kalau Pasal 71 ayat (3) itu terbukti?

1888. BAWASLU: DODI JUANDA

Makanya kami juga menyerahkan kepada KPU untuk mengambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu.

1889. KETUA: ASWANTO

Bapak tidak tahu bahwa kalau Pasal 71 ayat (3) itu implikasinya ke ayat (5)?

1890. BAWASLU: DODI JUANDA

Ya, Yang Mulia.

1891. KETUA: ASWANTO

Apa yang diatur di ayat (5)?

1892. BAWASLU: DODI JUANDA

Tapi ... di ayat (5) itu ada frasa yang melanggar itu.

1893. KETUA: ASWANTO

Dalam hal gubernur, wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, walikota atau wakil walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) petahana tersebut dikenakan sanksi pembatalan.

1894. BAWASLU: DODI JUANDA

Betul, kata-kata ... kalau menurut pribadi saya (...)

1895. KETUA: ASWANTO

Ya, artinya kan ... bukan kata-kata Saudara, ini kan 4 yang mengatakan berarti sudah putusan lembaga.

1896. BAWASLU: DODI JUANDA

Betul.

1897. KETUA: ASWANTO

Karena Anda kolektif kolegial, 4 sudah mengatakan terjadi pelanggaran Pasal 71 ayat (3) berarti itulah hasil keputusan lembaga.

1898. BAWASLU: DODI JUANDA

Betul, Yang Mulia.

1899. KETUA: ASWANTO

Bukan keputusannya Pak Dodi.

1900. BAWASLU: DODI JUANDA

Betul.

1901. KETUA: ASWANTO

Kalau soal tadi itu, semua orang bisa punya pandangan sendiri-sendiri, tetapi secara kelembagaan putusannya adalah Pasal 71 ayat (3).

1902. BAWASLU: DODI JUANDA

Betul.

1903. KETUA: ASWANTO

Nah, konsekuensinya Pasal 71 ayat (3) itu adalah Pasal 71 ayat (5) sehingga sekalipun tidak dicantumkan diskualifikasi kalau KPU menindaklanjuti itu pasti diskualifikasi. Kan, gitu.

Itu Pak Dodi, ya.

1904. BAWASLU: DODI JUANDA

Ya, Yang Mulia.

1905. KETUA: ASWANTO

Baik, ini penting karena ... apa namanya ... ini agak krusial, ya. Terakhir dari Bawaslu, ya. Mana saya lupa tadi yang terakhir malah. Yang terakhir batal saja nanti tidak bisa tidur, Pak Dodi kalau ... sebentar. Dokumennya Bapak tebal banget jadi ... baik, pertanyaan yang terakhir. Batal saja.

Sekarang kita saahkan bukti dulu, ya. Bukti untuk Perkara Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 ini Pemohon memasukkan bukti tambahan P-209 sampai dengan P-216, betul ya? Sudah diperiksa dan lengkap.

KETUK PALU 1X

Kemudian Pihak Termohon T-25 sampai dengan T-33. Betul, Pak, ya?

1906. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Betul, Yang Mulia.

1907. KETUA: ASWANTO

Baik, sudah diperiksa dan lengkap.

KETUK PALU 1X

Kemudian Pihak Terkait PT-66 sampai dengan PT-88?

1908. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Betul, Yang Mulia.

1909. KETUA: ASWANTO

Baik, sudah diperiksa dan lengkap.

KETUK PALU 1X

Baik, pemeriksaan perkara ini selesai. Tugas Bapak-Bapak sudah selesai, Tugas Pemohon, Tugas Kuasa Termohon, Kuasa Pihak Terkait sudah selesai semua. Sekarang tugasnya kami yang belum selesai sehingga karena tugas Bapak-Bapak sudah selesai sudah bisa ngopi bareng.

Terima kasih sekali lagi untuk semua pihak, baik yang hadir secara langsung maupun yang apa ... Pihak Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, terima kasih atas keterangannya maupun Pihak-Pihak yang hadir secara online. Terima kasih untuk semua ada KPU RI, Bawaslu RI, enggak ada prinsipal yang hadir, ya, kecuali kliennya Pak Nurdin yang hadir. Terkait tidak hadir Prinsipalnya?

1910. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUCHAMMAD ALFARISI

Tidak hadir, Yang Mulia.

1911. KETUA: ASWANTO

Pemohon tidak hadir juga?

1912. KUASA HUKUM PEMOHON: GIOFEDI RAUF

Tidak hadir, Yang Mulia.

1913.KETUA: ASWANTO

Ya? Hadir Prisipalnya Pemohon, ya. Mestinya tadi agak galak begitu, Pak, biar kelihatan kinerjanya.

Baik, terima kasih untuk semua. Sidang kita untuk Perkara 51/PHP.BUP-XIX/2021 selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.16 WIB

Jakarta, 4 Maret 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

